



**Pemerintah
Kabupaten Morowali**

RKPD 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI





BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022:
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah Tahunan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2022

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- | | | |
|------------|---|--|
| a. BAB I | : | PENDAHULUAN |
| b. BAB II | : | GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH |
| c. BAB III | : | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| d. BAB IV | : | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH |

- e. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peranturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD tahun 2022 disusun mengacu pada RPJMD 2019-2023 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019;
- (2) RKPD tahun 2022 sebagaimandimaksudpadaayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2022.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 1 Juli 2021
BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Juli 2021
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, SH.,MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005



DAFTAR ISI

Daftar Isi - i

	2.1.2.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-25
	2.1.2.1.3	Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga...	II-26
	2.1.2.1.4	Nilai Tukar Petani.....	II-29
	2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-30
	2.1.2.2.1	Gini Ratio.....	II-30
	2.1.2.2.2	Kemiskinan.....	II-31
	2.1.2.2.3	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-32
	2.1.2.2.4	Angka Melek Huruf.....	II-33
	2.1.2.2.5	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-34
	2.1.2.2.6	Pengangguran.....	II-35
2.1.3		Aspek Pelayanan Umum.....	II-36
	2.1.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-36
	2.1.3.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-36
	2.1.3.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-38
	2.1.3.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-44
	2.1.3.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman.....	II-46
	2.1.3.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-47
	2.1.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-48
	2.1.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-53
2.2		Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II-56
2.3		Permasalahan Pembangunan Daerah	II-64
BAB III		KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto.....	III-2
	3.1.2	Pembangunan Manusia	III-3
	3.1.3	Kemiskinan	III-4
	3.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-5
	3.1.5	Struktur Sektor Ekonomi	III-5
	3.1.6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio	III-6
	3.1.7	Pendapatan Per Kapita	III-7
	3.1.8	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-8
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
	3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-9
	3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-11

	3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-13
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-4
	4.2.1 Keterkaitan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali.....	IV-4
	4.2.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	IV-51
	4.3 Inovasi Pembangunan Daerah	IV-56
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
	5.1 Rencana Program Prioritas.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
	6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2022 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2021, RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD Kabupaten Morowali, RPJMD Kabupaten Morowali, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor

0136);

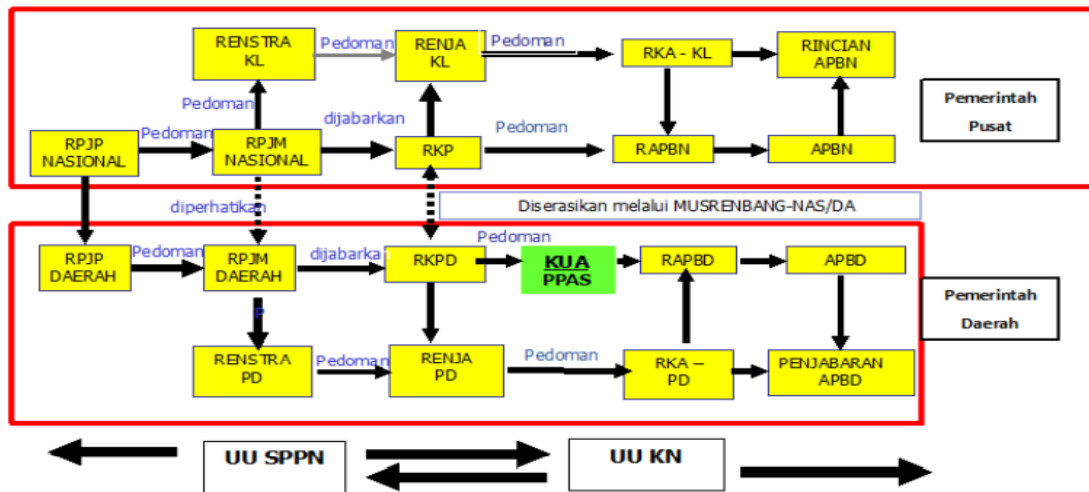
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (RPJMD) Periode 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan

dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Sumber: diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.2.

Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2022, RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005 - 2025, dan

RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018 - 2023. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD Morowali.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Morowali dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD Tahun 2022; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Morowali.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Morowali.

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Sulawesi Tengah dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2022, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2022. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.3. Arah Pembangunan Kewilayah

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Morowali yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kabupaten Morowali.

5.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Secara Administrasi Kabupaten Morowali memiliki batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; - Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali (2021), luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari total wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada Tabel 2.1 Berikut ini :

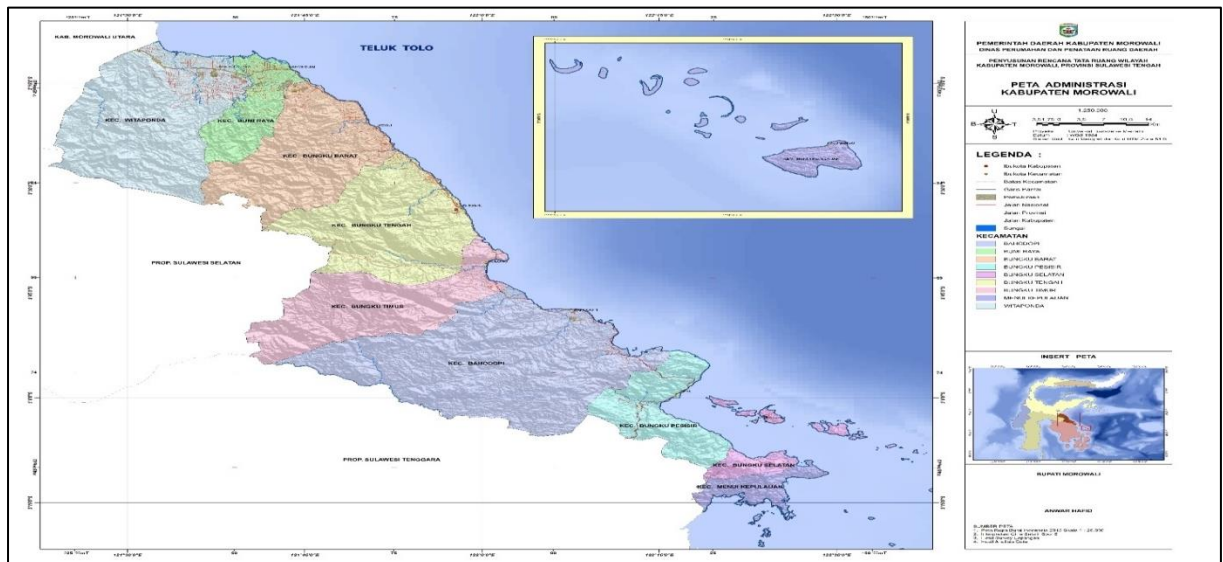
Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Menui Kepulauan	223,63	4,09	23/1	Ulunambo	99
Bungku Selatan	403,90	7,38	26	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,75	12	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,22	13	Bahonsuai	48
Witaponda	519,70	9,50	9	Laantula Jaya	61
Luas Kabupaten	5.472,00	100,00	133		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 9 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat,

Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan. Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali, i selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Administrasi

2.1.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara $01^{\circ} 31'12''$ Lintang Selatan dan $03^{\circ}46' 48''$ Lintang Selatan serta antara $121^{\circ}02' 24''$ Bujur Timur dan $123^{\circ}15'36''$ Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

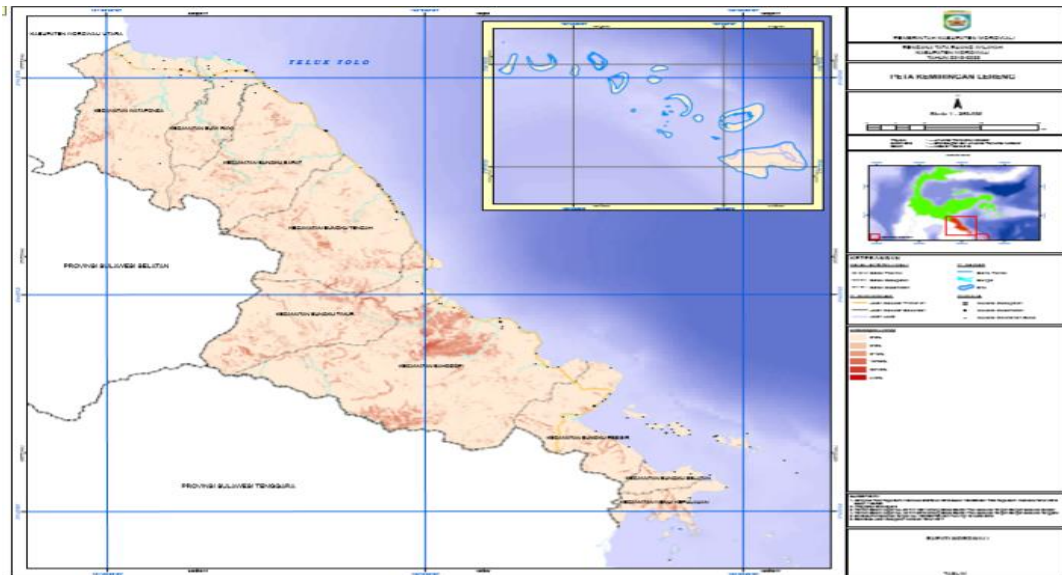
Selengkapnya dapat duraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam

dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerangan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

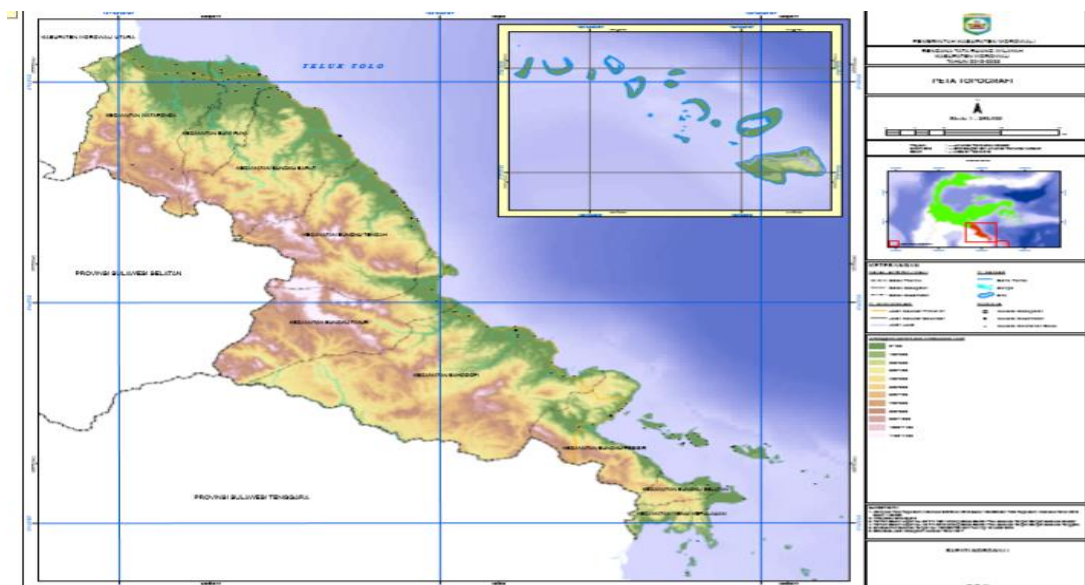
2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerangannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 % luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti

bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar. selengkapnya tertera pada peta Topografi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.2 Peta Topografi dan Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng berikut ini :



Gambar 2.2. Peta Kemiringan

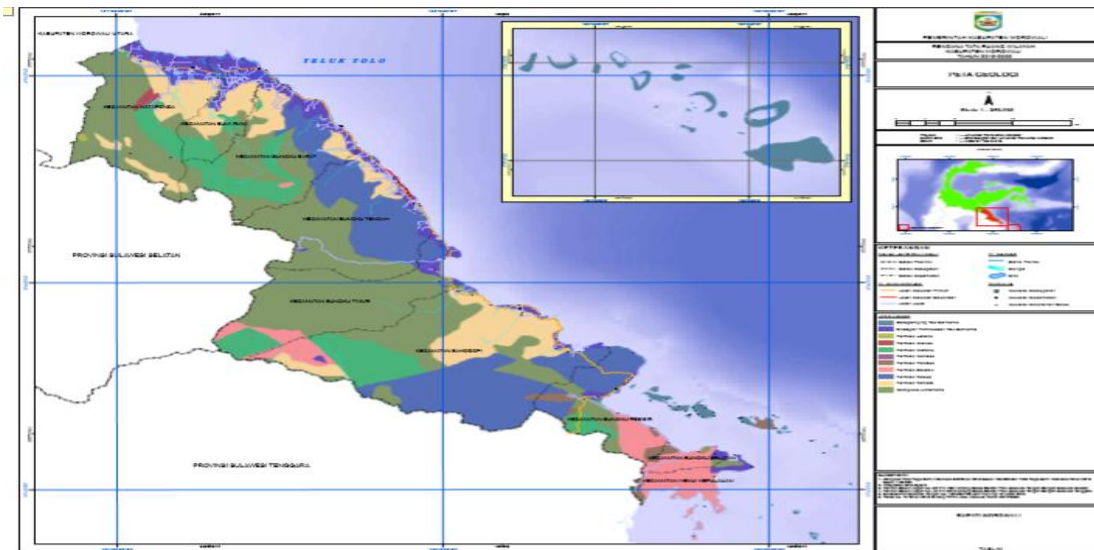


Gambar 2.3. Peta Topografi

2.1.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: □ Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; □ Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; □ Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; □ Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan (Morowali). Selengkapnya tertera pada peta Geologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.4

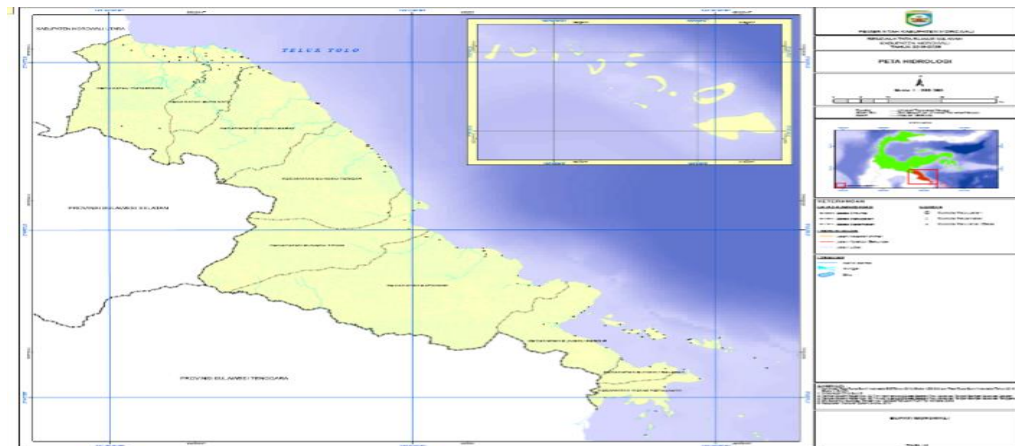


Gambar 2.4. Peta Geologi

2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

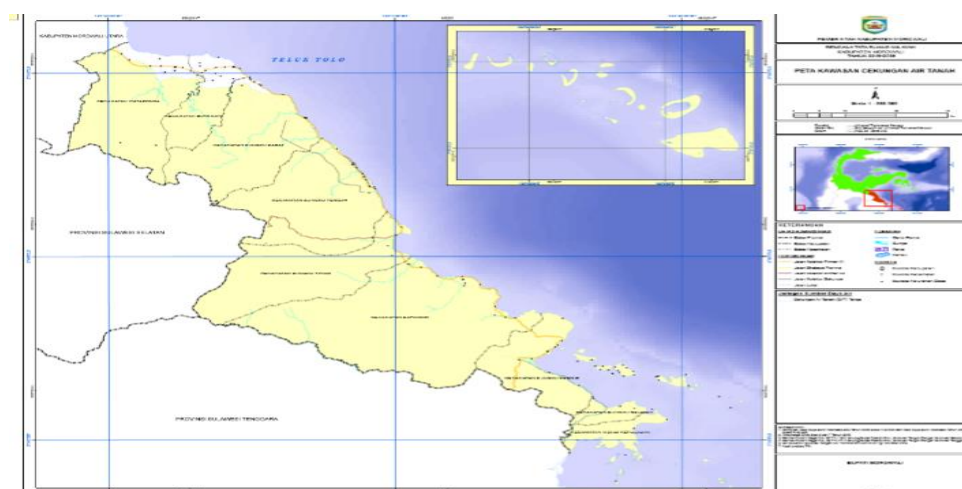
Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Selengkapnya dijelaskan pada peta Hidrologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.5



Gambar 2.5. Peta Hidrologi

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada Gambar 2.6

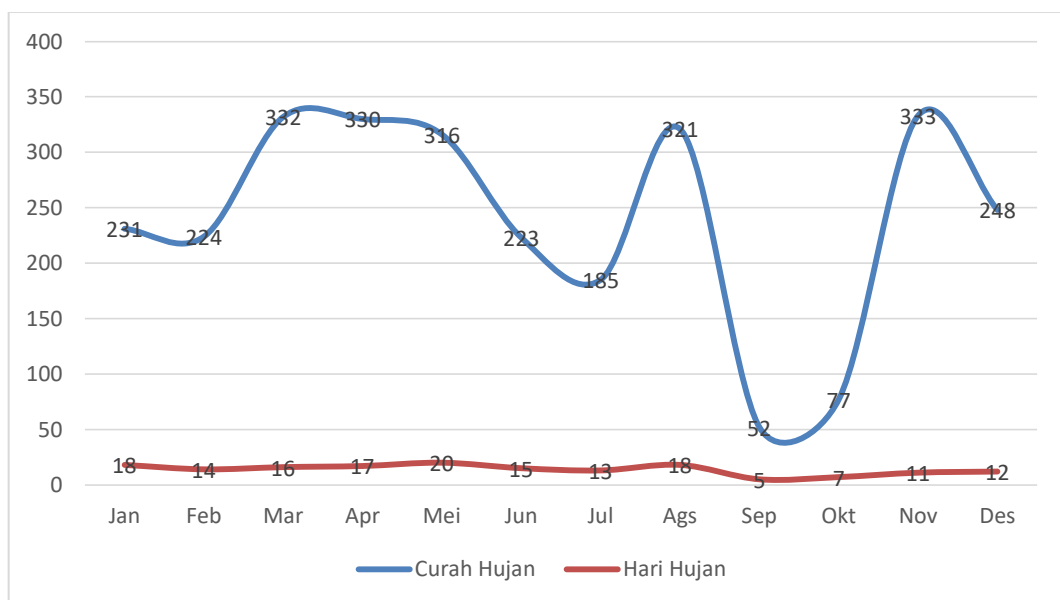


Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah

2.1.1.1.6. Klimatologi

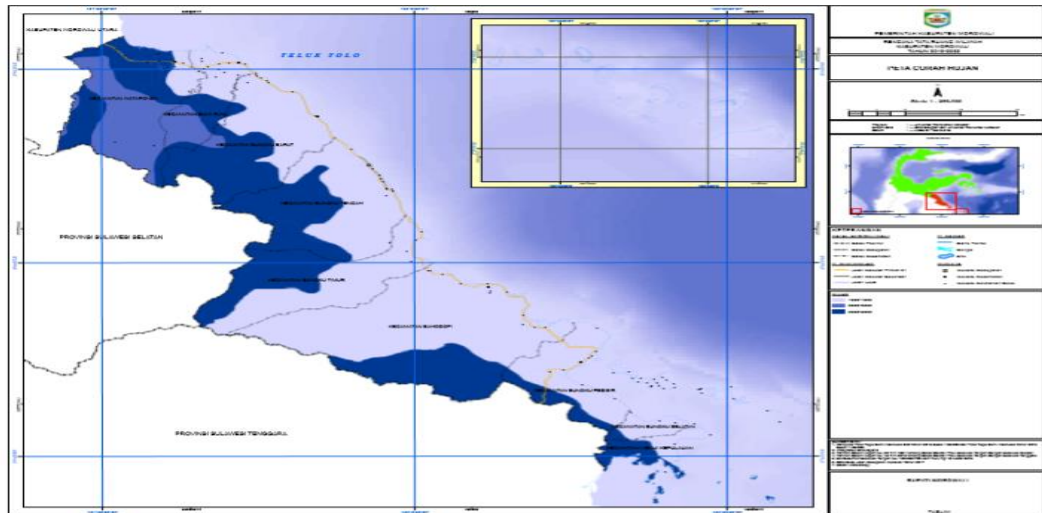
Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di manfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm3 dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm3 selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm3 selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm3 selama 7 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan gambar 2.8 peta Klimatologi Kabupaten Morowali



Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka, Tahun 2019

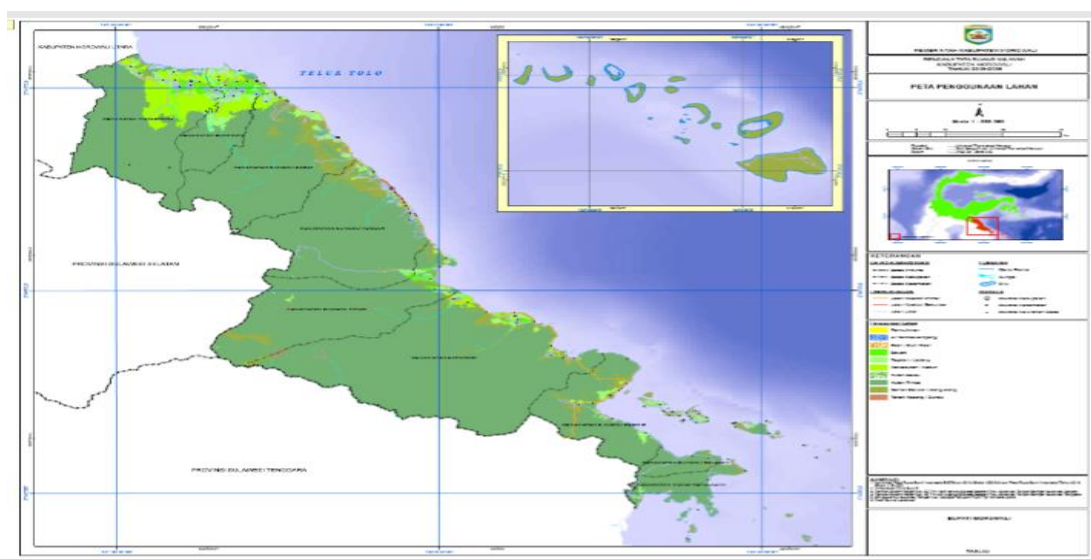
Gambar 2.7. Kondisi Iklim Morowali 2018



Gambar 2.8. Peta Curah Hujan

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan. Selengkapnya dijelaskan pada tabel 2.3 dan peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan

2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 .

Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat di kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
- f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan

- Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
 - i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
 - k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
 - l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan

Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;

- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali disetiap kecamatan, Batu gunung disetiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
- q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
- s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafo baho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo–Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b).

Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;

- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
- w. Rencana kawasan potensi parawisata lainnya di setiap kecamatan;
- x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 10. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan

Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

2.1.1.1.9.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang). Luas lahan padi (Ha) menurut jenis irigasi dan jenis padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha)
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2020

Jenis Tanaman	Tahun (Ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	10.767,6	9.588,2	10.580	9.068,94	9.225
Jagung	1.112,6	784,4	1.530,40	1.179,70	1.814,40
Ubi Kayu	113,0	123,00	160,00	144	4.823,76
Ubi jalar	66,0	42,50	46,50	38,50	1.091,51
Kacang Tanah	45,0	32,0	51,50	52,50	59,47
Kacang Kedelai	192,0	26,0	1.543,70	61,00	229,00
Kacang Hijau	45,9	18,0	137,80	35,93	57,99

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.2, luas panen tanaman padi di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan menjadi seluas 9.225 Ha di mana pada sebelumnya Tahun 2019 luas tanaman padi seluas 9.068,94 Ha.

Namun untuk produksi jenis tanaman pangan lokal di Kabupaten Morowali Tahun 2019-2020, secara keseluruhan mengalami penurunan produksi seperti padi menurun dari 44.671,91 ton pada Tahun 2019 menjadi 42.068 pada Tahun 2020. untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi padi dan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2020 menurut jenis (ton) dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton)
Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2020

Jenis Tanaman	Produksi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	51.038,4	46.723,3	51.556,34	44.671,91	42.068
Jagung	5.077,9	2.898,4	5.654,83	5.754,58	8.018,58
Ubi Kayu	2.046,5	3.280,3	4.267,04	173,00	4.347,05
Ubi jalar	794,2	553,9	605,76	68,90	618,78
Kacang Tanah	54,6	40,3	64,84	53,00	64,84
Kacang Kedelai	236,5	34,5	2.046,95	80,89	303,58
Kacang Hijau	36,8	14,4	35,93	73,40	35,93

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Untuk produksi beberapa jenis tanaman hortikultura Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : menunjukkan bahwa tanaman Cabai dan tomat merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali.. Selain potensi tanaman hortikultura jenis sayuran, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi produksi tanaman buah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama di Kabupaten Morowali Tahun 2017-2020

Jenis Tanaman	Tahun (Ku)			
	2017	2018	2019	2020
Bawang Merah	126	34	143	268
Cabe Rawit	5.161	5.870	2.624	8.516
Tomat	1.414	1.774	1.458	5.142
Kacang Panjang	-	2.505	1.540	3.351
Kangkung	-	2.500	1.138	3.259
Terung	-	2.201	1.554	2.745

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.5 Luas (Ha) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama di Kabupaten Morowali Tahun 2017-2020

Jenis Tanaman	Tahun (Ha)			
	2017	2018	2019	2020
Bawang Merah	4	2	4	6
Cabe Rawit	138	162	119	216
Tomat	37	47	55	95
Kacang Panjang	-	72	59	107
Kangkung	-	92	67	126
Terung	-	41	52	79

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi

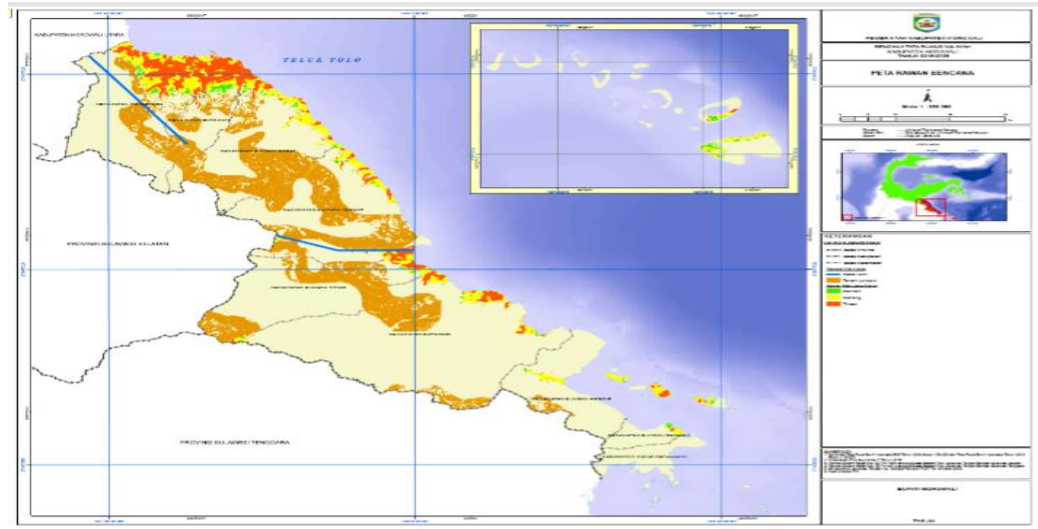
dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Pada Gambar 2.11

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur

- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur



Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan

berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebanyak 121.296 jiwa meningkat sebesar 14,30 persen pada Tahun 2020 menjadi 161.727 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 161.727 jiwa pada Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,92 persen antara Tahun 2010-2018 dan 0,953 persen antara 2010-2020.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk, kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2010-2020

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Persentase Penduduk	
		2010	2019	2020	2010–2018	2010–2020	2010	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menui Kepulauan	12.064	13.609	13.232	1,35	0,991	11,8	8,18
2	Bungku Selatan	17.273	14.831	13.914	-1,68	-0,021	16,90	8,60
3	Bahodopi	6.594	7.754	37.322	1,82	0,811	6,45	23,08
4	Bungku Pesisir	-	4.745	6.625	-	...2	-	4,10
5	Bungku Tengah	27.774	26.193	29.203	-0,65	0,995	27,17	18,12
6	Bungku Timur	-	8.989	12.061	-	...2	-	7,46
7	Bungku Barat	10.093	12.331	14.061	2,25	0,966	9,87	8,69
8	Bumi Raya	11.488	12.952	14.524	1,34	0,976	11,24	8,98
9	Witaponda	16.942	19.892	20.686	1,80	0,980	16,57	12,79
	Morowali	102.228	121.296	161.727	1,92	0,953	100,00	100,00

Sumber Morowali Dalam Angka 2021

Lanjutan Tabel 2.6

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km ²)		Rasio Jenis Kelamin		Laki-laki	Perempuan
		2010	2020	2010	2020	2020	
1	2	10	11	12	13	14	15
1	Menui Kepulauan	53,95	59,17	96,35	100,2	6,623	6,603
2	Bungku Selatan	42,77	34,45	100,94	104,8	7,121	6,793
3	Bahodopi	6,10	34,53	113,67	181,1	24,044	13,278
4	Bungku Pesisir	-	7,64	-	113,8	3,526	3,099
5	Bungku Tengah	38,28	40,34	105,25	114,8	15,661	13,641
6	Bungku Timur	-	31,15		110,2	6,322	5,739
7	Bungku Barat	13,30	18,53	111,50	115,4	7,532	6,529
8	Bumi Raya	22,76	28,77	107,81	109,0	7,576	6,946
9	Witaponda	32,60	39,80	108,59	108,6	10,769	9,917
	Morowali	18,68	29,56	104,91	122,9	89,174	72,553

Sumber Morowali Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Bahodopi sebanyak 37.322 jiwa dengan pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2019 sebesar 1,82 % dan pada tahun 2010-2020 sebesar 0,811% dengan persentase penduduk sebesar 23,08%. Sedangkan Kecamatan paling sedikit penduduknya pada tahun 2020 adalah Kecamatan Bungku Pesisir sebesar 6.625 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2020 sebesar ...2% dengan persentase penduduk sebesar 4,10%.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020, rata - rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 29,56 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan kepadatan penduduk sebanyak 40,34 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 59,17 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 7,64 jiwa per km². Untuk melihat perkembangan penduduk seluruh Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7.

2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Ratio" adalah merupakan profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas dan natalitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi keduanya semakin tinggi. Rasio penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2020 mencapai 122,9% yang artinya mayoritas penduduk Morowali adalah laki-laki. Secara keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Morowali rasio penduduknya di atas 100% dan yang tertinggi adalah Kecamatan Bahodopi dengan rasio 181,1%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.7.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Morowali pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha terutama di lapangan usaha industri pengolahan (pengolahan industri nikel) serta pertambangan & penggalan. Nilai PDRB Morowali tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,20 triliun rupiah. Angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 15,02 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukan selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 14,51 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 12,40 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 mengalami peningkatan oleh adanya peningkatan investasi. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembangunan bandara dan ekspor dari industri pertambangan seperti ekspor Nikel Pig Iron (NPI) dari PT.IMIP,

PT.Transon, dan PT.Weng Xiang. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Amerika Serikat, dan Tiongkok cenderung menurun.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan negative. Dari 15 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,94 persen, Industri Pengolahan 17,33 persen, Konstruksi 13,31 persen, Transportasi dan Pergudangan 14,58 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 7,52 persen, Jasa Perusahaan 8,63 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,89 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,40 persen.

Sedangkan satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Real Estate 2,51 persen, dan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan sebesar 2,85 persen, Pengadaan Listrik dan Gas 1,85 persen, Perdagangan Besar dan Eceran 4,74 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,28 persen, Informasi dan Komunikasi 1,19 persen, Jasa Pendidikan 4,49 persen dan Jasa lainnya 2,10 persen.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Morowali Menurut Lapangan Usaha(persen), 2016—2020

No	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,12	3,59	1,28	1,84	-2,76
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	15,93	15,93	51,25	19,77	34,40
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	27,6	21,90	277,16	24,00	35,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	11,71	14,07	15,25	1,98	4,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	8,23	9,53	5,17	0,17	0,11
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-8,68	6,81	6,27	13,31	-14,62

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	9,92	6,23	5,81	2,90	-4,98
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,29	6,42	3,42	6,47	-28,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	5,43	6,99	-5,26	4,01	-10,48
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,16	9,16	12,87	6,80	7,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	9,81	7,23	5,29	0,17	13,23
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,01	2,76	2,12	0,90	0,15
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,92	9,22	-10,02	4,98	-1,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,04	7,42	2,83	5,05	1,06
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,89	5,60	1,21	3,00	-0,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,89	10,03	6,16	8,35	6,91
R,S ,T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,8	8,19	4,93	2,59	-0,44
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	12,42	14,08	112,2 0	20,20	28,93

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2021

2.1.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan factor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 113,30 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 200,56 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, 2015-2019

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
Tahun/ Year	2015	2016	2017	2018	2019
- ADHB/ at current price	12.818	14.533	17.036	20.507	24.327
- ADHK/ at 2010 Constant Price	10.420	11.714	13.364	15.021	17.200
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	113.303	126.159	145.196	171.910	200.561
- ADHK/ at 2010 Constant Price	92.103	101.688	113.900	125.915	141.800
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	61,50	10,41	12,01	10,55	12,62
Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (Thousand People)	113	115	117	119	121
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)	3,67	1,77	1,74	1,71	1,68

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

2.1.2.1.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 18,63 persen, yakni dari 20.507 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 24.327 miliar Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih kecil, yakni

dari 15.021 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 17.200 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 14,51 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Morowali periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 67,82 persen; 12,42 persen; 14,08 persen; 12,40 persen; dan 14,51 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang selalu tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 12.818 miliar Rupiah (2015); 14.533 miliar Rupiah (2016); 17.036 miliar Rupiah (2017); 20.507 miliar Rupiah (2018); dan 24.327 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Morowali pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.9 dan grafik 2.11 berikut ini:

Tabel 2.9. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali 2015 – 2019 (Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.326	3.640	4.006	4.495	5.034
2. Konsumsi LNPRT	77	86	98	117	138
3. Konsumsi Pemerintah	596	629	701	712	798
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.332	9.639	10.898	11.503	19.844
5. Perubahan Inventori	810	1.477	560	2.430	-148
6. Net Ekspor	-322	-938	773	1.251	-1.340
PDRB	12.818	14.533	17.036	20.507	24.327

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

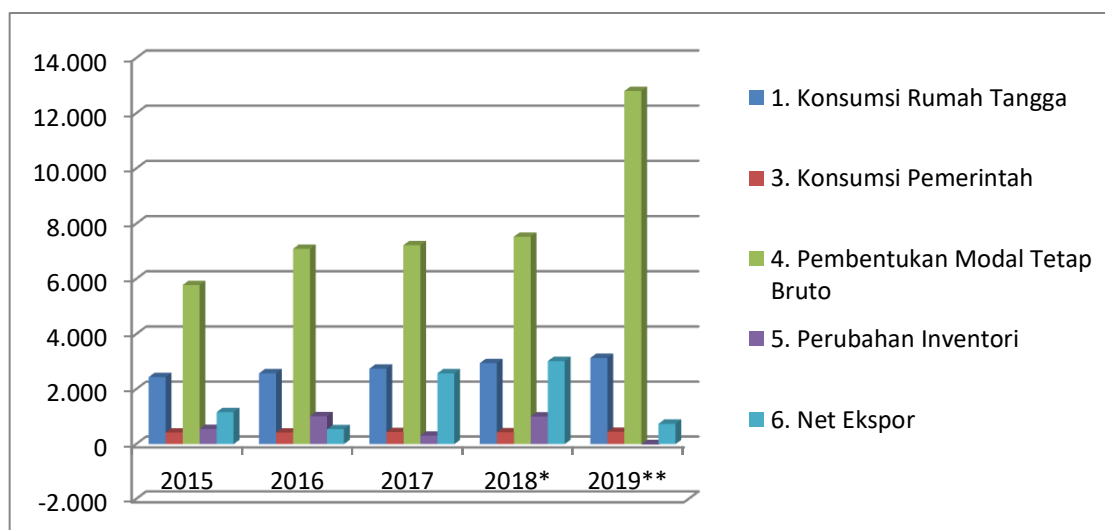
PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun

2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Morowali pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.10 dan gambar grafik 2.11 berikut ini:

Tabel 2.10 PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali 2015 – 2019 (Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.442	2.581	2.748	2.950	3.138
3. Konsumsi Pemerintah	421	421	439	432	447
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.780	7.093	7.224	7.530	12.809
5. Perubahan Inventori	552	1.018	310	1.009	-19
6. Net Ekspor	1.168	542	2.577	3.024	740
PDRB	10.420	11.714	13.364	15.021	17.200

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020



Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

Gambar 2.11. Grafik PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali 2015 – 2019

Dari tabel 2.11, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Morowali meningkat, yakni sebesar 10.420 miliar Rupiah (2015); 11.714

miliar Rupiah (2016); 13.364 miliar Rupiah (2017); 15.021 miliar Rupiah (2018); dan 17.200 miliar Rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2.14 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali cenderung meningkat, yakni dari 12,40 persen pada tahun 2018 menjadi 14,51persen pada tahun 2019.

2.1.2.1.4. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu inidkator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani adalah indeks nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang harus dibayar petani dikalikan dengan 100 %. Adapun Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11. Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Banggai Kepulauan	70,72	70,18	73,55
Banggai	69,4	71,49	66,93
Morowali	60,72	60,8	62,6
Poso	76,84	75,48	72,36
Donggala	60,33	63,82	65,52
Toli-Toli	60,79	66,57	62,25
Buol	64,56	67,02	66,93
Parigi Moutong	67,3	72,05	68,09
Tojo Una-Una	68,97	76,58	78,59
Sigi	67,8	69,1	69
Banggai Laut	62,13	69,3	65,17
Morowali Utara	75,30	75,45	65,65
Kota Palu	66,28	65,82	65,28
Sulawesi Tengah	67,14	69,52	67,59

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dari tabel 2.12 di ketahui Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 yaitu sebesar 67,14 menjadi 69,52 pada Tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 67,59. Sedangkan untuk Kabupaten Morowali berada pada urutan terakhir setelah Kabupaten Toli-Toli dengan Nilai tukar petani tahun 2018 yaitu 60,8 dan tahun 2019 meningkat menjadi 62,6.

Peranan sektor pertanian masih cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Morowali. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Secara agreat sudah mencapai 14,51 %. Dimana pertumbuhan sector pertanian menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2017 mencapai 3,78% menjadi 0,8 % Tahun 2018 kemudian kembali peningkatan menjadi 2,85 % pada Tahun 2019.

Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Morowali berkembang cukup pesat terutama dari pendatang, maka sector pertanian merupakan sector yang penting untuk dikembangkan lebih lagi. Hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan penduduk akan bahan pangan yang tentu mengalami peningkatan yang drastis. Jangan sampai dengan tingginya permintaan akan hasil pertanian di Kabupaten Morowali, justru tidak searah dengan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Hal ini kan membahayakan pembangunan di Kabupaten Morowali sendiri dikarenakan potensi sektor pertanian cukup besar malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.2.2.1. Gini Ratio

Gini Ratio adalah Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Adapun Indeks Gini ratio Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Sulawesi Tengah, 2012-2018

Kabupaten/Kota	Gini Rasio						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Banggai Kepulauan	0,338	0,315	0,301	0,32	0,302	0,338	0,345
Banggai	0,374	0,407	0,317	0,321	0,319	0,302	0,311
Morowali	0,371	0,396	0,363	0,377	0,332	0,304	0,304
Poso	0,331	0,304	0,317	0,382	0,357	0,302	0,300
Donggala	0,329	0,26	0,274	0,312	0,316	0,348	0,326
Tolitoli	0,392	0,337	0,334	0,306	0,375	0,382	0,369
Buol	0,368	0,321	0,336	0,307	0,313	0,329	0,348
Parigi Moutong	0,310	0,300	0,289	0,343	0,31	0,304	0,305
Tojo Una-una	0,341	0,34	0,339	0,338	0,338	0,33	0,313
Sigi	0,337	0,357	0,31	0,33	0,315	0,33	0,303
Banggai Laut	-	-	-	0,308	0,306	0,307	0,307
Morowali Utara	-	-	-	0,337	0,335	0,336	0,314
Kota Palu	0,369	0,41	0,397	0,43	0,363	0,358	0,357
Sulawesi Tengah	0,374	0,389	0,362	0,374	0,362	0,355	0,346

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Tabel 2.14 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pada Tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur

oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,346. Angka ini relatif stagnan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2017 yang sebesar 0,355, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,346, angka tersebut turun sebesar 0,019 poin. dibandingkan dengan Kabupaten lainnya Kabupaten Morowali masih berada pada Tingkat ketimpangan rendah hal ini disebabkan karena Gini ratio Kabupaten Morowali pada Tahun 2016 sebesar 0,332 dan untuk tahun 2017 mencapai 0,304 sedangkan tahun 2018 tetap dengan nilai 0,304. Namun Gini ratio di Kabupaten Morowali di tahun 2018 berada di urutan ketiga setelah kabupaten Poso dan Kabupaten sigi.

2.1.2.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif. Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatannya dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lainnya. Adapun kondisi kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2020

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)				Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Jiwa				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Banigai Kepulauan	317.475	317.475			18,56	18,38	17,54		15,92	15,65	14,84	
Banggai	373.695	373.695			33,5	33,72	29,30		9,20	9,12	7,80	
Morowali	402.292	402.292	428.744	-	16,99	17,03	16,61	16,50	14,55	14,34	13,75	13,43
Poso	449.834	449.834			41,88	41,75	39,92		17,16	16,71	15,65	
Dfonggala	308.212	308.212			54,44	54,28	55,83		18,17	18,03	18,40	
Tolit-toli	299.052	299.052			30,64	31,79	30,79		13,3	13,66	13,09	
Buol	332.163	332.163			25,76	25,39	24,51		16,65	16,08	15,19	
Parigi Moutong	388.440	388.440			82,88	83,66	81,36		17,55	17,41	16,64	
Tojo Una-una	442.186	442.186			27,3	27,78	26,36		18,15	18,27	17,16	
Sigi	316.949	316.949			29,55	29,78	30,82		12,66	12,6	12,91	
Banggai Laut	324.734	324.734			11,63	11,97	11,46		16,17	16,32	15,34	
Morowali Utara	412.942	412.942			19,25	19,4	19,25		15,73	15,53	15,08	
Kota Palu	492.085	492.085			25,49	25,26	26,62		6,74	6,58	6,83	
Sulawesi Tengah	413.785	413.785			417,87	420,21	410,36	398,73	14,14	14,01	13,48	12,92

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 2.14, terjadi kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 402.292 menjadi menjadi Rp. 428.744 pada tahun 2019, yang artinya bahwa apabila pengeluaran dalam satu bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor lainnya.

2.1.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia dengan nilai IPM berkategori 'Sedang'. IPM yang dicapai Sulawesi Tengah Tahun 2020 tercatat sebesar 69,55. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah, Menurut Kabupaten/Kota, 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Banggai Kepulauan	63,45	64,07	64,68	65,13	65,42
Banggai	68,17	69,00	69,85	70,36	70,52
Morowali	69,69	70,41	71,14	72,02	72,21
Poso	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28
Donggala	64,42	64,66	65,14	65,49	65,56
Toli-toli	63,27	64,05	64,60	65,42	65,69
Buol	66,37	66,69	67,30	67,69	67,82
Parigi Moutong	63,60	64,09	64,85	65,47	65,44
Tojo Una-una	62,27	62,61	63,38	64,52	64,59
Sigi	65,95	66,72	67,66	68,16	68,12
Banggai Laut	63,49	64,08	64,80	65,27	65,43
Morowali Utara	66,57	67,35	67,95	68,45	68,36
Kota Palu	79,73	80,24	80,91	81,50	81,47

Sumber: BPS Kabupaten Morowali tahun 2021

Tabel 2.15 menunjukkan nilai pertumbuhan IPM Kabupaten Morowali berada pada urutan ke dua setelah kota palu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2016 dengan nilai 69,69 % sedangkan pada tahun 2020 yaitu mencapai 72,21 % sehingga mengalami perubahan status dari “ Sedang “ menjadi “ Tinggi” . dengan adanya perubahan status ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali.

2.1.2.2.4. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (dapat membaca dan menulis) adalah merupakan refleksi dari partisipasi pendidikan oleh penduduk pada masa lampau. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2020 sebesar 98,89 persen, dan masih terdapat sekitar 1,11 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.15. Angka Melek huruf Penduduk Tahun ke 15 Atas di Kabupaten Morowali Tahun 2020

Jenis Kelamin	Huruf Latin/ Alfabet	Huruf Arab/ Hijaiyah
1	2	3
Laki-laki	98,66	33,1
Perempuan	99,12	32,49
L + P	98,89	32,8

BPS Kabupaten Morowali 2020

2.1.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau Malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus atau wasting, stunting dan berat badan kurang. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur. Adapun persentase balita gizi buruk di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16. Persentase Balita Gizi Buruk

NO	INDIKATOR	Capaian	
		2018	2020
1	2	3	5
1	Persentase balita gizi buruk	0.3	0.09

Terjadi penurunan balita yang mengalami gizi buruk berdasarkan tabel di atas, hal ini disebabkan karena sudah adanya kesadaran masyarakat akan asupan makanan yang dikonsumsi mengandung kualitas gizi yang baik. Walaupun permasalahan ini semakin berkurang, kiranya perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat merumuskan program yang lebih tepat sasaran untuk penanganan masalah tersebut sehingga kedepannya permasalahan ini menjadi tidak ada. Program yang perlu menjadi perhatian terkait masalah ini adalah program urusan pangan, infrastruktur dan urusan kesehatan itu sendiri sehingga bisa berkolaborasi untuk mengatasi gizi buruk.

2.1.2.2.6. Pengangguran

Tingkat Pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Penganggur adalah Tenaga Kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang bekerja kurang dari dua jam pada minggu yang lalu. Tingkat pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Seseorang dikatakan Bekerja bila yang bersangkutan bekerja lebih dari 2 jam pada minggu yang lalu. Rasio Orang yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Morowali yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), 2017 – 2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Banggai Kepulauan	70.72	70.18	73.55	72.97
Banggai	69.4	71.49	66.93	69.79
Morowali	60.72	60.8	62.6	64.7
Poso	76.84	75.48	72.36	74.78
Donggala	60.33	63.82	65.52	63.93
Toli-Toli	60.79	66.57	62.25	65.95
Buol	64.56	67.02	66.93	69.75
Parigi Moutong	67.3	72.05	68.09	72.5
Tojo Una-Una	68.87	76.58	78.59	75.33
Sigi	67.8	69.1	69	69.24
Banggai Laut	62.13	69.3	65,17	67.2
Morowali Utara	75.30	74.45	65.65	69.85
Kota Palu	66.28	65.82	65.28	66.46
Sulawesi Tengah	67.14	69.52	67.59	69.44

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah , 2017 – 2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Banggai kepulauan	3.24	3.57	2.00	2.47
Banggai	2.94	2.95	2.18	2.42
Morowali	2.72	2.80	2.97	5.21
Poso	3.69	2.39	2.18	2.39
Donggala	3.32	2.77	2.76	2.58
Toli-Toli	4.35	3.13	3.10	3.74
Buol	4.40	4.48	4.01	4.36
Parigi Moutong	2.66	2.67	2.36	2.70
Tojo Una-Uno	2.88	3.68	2.92	2.84
Sigi	5.29	3.73	2.54	3.36

Banggai Laut	3.21	3.28	3.04	3.09
Morowali Utara	2.00	2.13	3.05	5.16
Kota Palu	6.56	5.73	6.32	8.36
Sulawesi Tengah	3.81	3.37	3.11	3.77

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel 2.18 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19. APM dan APK Berdasarkan Jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan	Capaian			
	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI/Paket A	94,79	94,72	...	108,95
SMP/MTs/Paket B	72,73	73,49	...	103,84
SMA/SMK/MA/Paket B	67,59	67,54	...	81,03

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2020

APM dan APK Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, capaian tersebut harus terus di jaga untuk menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat kabupaten morowali. Permasalahan lain adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Khusus pada wilayah kepulauan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan guru serta keterjangkauan dan aksesibilitas murid bersekolah. Pada beberapa wilayah kecamatan khususnya kepulauan masih banyak terdapat gedung sekolah dengan kondisi belum layak dalam menjalankan proses belajar mengajar serta belum memadainya sarana prasarana seperti buku dan peralatan mengajar, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

2.1.3.1.1.2. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20. Angka Putus Sekolah (APS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bidang Urusan/Indikator	Capaian	
	2019	2020
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00	0,00
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,34	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, hal ini di sebabkan karena beberapa faktor yaitu masih adanya budaya lokal yang berpemahaman bahwa anak memiliki kewajiban membantu orang tua mencari nafkah sehingga banyak anak yang berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja padahal program pendidikan gratis telah menyentuh jenjang pendidikan SMA. Hal ini menjadi masukan untuk pemerintah provinsi dikarenakan kewenangan pendidikan SMA sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi.

2.1.3.1.1.3. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka kelulusan sekolah SD menunjukkan persentase anak yang lulus sekolah yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka kelulusan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21. Angka Kelulusan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bidang Urusan/Indikator	Capaian	
	2019	2020
Angka Kelulusan SD/MI	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTS	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2020

2.1.3.1.1.4. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan yang kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya, misalnya tingkat kelulusan sekolah SD yang kemudian melanjutkan kejenjang sekolah SMP yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka melanjutkan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22. Angka Melanjutkan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Indikator	Capaian	
	2019	2020
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian, bahwa semua anak yang lulus sekolah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Maka program yang pendidikan yang telah berjalan selama ini harus di pertahankan bahkan di tingkatkan.

2.1.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

A. Persentase Balita Stunting

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau

tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak factor seperti kondisi social ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting dimasa yang akan datang mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Persentase balita stunting di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23. Presentase Balita Stunting Kabupaten Morowali
Pada Tahun (2019 -2020)

INDIKATOR	2019		2020	
	Total Balita Stunting	persentase stunting	Total Balita Stunting	persentase stunting
Angka Stunting	1042	12,0	849	7,8

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

C. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014), sedangkan Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 1 tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu bangsa. Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24. Angka Kematian Ibu Bayi Kabupaten Morowali,
Pada Tahun (2019 – 2020)

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.87	0.013
Angka Kelangsungan hidup bayi	0.28	0.35
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran bayi	0.71	0.5
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	13.43	11.96
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	79.72	0.003

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan adanya trend peningkatan dalam mengatasi kematian ibu dan bayi. Hal tersebut harus di pertahankan sehingga tidak terjadi kematian ibu dan bayi di karenakan pelayanan kesehatan yang kurang optimal, mengingat urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus di lakukan oleh pemerintah yang mana masyarakat memiliki hak atas setiap pelayanan kesehatan.

D. Rasio Prasarana Kesehatan

Rasio prasarana kesehatan yang dimaksud dalam indikator ini adalah Rasio posyandu per satuan balita, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk, Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk. Adapun penjelasan masing-masing indicator tersebut adalah sebagai berikut :

1) Rasio posyandu per satuan balita;

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Data Rasio posyandu per satuan balita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25. Data Rasio Posyandu Per Satuan Balita

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Rasio posyandu per satuan balita	15,7	15,7

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

Selama kurun waktu 2019-2020 terjadi tren peningkatan, ini berarti jumlah posyandu semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap balita.

2) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Data rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26. Data Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	0.08	0.08

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

3) Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk;

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data rasio rumah sakit persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27. Rasio Rumah Sakit Penduduk

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	0.02	0.02

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua rumah sakit, dengan jumlah penduduk morowali 119.292 berarti satu rumah sakit melayani 59.646 penduduk. Jika melihat ideal rasio pelayanan penduduk, maka perlu adanya penambahan sarana prasarana, baik itu dari kamar pasien maupun peningkatan manajemen pelayanan sehingga bisa sejalan dengan standar pelayanan kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk melihat sejauh mana rumah sakit di gunakan oleh masyarakat, dan sejauh mana masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap.

E. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.28. Rasio Dokter Per satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	0.32	0.32

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00026 pada tahun 2019 dan tetap sama pada tahun 2020 sehingga dapat diartikan bahwa 1 dokter melayani 3.125 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali masih membutuhkan ketersediaan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Tetapi jika di bandingkan dengan standar kementrian kesehatan yaitu 26 dokter per 100.000 penduduk maka jumlah dokter tersebut sudah ideal hanya saja penyebarannya yang belum merata.

F. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1000 pddk)

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk

Tabel 2.29. Data Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1000 pddk)	6.23	6.18

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00623 pada tahun 2019 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 159 penduduk. Ini kemudian menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu 0,00618 bahwa 1 tenaga paramedis melayani 161 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi penurunan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah.

G. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED,

Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Pada prinsipnya, semua indikator pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan ibu dan bayi terjadi tren positif di Kabupaten Morowali. Adapun data cakupan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.30. Data Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2021

Adapun yang terkait dengan indikator cakupan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31. Cakupan Indikator Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan kompetensi kebidanan	100	100
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94.48	96.28
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	100	100
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
Penderita diare yang ditangani	2.525	2802
Angka Kejadian Malaria	0.26	0.13
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100
Cakupan kunjungan bayi	100	100
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	100	100
Cakupan pembantu puskesmas	25.65	25.65
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 9rasio kunjungan K4)	83.07	94
Cakupan pelayanan anak balita	65.61	56

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

2.1.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Infrastruktur Jalan

Indikator Infrastruktur jalan yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Terkait dengan ketiga indikator tersebut kondisinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.32. Data Capaian Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik
Pada Tahun (2019 – 2020)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	19.16	31.45
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.008	0.006
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	32,6	34,6

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi peningkatan yang signifikan untuk jaringan jalan dalam kondisi baik, tetapi terjadi penurunan pada rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi penduduk di kabupaten morowali sehingga perlu menjadi pertimbangan terkait populasi penduduk. Meskipun begitu program pembangunan jalan terus mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kelancaran aktivitas ekonomi.

B. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang mempunyai akses layanan sanitasi, sekurang-kurangnya memiliki fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Adapun persentase rumah tinggal bersanitasi pada Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33. Data Capaian Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Pada Tahun (2019 – 2020)

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Persentase rumah tinggal bersanitasi	74,58	75,13

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi peningkatan rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2019-2020, hal ini harus terus ditingkatkan mengingat angka tersebut masih jauh dari kondisi ideal khususnya di wilayah kepulauan. Sanitasi merupakan indikator wajib atau dengan kata lain menjadi standar pelayanan minimal pemerintah daerah sehingga wajib untuk di laksanakan dan di tingkatkan kinerjanya karena dengan membaiknya sanitasi maka secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian atau kondisi angka kemiskinan masyarakat.

C. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang mempunyai layanan air bersih. Bentuk penyediaan air bersih selain pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan pemasangan pompa dan pembangunan sumur yang mana sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.34. Data Capaian Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Pada Tahun (2019 – 2020)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Proporsi rumah tangga pengguna air bersih (%)	45.47	44.66

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Terjadi penurunan rumah tangga pengguna air bersih sebesar 0,81 persen, maksudnya adalah adanya rumah tangga yang belum tersentuh layanan air bersih atau terbatasnya akses untuk menggunakan air bersih. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah kepulauan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di karenakan kondisi topografi kepulauan, sehingga program air bersih di wilayah kepulauan tersebut harus tepat penanganannya dan terus mengevaluasi program-program yang sudah berjalan. Hal ini harus terus di tingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi indikator kinerja wajib oleh pemerintah daerah.

D. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan

saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35. Data Capaian Rasio Jaringan Irigasi, Pada Tahun (2018 – 2019)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio Jaringan Irigasi	33,5	42,4

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat di ketahui bahwa masih besarnya kebutuhan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan lahan budidaya. Hal ini juga dapat dilihat dari produktivitas pertanian yang masih rendah, sehingga untuk meningkatkan produktivitas tersebut maka perlu adanya peningkatan jaringan irigasi untuk mencapai target produktivitas pertanian.

2.1.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman

A. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah atau tempat tinggal yang layak untuk dijadikan hunian dari sisi atap,lantai dan dinding bagi penduduk kategori rumah tangga miskin. Layak atau tidak layaknya suatu tempat tinggal dinilai berdasarkan perhitungan teknis dan peninjauan lapangan. Semua data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif sampai mencapai rumusan kesepakatan untuk menilai layak atau tidak layak rumah tersebut untuk dijadikan hunian atau tempat tinggal. Rumah layak huni di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36. Data Rumah Layak Huni (%)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Rumah Layak Huni (%)	776	1.020

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan capaian rumah layak huni dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ini disebabkan karena adanya program unggulan pemerintah daerah untuk pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. Sehingga indikator program kegiatan ini masih butuh perhatian yang sangat tinggi guna mengejar target RPJMD tersebut dan di sisi lain indikator ini merupakan program pendukung dalam pengentasan kemiskinan. Program ini kategori berhasil, karena dengan adanya program ini maka pengentasan kemiskinan

dari bidang infrastruktur dapat di atasi secara perlahan berdasarkan data angka kemiskinan. Program ini akan terus berlanjut khususnya di wilayah kepulauan.

B. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar saat ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi kabupaten morowali saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik, sehingga saat ini pemerintah daerah terus menggenjot untuk memberikan pelayanan listrik kepada daerah-daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan tren penggunaan listrik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Pada tahun (2019 – 2020)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	93	94

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

2.1.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan bidang sosial dapat dilihat dari data kemiskinan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.38. Persentase Penduduk Miskin Pada Tahun Pada Tahun (2019 – 2020)

Indikator	Tahun	
	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin	13.75	13.43
Rasio Kesenjangan Kemiskinan/Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.5	0.67

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Morowali 2020

Berdasarkan pada tabel diatas, terjadi penurunan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dimana pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13.43persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2019 yang sebesar 17,03 ribu orang (13.75 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, namun pada sektor perikanan di wilayah kepulauan program kegiatannya belum terlaksana dengan baik.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.39. Jumlah Angkatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun (2018 – 2019)

Indikator	Tahun	
	2018	2019
Jumlah Angkatan Kerja	16,123	89,218
Tingkat Pengangguran terbuka	15,529	3,006

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali 2020

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel di atas Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a) Analisis Indikator SKPG

➤ Aspek Ketersediaan Pangan

Tabel 2.40. Aspek Ketersediaan Pangan

No.	KECAMATAN	Rasio Ketersediaan (r)	Skor_Pertanian
1	Menui Kepulauan	0.53	3
2	Bungku Selatan	16.33	1
3	Bahodopi	0.21	3
4	Bungku Pesisir	1.08	2
5	Bungku Tengah	0.58	3
6	Bungku Timur	2.48	1
7	Bungku Barat	3.09	1

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali (Di Olah)

Ket :

	Aman
	Rawan
	Waspada

b) Aspek Akses Pangan Tahunan

➤ Data Keluarga Miskin

Tabel 2.41. Data Keluarga Miskin

No	KECAMATAN	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Pra dan sejahtera I (Total)	% Pra dan Sejahtera I (r)	Skor_Miskin
1	Menui Kepulauan	4,122	3,048	-	3,048	74	3
2	Bungku Selatan	4,202	3,082	-	3,082	73	3
3	Bahodopi	14,529	1,232	-	1,232	8	1
4	Bungku Pesisir	1,897	1,030	-	1,030	54	3
5	Bungku Tengah	8,967	2,557	-	2,557	29	2
6	Bungku Timur	3,639	1,120	-	1,120	31	2
7	Bungku Barat	4,315	1,815	-	1,815	42	3
8	Bumi Raya	4,551	1,905	-	1,905	42	3
9	Wita Ponda	6,309	1,729	-	1,729	27	2
10	MOROWALI	52,531	17,518	-	17,518	33	2

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali (Di Olah)

Ket : ■ Aman
■ Rawan
■ Waspada

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

➤ Data Status Gizi

Tabel 2.42. Data Status Gizi Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali

No	KECAMATAN	Total KEP	% KEP (r)	Skor KEP
1	Menui Kepulauan	4	1.01	1
2	Bungku Selatan	53	20.23	3
3	Bahodopi	14	2.88	1
4	Bungku Pesisir	13	6.10	1
5	Bungku Tengah	8	2.34	1
6	Bungku Timur	1	0.42	1
7	Bungku Barat	3	2.78	1
8	Bumi Raya	13	4.81	1
9	Wita Ponda	5	2.54	1
	MOROWALI	114	4.54	1

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Ket : ■ Aman
■ Rawan
■ Waspada

- d) Indek Komposit
- Situasi Pangan dan Gizi

Tabel 2.43. Data Situasi Pangan Dan Gizi

No	KECAMATAN	S_Pertanian	S_Pra dan Sejahtera I	S_KEP	Skor_Komposit	Indeks Komposit Tahunan (IKT)
1	Menui Kepulauan	3	3	1	7	3
2	Bungku Selatan	1	3	3	7	3
3	Bahodopi	3	1	1	5	3
4	Bungku Pesisir	2	3	1	6	3
5	Bungku Tengah	3	2	1	6	3
6	Bungku Timur	1	2	1	4	1
7	Bungku Barat	1	3	1	5	3
8	Bumi Raya	1	3	1	5	3
9	Wita Ponda	1	2	1	4	1
10	MOROWALI	1	2	1	4	1

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Ket : ■ Aman
■ Rawan
■ Waspada

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.44. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Indikator	Tahun	
	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.9	0.93

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020(Di Olah)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.45. Capaian Indikator Bidang Kinerja Bidang Perhubungan

Indikator	CAPAIAN	
	2019	2020
Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)	17000	17000
Jumlah kapal berangkat	300	300
Jumlah penumpang turun	9000	5000
Jumlah Penumpang naik	8000	6000
Jumlah barang bongkar (ton)	200000	15000
Jumlah barang muat (ton)	400000	35000
Rasio Ijin Trayek	17	17
Jumlah uji kir angkutan umum	-	150
Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis	3	1

Persentase layanan angkutan darat	33.5	35
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	150
Pemasangan rambu-rambu	350	-
Rasio panjang jalan per jumlah kendarann	4.97	4,7
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6521	6000
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	17000	17000

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali tahun 2020

4. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

A. Data Tower

Tabel 2.46. Data Tower Kabupaten Morowali

NO	SITEID	SITE NAME	KOTA_KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS JARINGAN		
						2G	3G	4G
1	COI097	COMBAT MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	-	Ya
2	LWK038	IPI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	IPI	Ya	Ya	Ya
3	MRW002	BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	Ya	Ya	Ya
4	MRW003	BAHONSUAI	MOROWALI	BUMI RAYA	PARILANGKE	Ya	Ya	Ya
5	MRW006	LAANTULA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	LANTULA JAYA	Ya	Ya	Ya
6	MRW008	WOSU	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	Ya	Ya	Ya
7	MRW016	BAHODOPI	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
8	MRW017	BUMI RAYA	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBATAE	Ya	Ya	Ya
9	MRW019	UNGKAYA	MOROWALI	WITA PONDA	UNGKAYA	Ya	Ya	Ya
10	MRW022	KANTOR BUPATI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
11	MRW023	LIMBO MAKMUR	MOROWALI	BUMI RAYA	LIMBO MAKMUR	Ya	Ya	Ya
12	MRW024	BENTE	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
13	MRW025	KEPULAUAN MENUI	MOROWALI	MENUI KEPULAUAN	ULUNAMBO	Ya	-	-
14	MRW028	DMT ATANANGA	MOROWALI	BUMI RAYA	SAMARENDA	Ya	-	Ya
15	MRW033	TBG LANONA	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	LANONA	Ya	Ya	Ya
16	MRW034	TBG MATANSALAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MATANSALA	Ya	Ya	Ya
17	MRW035	TBG TOPUTI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	TOFUTI	Ya	Ya	Ya
18	MRW044	DMT BAHOMOLEO	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOLEO	Ya	Ya	Ya
19	MRW120	TBG BUNGKU TIMUR	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	KAPALA	Ya	-	
20	MRW045	DMT BAHOMETEFE	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMOTEFE	Ya	Ya	Ya
21	MRW046	DMT FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
22	MRW117	TBG FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
23	MRW051	TBG BAHOMAKMUR	MOROWALI	BAHODOPI	BAHOMAKMUR	Ya	Ya	Ya
24	MRW052	TBG LEULEA	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	
25	MRW058	TBG SALONSA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	SOLONSA JAYA	Ya	-	
26	MRW059	TBG TOFOGARO	MOROWALI	BUNGKU BARAT	TOFOGARO	Ya	Ya	Ya
27	MRW060	TBG KALEROANG	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	KALEROANG	Ya	-	
28	MRW072	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
29	MRW076	BDM MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
30	MRW077	TBG ARTHABUMI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	LAROENAI	Ya	Ya	Ya
31	MRW078	BDM MOROWALI 2	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
32	MRW083	API BUNGKU TENGAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
33	MRW084	BDM BROLY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
34	MRW086	MCR PASAR BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BUNGI	Ya	Ya	Ya
35	MRW087	DMT UMBELE	MOROWALI	BUMI RAYA	UMBELE	Ya	Ya	Ya
36	MRW088	DMT BAHOMOHONI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
37	MRW089	WANXIANG IMIP	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMOTEFE	Ya	Ya	Ya
38	MRW092	FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
39	MRW093	IMIP RUSUNAWA	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya

		APARTEMENT						
40	MRW098	BDM MESS LIME STONE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
41	MRW099	BDM MESS BLOK M	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
42	MRW114	EBT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
43	MRW100	BO DMT ISAT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
44	MRW106	IMIP BDM MESS 2 A	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
45	MRW107	IMIP GUEST HOUSE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
46	MRW130	BDM WORKSHOP KM6	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
47	MRW131	BDM OFFICE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
48	MRW094	DMT BETE-BETE	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	BETE-BETE	Ya	-	
49	MRW095	DMT TANGOFA	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	TANGOFA	Ya	-	

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020 (Di Olah)

➤ Jaringan Telekomunikasi Untuk Kabupaten Morowali

2.47. Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali

No	Lokasi	Status Sinyal Komunikasi				Ket.
		4G	3G	2G	No Signal	
1	Kec. Bungku Tengah	1	15	1	2	
2	Kec. Bungku Timur	0	5	0	5	
3	Kec. Bahodopi	0	7	2	2	
4	Kec. Bungku Pesisir	1	4	2	2	
5	Kec. Bungku Selatan	0	2	4	20	
6	Kec. Menui Kepulauan	0	3	3	18	Signal untuk desa Dongkalan berasal dari desa Molore, Provinsi SulTra
7	Kec. Bungku Barat	0	10	0	0	
8	Kec. Bumi Raya	0	13	0	0	
9	Kec. Witaponda	0	9	0	0	

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020 (Di Olah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan perhatian dalam pembangunan Morowali mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Morowali. Sedangkan Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari usaha persaingan yang tidak sehat. Secara umum ada tiga aspek untuk melihat UMKM yaitu dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Adapun kondisi koperasi dan UKM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48. Data Jumlah Koperasi Aktif (2019 – 2020)

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif	36	91
Jumlah Seluruh Koperasi	116	142
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)	87	95
Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM Aktif)	41	33
Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil)	3500	4434

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2020

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan protein hewani dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel 2.49. Produksi Kebutuhan Protein Hewani Kabupaten Morowali, Tahun (2019 – 2020)

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Produksi perikanan tangkap (ton)	3,4126.6	32,203
Produksi perikanan budi daya	65.91	
Produksi rumput laut	545.58	

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Tahun 2020

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan jika terdapat potensi objek pariwisata dan cara untuk mempromosikan objek wisata tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dapat dilihat dari dua indikator sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Objek Wisata

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Jumlah kunjungan wisatawan	4972	5006
Objek wisata	31	31

Sumber data: Dinas Dispora Kabupaten Morowali Tahun 2020

Program pengembangan destinasi pariwisata merupakan upaya menata kawasan/obyek wisata, serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (tourist arrival). Program Pengembangan pemasaran pariwisata dimaksudkan untuk lebih mengenalkan, memberikan informasi dan promosi pariwisata di Morowali kepada pasar wisata potensial baik regional maupun nasional bahkan internasional. Saat ini pemerintah Kabupaten Morowali dalam upaya pengembangan pariwisata dalam bidang infrastruktur sehingga dengan infrastruktur pariwisata yang memadai maka akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Morowali yang secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap perekonomian daerah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Morowali. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaissans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Dua indikator untuk melihat capaian kinerja pada urusan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.51. Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (TON) Kabupaten Morowali Tahun (2018 – 2019)

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2018					2019				
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luxas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
PADI SAWAH + PADI LADANG	12,146.50	10,695.50	2.00	4.873	52,119.17	9,880.30	11,264.30	252.50	4.873	54,890.93
PADI SAWAH	11,891.50	10,458.50	2.00	4.89	51,131.61	9,743.30	11,129.30	250.50	4.89	54,411.15
PADI LADANG	255.00	237.00	-	2.44	578.99	137.00	135.00	2.00	2.44	329.81
JAGUNG	628.00	1,530.4	4.00	3.695	5,654.83	1,347.30	1,179.7	3.00	3.695	4,358.99
KEDELAI	1,978.20	1,543.70	514.50	1.326	2,046.95	56.00	61.00	1.00	1.33	80.89
KACANG TANAH	54.00	51.50	1.00	1.259	64.84	49.50	52.50	1.00	1.26	66.10
UBI KAYU	127.00	160.00	6.00	26.669	4,267.04	133.00	144.00	-	26.669	3,840.34
UBI JALAR	40.50	46.50	1.00	13.027	605.76	41.00	38.50	-	13.027	501.54
KACANG HIJAU	136.80	137.80	-	0.802	110.52	58.00	61.00	-	0.802	48.92
TALAS	22.00	35.00	-	-	-	17.50	19.50	-	-	-

Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Tahun 2020

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,9	-4,98
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	2.08	

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2020

Sektor perdagangan memberikan andil yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri pada PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53. Indikator Capaian Kinerja Bidang Perindustrian

INDIKATOR	Capaian	
	2019	2020
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (HK 2000)	19,77	34,40
Pertumbuhan Industri (HK 2000)	652	769
Pertumbuhan IKM	-18	98

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020(Di Olah)

Terjadi penurunan PDRB di sektor perindustrian sebesar 2,05 persen. Meskipun terjadi penurunan, tetapi sektor industri masih menjadi sektor yang paling tinggi dalam berkontribusi pada PDRB hal ini dikarenakan adanya aktifitas pertambangan sebagai kategori dari industri pengolahan besar. Peningkatan ini kemudian yang tidak diikuti oleh industri kecil atau industri rumah tangga sehingga terjadi ketimpangan antara level industri sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengkoneksikan industri kecil dengan kawasan perindustrian. Terjadinya koneksi antara industri kecil dengan kawasan perindustrian diharapkan dapat menunjang PDRB sektor industri dan mengurangi gap antara industri besar dan kecil.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun 2020 bahwa target kinerja dan penganggaran yang ditetapkan pada penetapan RKPD mengalami pergeseran dan pengurangan, hal ini disebabkan adanya instruksi Pemerintah Pusat yang tertuang melalui Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meminta Pemda untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran belanja dalam rangka penanganan wabah Pandemi covid- 19. Hal ini terjadi setelah mewabahnya Pandemi covid-19 secara global pada awal Januari 2020 yang juga mewabah di Indonesia. Pergeseran dan pengurangan target indikator kinerja dan penganggaran Kabupaten Morowali tahun 2020 telah disesuaikan dalam perubahan atas Peraturan Bupati Morowali nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2020.

Secara umum hasil evaluasi program kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun 2020 mencapai target sesuai dengan target yang ditetapkan. Antara lain :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja capaian program RKPD urusan pendidikan untuk realisasi keuangan rata-rata mencapai 100% yaitu : Program pendidikan usia dini mencapai target 100%, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mencapai target 100%, Program Pendidikan Non Formal mencapai target 100%, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencapai 100%.

Sementara capaian kinerja berdasarkan indikator dapat bidang pendidikan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.54. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Angka Partisipasi Murni		
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	93	94,5
Angka partisipasi kasar		
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	111,56	111,56
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B	92,09	92,09
Angka Putus Sekolah:		
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,01
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts	0	0
Angka Kelulusan:		
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	100	100
Angka Melanjutkan (AM):		
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	97,05	97,47
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	100
Fasilitas Pendidikan		
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	148	148
Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MK kondisi bangunan baik	47	47
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,120139	0,120139
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SLP	0,159722	0,159722
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SLA	0,179861	0,179861

Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	01:24	01:24
Rasio guru terhadap murid pendidikan SLP	01:20	01:20
Rasio guru terhadap murid pendidikan SLA	01:21	01:21

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Tahun 2020

2. Kesehatan

Capaian kinerja Program dan keuangan kesehatan rata-rata mencapai 99 % yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 100%, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 %. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 98%, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, 99%.

Sementara capaian kinerja berdasarkan indikator dapat bidang Kesehatan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.55. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0,87	0,87
Angka kelangsungan hidup bayi	0,28	0,28
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,61	0,51
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	13,43	11,96
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	39,46	
Rasio posyandu per satuan balita	15,79	15,79
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	0,07	0,07
Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	0,02	0,02
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	0,32	0,31
Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000 pddk)	6,23	6,18
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	23,57	21,21
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	42,16	48,49
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,48	96,48
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	9	8
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,08	0,08
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
Penderita diare yang ditangani	2272	2045
Angka kejadian Malaria	65	60
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100
Cakupan kunjungan bayi	14	16
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	100	100

Cakupan pembantu puskesmas	25,56	25,56
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (rasio kunjungan K4)	83,9	84,74
Cakupan pelayanan anak balita	72,17	79,39

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat capaian Keuangan Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan RKPD tahun 2020 mencapai 99%, yaitu : Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 100%, Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 100%, Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100%, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 100%.

Sementara capaian kinerja berdasarkan indikator dapat bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.56. Indikator Capaian Kinerja Bidang Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Pekerjaan Umum		
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	34	36
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0	0
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	32,6	34,6
Persentase rumah tinggal bersanitasi	74,58	75,13
Rasio Jaringan Irigasi	33,5	42,4
Persentase penduduk berakses air minum	0,0051	0,0063
Penataan Ruang		
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	31,5	31,5

Sumber data : Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kab.Morowali

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tingkat capaian Keuangan Program kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sangat tinggi, Program Pengembangan Perumahan 100%, Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 100%, Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri dari indikator antara lain: 100%.

Sementara capaian kinerja berdasarkan indikator dapat bidang Perumahan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.57. Data Capaian Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Pengguna Listrik Pada Tahun (2019 – 2020)

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	91	92
Rumah tangga miskin pengguna listrik (%)	-	-
Rumah layak huni (%)	19	20

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Morowali Tahun 2020

5. Sosial

Kinerja Keuangan Program Kegiatan mencapai 100, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 100%, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 100%.

Capaian RKPD bidang social tercapai 100% disebabkan oleh bantuan sosial adalah salah satu pengangguran penanganan covid -19 dan capaian target pendapatan RKPD.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Capaian Kinerja urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali berhasil, namun berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terbuka meningkat dari tahun 2019 sebesar dan meningkat menjadi Pada tahun 2020. Namun hal ini disebabkan banyaknya penduduk pencari dari luar daerah Kabupaten Morowali yang masuk mengambil domidili sehingga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Morowali.

Capaian kinerja berdasarkan indikator urusan ketenaga kerjaan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.58. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun, Jumlah Pengangguran dan Rasio Penduduk Yang Bekerja Di Kabupaten Morowali Tahun 2019 - 2020

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	29	28
Tingkat pengangguran terbuka	2,5	2,3
Jumlah pengangguran	1,227	1,231
Rasio penduduk yang bekerja	97,2	97,2

2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja RKPD urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil evaluasi 99%, program yang dijalankan antara lain: Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 100%, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan 96%.

Capaian kinerja berdasarkan indikator urusan ketenaga kerjaan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.59. Indikator Capaian Koperasi, Usaha dan Menengah

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Persentase koperasi aktif	31,03	64,08
Jumlah koperasi aktif	36	91
Jumlah seluruh koperasi	116	142
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	3,201	3,201
Jumlah BPR/LKM	15	15
Jumlah usaha mikro dan kecil	690	690

Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali

3. Perhubungan

Capaian kinerja berdasarkan indikator urusan Perhubungan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.60. Indikator capaian Kinerja Bidang Perhubungan

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Perhubungan		
Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)		
Jumlah kapal berangkat	371	371
Jumlah penumpang turun	8,726	8,891
Jumlah penumpang naik	8,578	8,74
Jumlah barang bongkar (ton)	200,751	204,545
Jumlah barang muat (ton)	447,724	456,186
Rasio Ijin Trayek	21	22
Jumlah uji kir angkutan umum	650	650
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3
Pemasangan rambu-rambu	310	310

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Tahun 2020

C. Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Capaian RKPD urusan kelautan dan perikanan mencapai yaitu 98%, program yang dijalankan terdiri dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan 100%, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, 116%, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, 100%, Program Pengembangan Kawasan Budidaya 48 %.

Capaian kinerja berdasarkan indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.61. Indikator Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Kelautan dan Perikanan		
Produksi perikanan (ton)		
Produksi perikanan laut	27,732	30,505
Produksi perikanan darat	5,139	5,653
Konsumsi ikan	50	51
Cakupan bina kelompok nelayan	40	40
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	48,42	48,42
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	46	46
Nilai tukar nelayan	103	103

Sumber data: Dinas perikanan Kab. Morowali Tahun 2020

2. Pertanian dan Peternakan

Capaian RKPD bidang pertanian sebagai berikut : Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 62%, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 100%, Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 100%.

Tingginya capaian kinerja pertanian disebabkan oleh program yang dijalankan merupakan misi yang menjadi prioritas pemerintah daerah dan realisasi pendapatan RKPD tercapai serta dukungan dan alokasi kusus dari pemerintah pusat yang teralokasikan.

Capaian kinerja berdasarkan indikator urusan Pertanian dan peternakan Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.62. Capaian Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Pada Tahun (2019 – 2020)

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3,5	3,5
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,8	2,8
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	5,9	5,9
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		
Padi	4,9	4,9
Jagung	4,5	4,5
Kedelai	1,2	1,2

Sumber data: Dinas Pertanian Kab.upaten Morowali Tahun 2020

3. Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata

Capaian kinerja berdasarkan indikator urusan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Morowali dapat dikategorikan berhasil meningkatkan capaian, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.63. Data Capaian Prestasi Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Morowali (2019 – 2020)

Indikator	Capaian	
	2019	2020
1	2	3
Kepemudaan dan Olah Raga		
Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	6	6
Jumlah prestasi olahraga		
- Emas	8	8
- Perak	7	7
- Perunggu	6	6
Jumlah organisasi olah raga	11	11
Jumlah kegiatan kepemudaaan	6	6
Jumlah kegiatan olah raga	6	6
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)		
Lapangan olah raga	4	4
Pariwisata		
Kunjungan Wisata	42,708	48,773

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2021 (Di Olah)

Dari hasil evaluasi diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan bidang urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 menunjukan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali yang sangat baik.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Morowali.

Berkaitan dengan hal tersebut gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.64
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Kode	Urusan	Permasalahan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.01	PENDIDIKAN	• Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 121,33, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 105,13 jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 103,50 • Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 94,79,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 72,73. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 67,59. Hal ini menjelaskan penyelenggaraan wajib pendidikan 9 tahun belum berhasil dengan baik. • Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2019 untuk Tingkat SD/MI sebesar 98,73,. Tingkat SMP/MT sebesar 94,20 di bawah target; • Angka Putus Sekolah tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,45

Kode	Urusan	Permasalahan
		relatif kecil,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 3,65. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK relative besar yaitu sebesar 10,34; • Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:99,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:189. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 1:231; • Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2019 telah mencapai 70 persen diperlukan usaha dan kerja keras pemerintah untuk mendorong kinerja kelulusan yang tinggi di tingkat SMA melalui koordinasi pada pemerintah provinsi yang memeliki kewenangan pendidikan Menengah. • Di Kabupaten Morowali, Rasio guru/murid per kelas tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:14,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:12. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 1:19.
1.02	KESEHATAN	• Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 93,5 persen di Tahun 2017 lebih rendah dari target 100 persen; • Angka Kematian Bayi pada Tahun 2019 mencapai 0,013 yang bermakna setiap 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia sebelum usia 1 Tahun. • Hingga Tahun 2019 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup mengalami penurunan menjadi 0,70. • Hingga Tahun 2017, angka kematian neonatal mencapai 0,81 atau 1 balita kurang dari setahun yang meninggal. Pada Tahun 2019 meningkat sangat signifikan menjadi 10,05. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali di sisi ibu hamil sampai ke wilayah terpendek, proses kelahiran dan pasca kelahiran • Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2017 mencapai 161 jiwa meningkat meningkat dari 92 jiwa per

Kode	Urusan	Permasalahan
		100.000 kelahiran hidup di Tahun 2014, Tahun 2019 angka kematian ibu adalah 0, yang artinya tidak ada kasus kematian Ibu di Kabupaten Morowali. • Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali lebih tinggi dari UHH Sulawesi Tengah tetapi lebih rendah dari UHH nasional yang pada 2017 masing-masing mencapai 68,07 tahun, 67,32 tahun dan 71,06 tahun; 68,45 dan tahun 2019 meningkat menjadi 68,77. • Walaupun persentase kasus balita gizi buruk menurun dari 36 kasus pada Tahun 2013 menjadi 9 kasus di Tahun 2017, kasus bayi gizi buruk berada pada kisaran 7-9 kasus hingga Tahun 2019, masalah ini masih menjadi ancaman bidang kesehatan di Kabupaten Morowali; • Rasio dokter Tahun 2019 sudah mencapai sebesar 0,60 atau 60, walaupun rasio dokter telah melampaui rasio ideal yakni 32 dokter per 100.000 penduduk (rasio ideal Kemenkes 26 dokter per 100.000 penduduk), namun penyebarannya belum merata masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten; • Persalinan ibu hamil belum mencapai rasio persalinan oleh tenaga kesehatan yakni 88 persen; • Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan dari 80,30 persen di Tahun 2014 menjadi 12,59 persen di Tahun 2016; • Setiap puskesmas pembantu melayani 28 desa pada Tahun 2015 menjadi 26 desa tahun 2019. Jumlah desa sebanyak 133 desa cakupan Pustu juga tetap dengan 26,32. Rasio ini semakin baik namun, karena dua kecamatan di kepulauan yakni Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, maka daya jangkau pustu menjadi terbatas; • Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen bumil karena tidak melakukan kunjungan bumil K4 • Covid 19
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	• Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2019 sebesar 13,30 persen

Kode	Urusan	Permasalahan
		- Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Dari 30,64 persen Tahun 2015 menurun menjadi 17,60 persen pada tahun 2019 - Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan. - Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2015-2019, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2019 sebesar 86,99 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018. Hal ini berarti masih ada 13,01 persen penduduk Kabupaten Morowali belum dapat menjangkau air bersih terutama di wilayah Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan; - Rasio Rumah Layak Huni (RLH) menurun dari 20,51 persen di Tahun 2013 menjadi 17,32 persen di Tahun 2017. Pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan yang drastic sebesar 186,94. Selain itu, realisasi ini di atas target; - Rasio elektrifikasi baik PLN maupun non PLN meningkat dari 92,05 persen di Tahun 2017, Tahun 2019 meningkat menjadi 96,20 persen, namun sering mengalami pemadaman setiap hari;
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	- Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Morowali; - Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap perusahaan meningkat, sehingga mengganggu ketertiban umum. - Tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih menjadi masalah di Kepulauan Salabangka dan Kecamatan Menui Kepulauan; - Kejahatan siber patut diantisipasi;

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami peningkatan dari 782 di Tahun 2015 menjadi 975 di Tahun 2019. Selanjutnya untuk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) justru mengalami penurunan dari 20 di Tahun 2015 dan Tahun 2019 sebesar 8. Untuk indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2019 sebesar 5 meningkat dari Tahun sebelumnya • Sarana dan Prasarana pendukung dan operasional Satpol PP dan Damkar belum memadai dan jauh cukup.
1.06	BIDANG SOSIAL	• PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa) pada tahun 2018 sebesar 47.124 PMKS, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 49.012 PMKS. • Persentase PMKS yang tertangani tahun 2018 sebesar 35 persen dan tahun 2019 sebesar 45 persen. Dengan demikian masih banyak PMKS yang belum tertangani • Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun 2019 sebanyak 7 Kelompok • Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2019 sebanyak 100 persen • Korban bencana alam (Jiwa/KK) tahun 2018 sebanyak 257 KK dan tahun 2019 sebanyak 383 KK • Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 14 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 38 persen, namun masih banyak penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang belum menerima bantuan sosial.

Kode	Urusan	Permasalahan
2	BIDANG URUSAN TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR	
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	• Pada Tahun 2019 Angka Pengangguran terbuka sebesar 3,03 persen. Namun, kondisi Tahun 2019 masih sedikit lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dengan TPT masing-masing sebesar 3,11 persen dan 5,23 persen. Pada Tahun 2020, persentase TPT Kabupaten Morowali meningkat cukup besar menjadi 5,21 persen, Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,77 persen dan Nasional meningkat sebesar 7,07 persen ; • Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang) sebanyak 30 Orang tahun 2018, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 56 Orang • Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2018 sebesar 9,92, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9,16; • Belum adanya <i>link and match</i> antara pendidikan Tenaga Kerja dan kebutuhan dalam bursa kerja dan industry yang berkembang; • Informasi bursa kerja terbatas; • Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal masih rendah rata-rata berpendidikan SMP/MTs; • Adanya <i>bottleneck</i> antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan pendidikan dan skill yang dimiliki calon tenaga kerja
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	• Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 11,46, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10,19 • Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD tahun 2019 sebesar 4 persen masih sangat kecil. • Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,50, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,45 • Masyarakat masih melakukan <i>doing gender</i> karena belum memahami secara jelas konsep gender

Kode	Urusan	Permasalahan
2.09	BIDANG PANGAN	• Rasio Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2018 sebesar 199,26, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 216,27. • Ketersediaan protein perkapita pada tahun 2018 sebesar 42,51, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 216,27 • Target produksi padi sawah pada Tahun 2019 yakni 47.796,98 ton belum tercapai, di mana realisasi produksi hanya sebesar 44.672 Ton. Sementara produksi tanaman pangan lainnya memenuhi dan ada yang melebihi target; • Walaupun realisasi produktivitas padi sawah pada Tahun 2019 produktivitas padi sawah melebihi target 4,93 ton/Ha (RPJMD Tahun 2018-2023) terealisasi 4,98 ton/Ha; • Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari daerah lain ; • Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan komersial; • Rendahnya pertumbuhan penyediaan prasarana irigasi pada wilayah-wilayah baru dan potensial bagi peningkatan ketersediaan pangan terutama padi; • Keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan <i>upstream</i> (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;
2.10	BIDANG PERTANAHAN	• Tumpang tindih antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertanian masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan; • Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; • Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal; • Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal;

Kode	Urusan	Permasalahan
		Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal.
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	- Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; - Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pertambangan yang mencemari air sungai dan laut untuk kegiatan perikanan; - Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan daratan (terutama hutan) dan ekosistem perairan laut; - Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; - Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai; - Semakin menurunnya tutupan terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak sesuai anjuran. - Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang dilalui oleh patahan (sesar) aktif yaitu sesar Matano sehingga termasuk daerah rawan gempa;
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Kurangnya penduduk yang memiliki e-KTP, walaupun penduduk yang memiliki KTP meningkat penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2018 sebesar 103.393; - Kurangnya penduduk yang memiliki Kartu Keluarga; - Kurangnya bayi yang memiliki akta kelahiran Tahun 2015 sebanyak 22.412 bayi, kemudian Tahun 2018 sebesar 8.146 bayi.
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<i>Span of control dan span of management</i> wilayah pembinaan sangat luas Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum sebanding dengan minimnya pembiayaan; - Data kelompok binaan belum dimuktahirkan sehingga menyulitkan pembinaan oleh Tim Penggerak PKK; - Fasilitas pembinaan PKK di tingkat kecamatan masih terbatas; - Masyarakat mempunyai pola pikir bahwa posyandu adalah milik Dinas Kesehatan,

Kode	Urusan	Permasalahan
		bukan milik masyarakat sehingga tanggung jawab operasionalnya diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali pada tahun 2018 sebesar 80,05 persen, pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 79,08 persen - Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2018 sebesar 69,51 persen, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 65,75 persen. - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2018 sebesar 12,64 persen, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 15,33 persen - Minimnya pemahaman penduduk atas makna program Keluarga Berencana; - Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan; - Terbatas akses masyarakat miskin dan di wilayah terpencil pada Program KB.
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	- Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan Peralatan Uji KIR; - Minimnya fasilitas pelabuhan laut, terminal bus, bandara Morowali; - Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada daerah rawan lakalantas; - Rasio izin trayek di bawah target yakni mencapai 15 poin di Tahun 2017 pada tahun 2019 meningkat mencapai 17 poin.
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi - Masih adanya wilayah desa <i>blank-spot</i> Jaringan Komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau. - Belum optimalnya penggunaan website sebagai sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. - Anggaran yang terbatas didalam penyiapan infrastruktur tower BTS dan akses jaringan internet pada wilayah terpencil.
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase koperasi aktif terjadi fluktuasi setiap tahunnya dimana capaiannya 28 persen di Tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat sebesar 30,77 persen, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi

Kode	Urusan	Permasalahan
		22,56 persen • Minimnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi; • Minimnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; • Terbatasnya akses modal bagi UKM; • Terbatasnya akses informasi pasar bagi UKM; • Terbatasnya interkoneksi dengan Kawasan Industri yang ada
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	• Infrastruktur baik transportasi maupun energi dalam mendukung penanaman modal masih terbatas; • Sektor penanaman modal masih terfokus pada industri ekstraksi berbasis sumber daya alam khususnya pertambangan; • Promosi investasi belum memadai; • Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2018 sebanyak 111 investor, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 57 Investor; • Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar US\$ 89,6 Milyar, pada tahun 2019 terjadi penurunan nilai investasi menjadi US\$ 25,8 Triliun
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	• Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan masih terbatas; • Kontribusi organisasi kepemudaan serta koordinasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah masih terbatas; • Jumlah prasarana olah raga belum memadai; • Sinkronisasi perencanaan kegiatan olah raga belum memadai.
2.20	BIDANG STATISTIK	• Beberapa publikasi penting bagi Kabupaten Morowali belum ada dan belum dijadikan kegiatan rutin yang dikerjasamakan dengan pihak badan Pusat Statistik seperti PDRB sembilan Kecamatan baik pendekatan lapangan usaha maupun penggunaan, Indeks Gini, NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), NTP Nelayan, dan lain-lain.

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Terintegrasinya Sistem Data statistik belum terintegrasi dan dimanfaatkan dengan baik didalam pengambilan keputusan.
2.21	BIDANG PERSANDIAN	• Anggaran mendukung persandian sangat terbatas. • Sampai dengan tahun 2020 belum adanya tenaga sandiman di kabupaten Morowali • Keamanan data dan informasi daerah sangat diperlukan didalam menjalankan pemerintahan termasuk keamanan tanda tangan pejabat daerah menghindari pemalsuan.
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	• Alokasi anggaran bagi kegiatan kebudayaan masih minim; • Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana kegiatan kebudayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan masih minim; • Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum dilakukan
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	• Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2018 realisasi sebanyak 10.244 pengunjung, pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi 3.510 pengunjung.
2.24	BIDANG KEARSIPAN	• Minat baca masyarakat masih minim yang disebabkan minimnya koleksi buku di perpustakaan; • Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih belum memadai; • Belum dilakukannya identifikasi perpustakaan tingkat komunitas; • Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih belum memadai; • Pengelola kearsipan masih terbatas; • Tradisi Tata Kelola arsip daerah belum dibudayakan
3	URUSAN PILIHAN	
3.27	PERTANIAN	• NTP belum mencapai nilai 100 • Menurunnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB • Masih rendahnya kemampuan

Kode	Urusan	Permasalahan
		kelompok tani • Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian • Kualitas-Produk pertanian masih rendah • Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas • Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah • Kegagalan budidaya rumput laut, • menurunnya hasil perikanan tangkap, • lemah daya tawar nelayan, • alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga; • rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru;
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	• Masih rendahnya kesejahteraan nelayan. • Kewenangan kabupaten didalam pengelolaan kelautan dan perikanan sangat terbatas. • Sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi nelayan terbatas. • Anggaran didalam mendukung pengembangan perikanan terbatas • Pengembagan rumput laut masih belum optimal. • Potensi perikanan tangkap kabupaten morowali cukup besar • Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan
3.26	BIDANG PARIWISATA	• Masih rendahnya kontribusi PAD sector pariwisata terhadap APBD Kabupaten • Belum optimalnya penataan daya Tarik Wisata (DTW) • Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antar daerah sesuai potensi
3.30	BIDANG PERDAGANGAN	• Masih rendahnya akses permodalan bagi Pedagang/Usaha Mikro/informal • Program Pengembangan UMKM

Kode	Urusan	Permasalahan
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	- Pertumbuhan Industri pada tahun 2018 hanya minus 13, 41 sementara pada tahun 2019 mampu tumbuh pada 8,26. - Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB berdasarkan ADHB pada tahun 2018 6,91, pada tahun 2019 mampu tumbuh pada 6,91 dimana lebih rendah pada tahun sebelumnya.
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	- Tidak adanya pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru dari Tahun 2014 – 2019. - Diperlukan Penyiapan Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Permukiman Transmigrasi baru
4	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	- Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal. - Nilai SAKIP Pemerintah Masih dalam Katagori Rendah - Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Belum terbangunnya Fasilitas Kerjasama Daerah - Masih terbatasnya aparatur UKPBJ - Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JF-PPBJ). - Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa - Belum stabilnya harga komoditi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat - Perlu adanya pengembangan Aparatur yang Profesional, Adaptif dan responsif. - Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP dan Penerapan Standar Pelayanan minimal. - Belum optimalnya kordinasi

Kode	Urusan	Permasalahan
		penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD	• Belum optimalnya capaian Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
5.01	PERENCANAAN	• Masih rendahnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan. • Dokumen perencanaan belum sinkron • Pengolahan data dan informasi pembnagunan daerah belum optimal. • Koordinasi perencanaan masih perlu ditingkatkan
5.02	KEUANGAN	• Kurang optimalnya capaian pendapatan PAD. • Alokasi anggaran untuk pencapaian target pembangunan sulit tercapai karena situasi pandemi covid yang mengharuskan refocusing anggaran.
5.03	KEPEGAWAIAN	• Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN.
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	• Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	• Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	• Masih kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal • Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas auditor
7.01	KECAMATAN	• Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan. • Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	• Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan.

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat. • Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan. • Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi perekonomian hasil perhitungan tahun 2019 dan capaian 2020. Disajikan juga tantangan dan prospek perekonomian tahun 2021 dan tahun 2022 serta gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2022 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2022, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 dan diselaraskan dengan RKP 2022 dan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Penyelarasan juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Implementasi arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan.

Arah kebijakan nasional pada Tahun 2022 di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong tumbuhnya UMKM produktif paska Pandemi Covid-19, mendorong investasi dengan mengundang investor seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBN dilakukan dengan cara memanfaatkan APBN yang berfokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

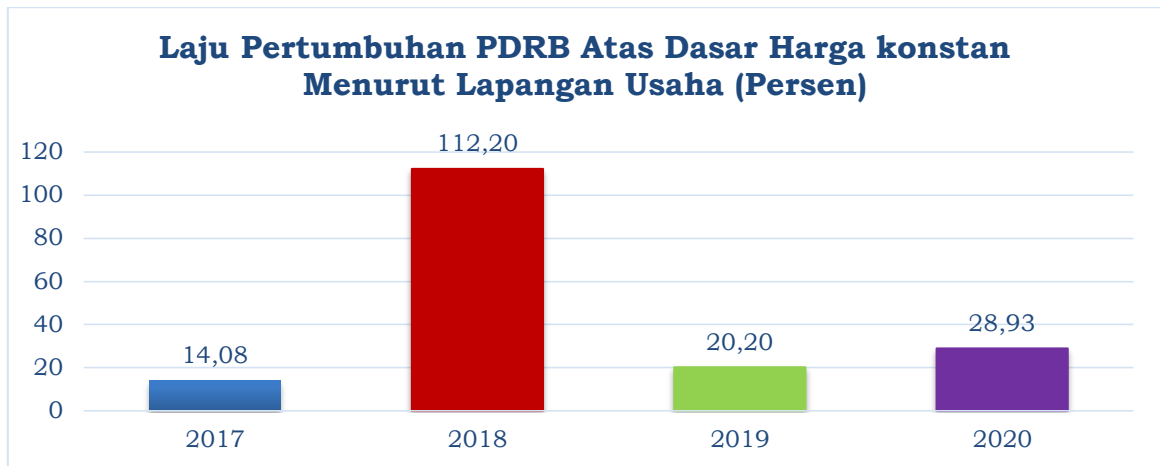
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil daerah dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun.

Besaran nilai PDRB suatu wilayah yang tercermin melalui perputaran perekonomian dalam satu tahun melalui pencapaian tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Dinamika perkembangan nilai PDRB Kabupaten Morowali sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali adalah sebesar 28,93%. Kondisi di tahun 2020 naik sebesar 43% dari tahun 2019 sebesar 20,20%.

Kontribusi terbesar pada perkembangan PDRB Kabupaten Morowali adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan, namun disisi lain sektor lainnya seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih perlu didorong guna pencapaian visi daerah yang menitikberatkan pada peningkatan

ekonomi masyarakat.



Sumber : BPS Kab. Morowali, 2021, diolah

Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali 2017-2019 dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021

Pada tahun 2022 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu ditingkatkan, melalui program pemberdayaan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dan akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan serta perikanan; jaringan pemasaran dan produk pertanian, peternakan dan perkebunan serta perikanan masih kurang; belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan serta perikanan; belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

Gambar di atas juga menunjukkan Pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 15-10%, proyeksi ini didasarkan pada skenario yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Morowali.

3.1.2. Pembangunan Manusia

Capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Morowali di tahun 2019 telah mencapai angka 72,02. dengan komponen RLS 9,11, HLS 13,33, UHH 68,82, dan Pengeluaran Per kapita 11,277 ribu rupiah. Dengan kondisi ekonomi di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan

dikarenakan COVID-19 akan berpengaruh terhadap angka pengeluaran per kapita setiap penduduk di Morowali. Banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan dan kembali pulang ke Morowali menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat juga terpengaruh. Pendidikan di tahun 2020 dan 2021 yang melaksanakan kegiatan Belajar Di Rumah (BDR) dimungkinkan tidak akan banyak berpengaruh terhadap capaian Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, karena kegiatan BDR hanya berlangsung kurang 10 bulan di tahun 2020 dan tahun 2021 masih melihat kondisi perkembangan COVID-19. Tantangan utama peningkatan IPM di tahun 2022 adalah pada dimensi pendidikan dan ekonomi. Proyeksi di Tahun 2020,2021 dan 2022 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali akan menjadi tantangan terbesar untuk mencapainya.

Tabel 3.1
Realisi IPM Tahun 2019 dan Proyeksi IPM Tahun 2020-2022

	2019	2020*	2021*	2022*
IPM	72,02	72,02-73,00	73,00-74,00	74,00-75,00

Sumber : BPS Kab. Morowali, 2020, diolah

**Angka Proyeksi*

3.1.3. Kemiskinan

Perkembangan perekonomian harus bermanfaat bagi masyarakat miskin. Karena itu orientasi pada peningkatan kualitas pertumbuhan harus semakin ditingkatkan. Dinamika jumlah penduduk miskin adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Morowali sudah menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Morowali ada sebanyak 17.360 jiwa atau 15,13%. Walaupun garis kemiskinan sudah meningkat menjadi 379.001 rupiah, tetapi jumlah penduduk miskin di tahun 2019 telah menurun menjadi 13,75%. Konsistensi penurunan kemiskinan tersebut terlihat dari fakta bahwa antara tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah penduduk selalu menurun.

Namun demikian, pandemi COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin akibat adanya kontraksi perekonomian. Tabel di bawah menunjukkan perkiraan jumlah penduduk miskin di kabupaten Morowali di tahun

2020, 2021 dan 2022.

Hasil proyeksi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali di tahun 2020 akan mengalami penurunan sebesar 13,75%, di tahun 2021 sebesar 13,00% dan ditahun 2022 menjadi 12,25%.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Proyeksi Kemiskinan di Kabupaten Morowali

Tahun	2019	2020*	2021*	2022*
Persentase Kemiskinan (%)	13,75%	13,75%	13,00%	12,25%
Jumlah Penduduk Miskin(jiwa)	16.610	16.390	16.090	15.760

Sumber : BPS Kab. Morowali, 2020, diolah

**Angka Proyeksi*

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Peningkatan jumlah penduduk miskin terkait langsung dengan tingkat pengangguran terbuka. Dinamika perubahan tingkat pengangguran terbuka ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Dari informasi pada gambar di bawah ini terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali relatif rendah. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali ada sebanyak 3,03%. Dampak adanya Covid-19 TPT diproyeksikan secara moderat 4,40% pada tahun 2020 dan 2,47% di tahun 2021.

Tabel 3.3
Prosentase TPT tahun 2019 dan Proyeksi TPT Tahun 2020-2022

Tahun	2019	2020*	2021*	2022*
TPT (%)	3,03	5,21	4,01	3,00

Sumber : BPS Kab. Morowali, 2020, diolah

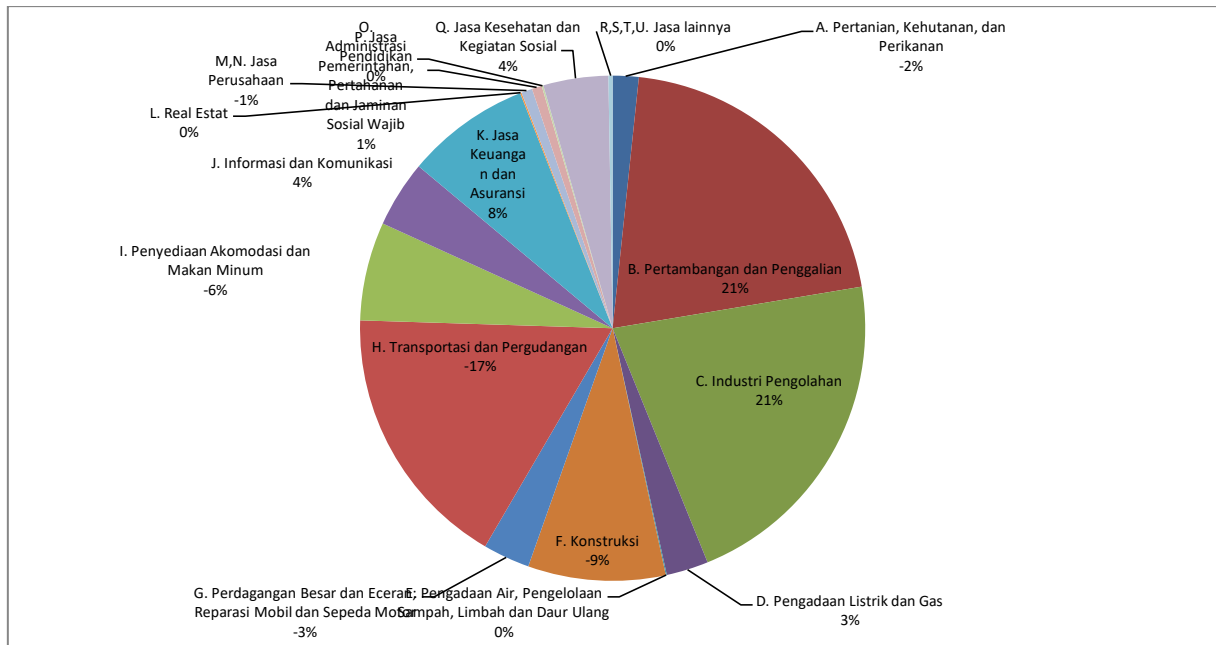
**Angka Proyeksi*

3.1.5. Struktur Sektor Ekonomi

Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Morowali tahun 2019 berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian 17,94%; Industri Pengolahan 17,33%, Transportasi dan Pergudangan 14,85%; Konstruksi 13,31%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,40%, secara lengkap seperti pada gambar di bawah.

Terjadinya perubahan dan penyebaran struktur perekonomian dari beberapa

sektor primer menuju sektor sekunder ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali tanpa harus meninggalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sesuai dengan visi Kabupaten Morowali “Terwujudnya Masyarakat Morowali yang Sejahtera Bersama” maka diharapkan semua sektor pembentuk PDRB dapat tumbuh positif seiring dengan perkembangan sektor pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Morowali.



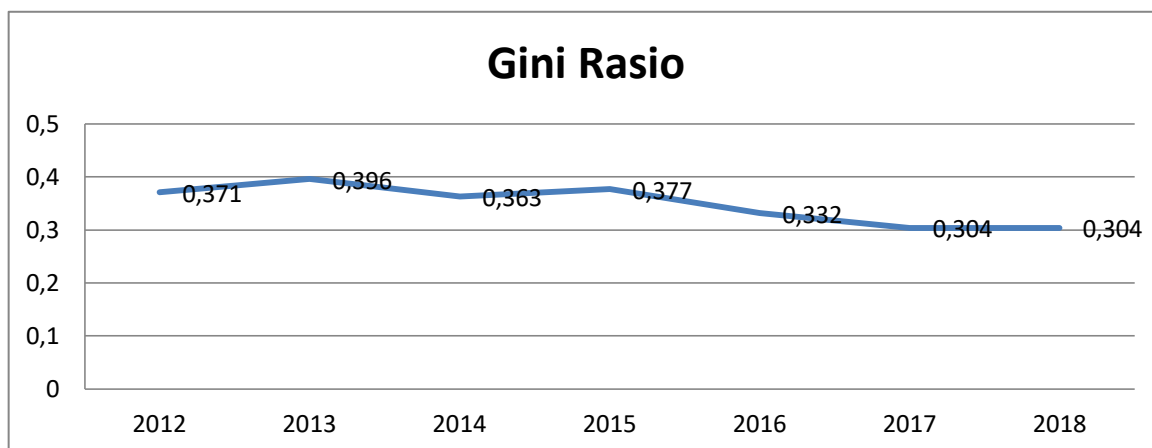
Sumber : BPS, Kab Morowali, 2021, diolah

Gambar 3.2
Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Morowali Tahun 2020

3.1.6. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan penduduk di kabupaten Morowali bisa memakai satu indikator yaitu indikator Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Pada tahun 2012 nilai gini ratio Kabupaten Morowali sebesar 0.371 kemudian naik menjadi 0,396 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,363. Di tahun 2016 nilai gini ratio Kabupaten Morowali sebesar 0,332 dan kembali mengalami penurunan menjadi 0,304 di tahun 2017 dan tetap tidak mengalami perubahan angka di tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan

distribusi pendapatan di Kabupaten Morowali termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang, berikut Rasio Gini Kabupaten Morowali tahun 2012-2018 adalah:



Sumber :BPS,2020

Gambar 3.3
Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2013-2018

Dengan adanya wabah Covid-19 dengan proyeksi naiknya kemiskinan di tahun 2020 dan di tahun 2021, dapat diproyeksikan gini rasio di Morowali seperti pada tabel dibawah menjadi:

Tabel 3.4
Proyeksi Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Proyeksi	0,304	0,30-0,35	0,30-0,35	0,30-0,35

Sumber : Bappeda, 2020

3.1.7. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara/daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional/daerah suatu negara/ daerah dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara/daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara/daerah tersebut. Berikut ini adalah pendapatan per kapita Kabupaten

Morowali Tahun 2015-2019 dan proyeksi pendapatan per kapita tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Morowali Tahun 2015-2021 (Milliar Rupiah/Billion rupiah)

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion upiah)					
Tahun/ Year	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	113.303	126.159	145.196	171.910	200.561
- ADHK/ at 2010 Constant Price	92.103	101.688	113.900	125.915	141.800

Sumber : BPS, 2019

*) , Angka sementara

**) Angka Sangat Sementara BPS

***) Proyeksi Bappeda 2020

Berdasarkan tabel 3.5 pendapatan perkapita ADHK Kabupaten Morowali pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nominal sebesar 15,88 Milyar rupiah. Dengan asumsi proyeksi moderat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (0,14%), 2021 (0,7%) dan 2022 0,3% yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid 19.

3.1.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kejadian pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pencapaian target sasaran RPJMD 2018-2023. Karena itu maka tantangan pokok daerah tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 adalah pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Morowali. Tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2022 setelah terjadinya pandemi COVID-19 yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada RPJMD 2018-2023, target laju pertumbuhan ekonomi 2020, 2021 dan 2021 adalah sebesar 15-10%, 15-10% dan 15-10%. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini maka perekonomian diperkirakan akan mengalami kontraksi; pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan tumbuh di bawah target.

2. Kemiskinan

Pada RPJMD 2018-2023, target penurunan kemiskinan di tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 13,280%, 12,81% dan 12,34%. Tetapi karena adanya

pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin diperkirakan akan meningkat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 15.760 jiwa.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada RPJMD 2018-2023, target tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 5,21%, 4,01% dan 3,00%. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, tingkat pengangguran diperkirakan akan meningkat. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran diperkirakan 3,00%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian daerah di tahun 2020-2022 yang sedang dalam masa pandemi COVID-19 serta beban kerja target RPJMD mengharuskan adanya kebijakan yang tepat pada keuangan daerah, baik di sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 di proyeksikan sebesar Rp. 320,066,055,827 atau naik sebesar Rp. 11.776.976.618 dari tahun sebelumnya.
2. Pendapatan Transfer pada tahun 2022 di proyeksikan sebesar Rp. 751.864.422.811, bila dibandingkan dengan pendapatan transfer tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 261.763.004.170 penurunan ini disebabkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan belum memperhitungkan penerimaan transfer pemerintah pusat pada komponen penerimaan Dana Transfer Khusus dan Dana Insentif Daerah. Rincian penerimaan daerah dapat di sajikan dalam tabel di bawah ini : .

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Morowali
Tahun 2020 - 2022

Kode	Uraian	APBDP	Target	Proyeksi
		2020	2021	2022
1	2	4	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1,276,418,663,949.19	1,351,431,399,190.00	1.071.930.478.638
4.1	Pendapatan Asli Daerah	295,936,100,740.19	308,289,079,209.00	320.066.055.827
4.1.1	Pajak Daerah	81,563,564,568.46	85,800,011,447.00	87.333.666.864
4.1.2	Retribusi Daerah	168,257,983,894.00	143,640,000,000.00	149.188.000.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,810,921,029.00	1,700,000,000.00	1.810.921.029
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44,303,631,248.73	77,149,067,762.00	81.733.467.934
4.2	Pendapatan Transfer	948,178,766,652.00	1,013,627,426,981.00	751.864.422.811
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	923,281,539,907.00	987,915,303,170.00	726.152.299.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	736,414,195,907.00	825,768,286,170.00	621.285.324.000
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	106,981,369,469.00	147,459,923,000.00	147.459.923.000
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum	466,453,336,000.00	473,825,401,000.00	473.825.401.000
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus	162,979,490,438.00	204,482,962,170.00	
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00	57,280,042,000.00	
4.2.1.6	Dana Desa	186,867,344,000.00	104,866,975,000	104.866.975.000
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	24,897,226,745.00	25,712,123,811.00	25.712.123.811,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	23,669,466,745.00	25,712,123,811.00	25.712.123.811,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1,227,760,000.00	0	0

4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32,303,796,557.00	29,514,893,000.00	
4.3.1	Hibah	32,087,970,000.00	29,514,893,000.00	0
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	215,826,557.00	0	0.00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, penyediaan belanja tidak terduga terutama untuk penyediaan penanggulangan COVID 19, apabila belum selesai, belanja bantuan social untuk menangani dampak pandemic Covid 19, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
2. Belanja Pegawai pada pos belanja wajib mengalami kenaikan sebesar 2,5% yang mana kenaikan tersebut merupakan accres gaji pegawai, untuk belanja pegawai merupakan penggabungan gaji pegawai dan honor tim pelaksana kegiatan.
3. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja operasi pada setiap PD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
6. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
- b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, meningkatkan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Besaran alokasi belanja Daerah tahun 2022 di proyeksikan Sebesar Rp. 1.067.116.500.816 bila dibandingkan dengan target tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 307.860.120.463,29 penurunan ini di karenakan proyeksi Pendapatan Daerah ditahun 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2020-2022 dapat di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/target Belanja Kabupaten Morowali
Tahun 2020 - 2022

Kode	Uraian	APBDP	Target	Proyeksi
		2020	2021	2022
1	2	4	3	4
5	BELANJA DAERAH	1,234,366,803,092.70	1,374,976,621,279.29	1.067.116.500.816
5.1	Belanja Operasi	745,380,121,910.80	856,008,725,490.51	766.756.041.621,00
5.1.1	Belanja Pegawai	436,131,839,330.60	363,279,705,112.00	307.725.780.643
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285,421,772,274.00	452,602,166,052.51	402.669.430.522
5.1.3	Belanja Bunga	1,265,160,306.20	1,600,000,000.00	1.600.000.000
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	14,480,500,000.00	35,257,054,326.00	51.820.830.456
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8,080,850,000.00	3,269,800,000.00	2.940.000.000
5.2	Belanja Modal	282,208,881,234.40	293,328,387,238.78	104.711.799.330
5.2.1	Belanja Modal Tanah			1.668.227.100

5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			19.729.414.172
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			59.040.252.206
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			23.352.606.352
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			921.299.500
5.3	Belanja Tidak Terduga	29,559,824,590.00	10,500,000,000.00	5.000.985.779
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	29,559,824,590.00	10,500,000,000.00	5.000.985.779
5.4	Belanja Transfer	177,217,975,357.50	215,139,508,550.00	190.647.674.086
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	16,086,356,666.52	22,944,001,150.00	23.652.166.686
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0	0
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	161,131,618,690.98	192,195,507,400.00	166.995.507.400

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2022 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dengan memanfaatkan SILPA 2021 yang diperkirakan masih dapat dipergunakan untuk menutup defisit belanja. Proyeksi SILPA yang digunakan mempertimbangkan belanja 2021 yaitu cadangan penaganaan COVID-19 dan belanja wajib yang harus dikeluarkan pada perubahan APBD 2021.

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal. Berikut adalah proyeksi pendapatan, belanja, serta pembiayaan tahun 2021 dan 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel. 3.8
Realisasi dan Proyeksi/target Pembiayaan Kabupaten Morowali
Tahun 2020 – 2022

Kode	Uraian	APBDP	Target	Proyeksi
		2020	2021	2022
1	2	4	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	26,958,556,499.30	34,861,641,932.00	0.00
6.1.1	SiLPA	10,785,438,665.30	34,861,641,932.00	0.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16,173,117,834.00	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,270,966,733.34	11,313,977,822.00	4,813,977,822.00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1,270,966,733.34	1,313,977,822.00	1,313,977,822.00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah		10,000,000,000.00	3,500,000,000.00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dirumuskan dalam rangka pencapaian target visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023.

Visi Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama”**.

Penjelasan visi “Sejahtera” yaitu gambaran masyarakat Kabupaten Morowali yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi : sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai. Sedangkan “Bersama” dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

Visi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi daerah. Rumusan misi tersebut juga sekaligus menjadi acuan untuk melakukan

evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran visi dari Kabupaten Morowali yang tertuang dalam dokumen P-RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 maka misi dirumuskan sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.
- Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pengembangan UMKM, IKM , Koperasi dan Bumdes untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa, sehingga tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Bahagia
- Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali

Misi Kabupaten Morowali		Tujuan		Sasaran	
1	Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.	1	Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
				2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
				3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
				4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pengembangan UMKM, IKM , Koperasi dan Bumdes untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama	2	Meningkatkan skala ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan bersama	5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
				6	Tumbuhnya Investasi Daerah
				7	Meningkatnya PDRB perkapita
				8	Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat
				9	Menunnya Jumlah Pengangguran
				10	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
				11	Meningkatkan ketersediaan pangan
				12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3	Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa, sehingga tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	3	Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)	13	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lmtaq
				14	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
				15	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah
				16	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah
				17	Meningkatnya Pelestarian seni dan Budaya Lokal
				18	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama Kab Morowali
4	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Bahagia	4	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	19	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah
				20	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan Infrastruktur digital

5	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana	5	Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	21	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
				22	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku
				23	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten
				24	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali

Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid19
3. Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel-tabel selanjutnya.

Tabel 4.2. Keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD 2018 2023 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	
	Peningkatan Perencanaan, pengawasan dan Evaluasi pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	
	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	Peningkatan layanan Pemerintah kabupaten melalui revitalisasi Arsip berbasis digital dan Optimalisasi peran sekretariat daerah	
	Peningkatan Tunjangan Kinerja Honorer Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa	
	Penguatan Tatakelola Kependudukan dan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	
	Harmonisasi hubungan Eksekutif dan Legislatif	
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber penerimaan.	

Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian Tujuan SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa	Meningkatkan kemajuan desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa	
	Memajukan desa melalui Percepatan peningkatan status desa	
Peningkatan peran sektor unggulan non tambang dalam membangun ekonomi inklusif Morowali	Pengembangan pariwisata mendukung Ekonomi inklusif melalui penataan destinasi unggulan Morowali	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid19
	Optimalisasi Peran Bumdes dalam Pengembangan Ekonomi Desa melalui dukungan Modal Usaha Untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar UMKM, IKM dan Koperasi	Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Daerah melalui Pembinaan dan Pendampingan Usaha serta mendorong penggunaan ekosistem digital	
	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar tradisional serta perlindungan konsumen.	
	Pengembangan kawasan industri dan hilirisasi Industri berbasis pada potensi unggulan lokal	
Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing melalui pelayanan yang cepat, mudah dan murah	
	Mendorong Investasi sektor unggulan dalam membuka lapangan kerja baru	
	Mendorong lahirnya UMKM dan koperasi yang maju dan memenuhi kebutuhan masyarakat	

Meningkatkan Pemerataan Kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak bagi calon tenaga kerja	Memfasilitasi dan memastikan menyerap Tenaga Kerja lokal pada setiap industri yang disirikan dikabupaten dan melindungi hak-hak pekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Morowali	
Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan melindungi Hak-hak pekerja local dalam hubungan industrial	Pembukaan Lapangan Kerja Dengan Melibatkan UMKM dan Koperasi	
	Memfasilitasi dan memastikan menyerap Tenaga Kerja lokal pada setiap industri yang disirikan dikabupaten dan melindungi hak-hak pekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Morowali	
Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertambangan, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	Peningkatan produktivitas tanaman	
	pangan dan Holtikultura Pembukaan Lahan Sawah Baru Dan fasilitasi Ketersediaan Pupuk Organik dan non organik	
	Peningkatan Produktivitas Peternakan melalui Penyediaan Bibit Ternak Unggulan	
	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapras perikanan tangkap dan budidaya untuk	
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan dan mutu pangan	
Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat miskin	Percepatan pengentasan kemiskinan melalui program yang sinergis dan bantuan tepat sasaran bagi PMKS	
	Penguatan peran koperasi dan BumDes dalam rangka stabilitasi harga kebutuhan pokok di Desa	
	Memulihkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin	

	dan/atau terdampak Pandemi COVID-19 melalui Bantuan Jaring Pengaman sosial	
Menyelenggarakan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan kesehatan Gratis	Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Terpenuhinya Standar	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun secara merata dan terjangkau	
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	
	Beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
	Meningkatkan literasi digital dan minat baca masyarakat morowali	
Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
Pemenuhan Standar	Meningkatkan ketersediaan (Kuantitas) sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan dan Desa serta usaha pengendalian penduduk	
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tatakelola Rumah Sakit Daerah Morowali dan RS Pratama melalui peningkatan sarana prasarana dan tenaga medis	
	Penyelenggaraan Kesehatan Gratis utk Semua melalui Pembiayaan BPJS-PBI	
Optimalisasi Pencegahan stunting	Penurunan Angka Stunting berbasis Desa dan Kelurahan	

Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan	Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dlm Pembinaan Karakter Pemuda yang <i>cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa</i>	
Keolahragaan serta pengembangan pesantren mempersiapkan generasi muda yang lmtaq	Penguatan pelatihan dan pembinaan prestasi olahraga dan penyiapan sarana prasarana olahraga masyarakat.	
	Optimalisasi peran pesantren dan peningkatan kualitas santri serta beasiswa santri	
Menguatkan Peran perempuan dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
Meningkatkan penerapan nilai-nilai Agama, pelestarian Seni dan Budaya lokal Morowali bersendikan agama	Memajukan dan melestarikan Seni Budaya lokal melalui penyelenggaraan lvent dan tradisi tahunan	
	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dalam kehidupan masyarakat Morowali	
Meningkatkan toleransi umat beragama dan stabilitas Polhukam	Fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan dalam memperkuat toleransi umat beragama	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan Koordinasi, kerjasama yang sinergis dan integrative dalam peningkatan Polhukam Daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menjaga stabilitas politik dan hukum dengan pelibatan peran Forkompinda, partai politik dan stakeholders.	
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur melalui peningkatan fasilitas jalan, jembatan, air bersih, Listrik, transportasi	Penyediaan saran prasarana jalan kondisi baik mendukung aksesibilitas produksi dan pengembangan destinasi Pariwisata daerah	Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
	Membangun dan peningkatan kemantapan Jalan, jembatan Kabupaten	

dan perumahan layak	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air kewenangan Kabupaten mendukung produktivitas dan kemajuan pertanian dan Perikanan	
	Pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai dan penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	
	Penyediaan sarana prasarana Keselamatan Transportasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Perhubungan	
	Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan khususnya listrik desa dan irigasi teknis	
Percepatan Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak upaya mengurangi penduduk miskin	Pembangunan dan reabilitasi rumah tidak layak huni Melalui Bantuan 2000 Unit Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, Khususnya Diwilayah Pesisir Dan Kepulauan (Rumah Sendiri/Rumah Sejahtera Mandiri)	
Peningkatan fasilitas air bersih bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan bahagia	Membangun dan peningkatan cakupan air bersih (air minum layak)	
Peningkatan pemanfaatan Ekosistem digital pada masyarakat	Memfasilitasi Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditingkat kecamatan dan desa	
	Percepatan pengelolaan satu data Morowali dan Persandian daerah berbasis Informasi teknologi	
	Koordinasi penyediaan jaringan internet desa dan hotspot area desa melalui optimalisasi anggaran desa	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui peningkatan	Meningkatkan kualitas air dan udara dengan penerapan Ketaatan penanggung jawab	

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan	
	Meningkatkan kualitas lahan pasca tambang	
	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Menata manajemen bencana daerah yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Meningkatkan Kesipsiagaan dan Misigasi Masyarakat wilayah Rawan Bencana Alam dan non alam	
	Peningkatan jumlah desa tangguh bencana	
Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kota	Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Kerjasama Pengelolaan Persampahan (Morowali Bebas Sampah/MOBASA)	
Mengoptimalkan layanan pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Mengurangi risiko dan dampak kerugian akibat kebakaran melalui respon dan layanan kebakaran daerah	
Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum	Meningkatkan Upaya Kepatuhan Masyarakat dalam Penegakan Perda dan Perkada	

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan kabupaten terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2022 :		
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi	Pemulihan Sosial Ekonomi Daerah Menuju Morowali Sejahtera Bersama
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022 :		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid19
	Percepatan Penanganan COVID-19.	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;	Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);	Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash	Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
	for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi;	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

Program Prioritas Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Pembangunan termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya; Percepatan Penanganan COVID-19.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan merata untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota	Dinas Perikanan
				Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng	Peningkatan pelayanan dasar melalui infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
kesenjangan dan menjamin pemerataan	sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru	yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana		(RRTR) Kab/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan)	Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan	
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, RSUD Morowali, RS Pratama
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, RS Pratama
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	BPPD
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Unit berdasarkan Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disporabudpar
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Disporabudpar
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Disporabudpar

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disporabudpar
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				(Sepuluh) Tahun Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	
			Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dan Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar		Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PUPR
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan pelayanan dasar melalui infratraktur yang berkualitas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
			Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Program Administrasi Umum	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				Penataan Organisasi	
				Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Fasilitasi Tugas DPRD	
			Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPD
			Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Mutasi dan Promosi ASN	
				Pengembangan Kompetensi ASN	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Pendampingan dan Asistensi	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9 Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9 Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Kecamatan
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesbangpol

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2022	Prioritas Kabupaten Morowali 2022	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			dan Budaya		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol

4.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Untuk mendukung keselarsan pencapaian tujuan pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten maka telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan setiap daerah.

Target indikator makro pembangunan Kabupaten Morowalitahun 2022 termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2020	Target Tahun 2022		
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,21	73,44 - 73,48	69,7	74 -75
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	28,93	5,4 – 6,0	6,50 – 7,00	10-15
Persentase Penduduk miskin	Persen	13,43	8,5 – 9,0	9,9	12,75-11,01
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,21	5,5 – 6,2	3	2,00-3
Pendapatan Per kapita	Juta	142	NA	NA	300-400
Nilai Tukar Petani	Persen	98*	102 - 104	NA	100-102
Gini Rasio	Indeks	0,35*	0,376 - 0,378	0,24	0,30-0,24

Sumber Data BPS Diolah
Ket. * Angka Sementara

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Morowali secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali			Kategori	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0.7147
			Persentase Status Desa Maju	Persen	10-Nov
Meningkatkan skala ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan bersama	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Indeks	05-Jun
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Oct-15
		Tumbuhnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	04-May
		Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400
		Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
		Menunnya Jumlah Pengganguran	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	Persen	02-Mar
		Meningkatkan Kesejahteran Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100-102
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	105
		Meningkatkan ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	83.00-85.00
		Menurunnya Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin	Persen	12,75-11,01
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	70-75
Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	74,00-75,00
		Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lmtaq	Indeks Pendidikan	Indeks	50.00-55.00
			Harapan lama sekolah	Tahun	14.00-14.30
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	9,70-10
		Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	69,33-69,50
			Usia Harapan Hidup	Tahun	69,33-69,50
			Angka Stunting		30-28

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
		Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	75,5
		Prestasi Olahraga Daerah	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali Juara	35
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90
		Meningkatnya Pelestarian seni dan Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
			Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
		Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama Kab Morowali	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	65-70
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Kabupaten			Kategori (Nasional)	1.26-2.50 (Sedang)
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	30-32
			Rasio elektrifikasi	Persen	98-98
			Persentase Rumah Layak Huni	Persen	
			Persentase RT	Persen	90-92

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2022
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
			berakses air bersih		
		Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	Persen	85-90
			Presentase Koneksi Internet Desa	Persen	
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	55-60
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55-60
			Indeks Rawan Bencana	Indeks	95-90
			Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2-4
		Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	Persen	90
		Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten		
		Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	Persen	0

4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kabupaten Morowali akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih dan transparan. Kabupaten Morowali dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5. Inovasi Pembangunan Daerah

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
1.	Kesejahteraan Guru Kontrak (Kejar Kontrak)	Meningkatkan Kualitas pendidikan guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing dan generasi muda yang lmtaq	▪ Harapan lama sekolah ▪ Rata-rata lama Sekolah	Dinas Pendidikan Daerah
2.	Bank Kampus (Bantuan Pendidikan Mahasiswa)				
3.	Rumah Sendiri (Rumah Sejahtera Mandiri) 50 Juta/Unit	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah

4.	Kesehatan Gratis (BPJS PBI)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Angka Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB
5	Padi Organik	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2020, perkiraan kedudukan tahun 2021 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2022 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Prioritas Daerah Tahun 2022

KODE	Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan					192.957.868.092,00		212.090.480.867
Urusan Pendidikan	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	83,5		84,6	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	84,65		86,68	
		Tingkat parsitipasi warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	81,83		86,72	
		Tingkat parsitipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	98		99	
		Tingkat parsitipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	%	98		99	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasatr dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	78		81	
Urusan Kebudayaan	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	65%		90%	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jenis	10 Jenis		15 Jenis	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	75%		90%	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Jenis	12 Jenis		8 Jenis	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	65%		90%	

KODE	Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	25%		75%	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jenis	10 Jenis		7 Jenis	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Kegiatan	1 Kegiatan		2 Kegiatan	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Orang	10 Orang		10 Orang	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Orang	10 Orang		5 Orang	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	75%		90%	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	25%		75%	
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	50%		90%	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	%	65%		90%	
		pelaku/pendukung pertunjukan seni					
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	5%		25%	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	105.690.112.191	100	107.276.354.192
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	611.744.350	100	623.979.437
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	611.744.350	1	623.979.437
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	104.057.741.769	100	106.138.899.536
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	102.993.591.769,00	12	105.053.463.604
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	1.064.150.000	12	1.085.435.932
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				262.033.100		369.966.862,00
1	1	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	10.444.000	100	10.805.945,00
1	1	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	3.589.100	100	3.660.917,00
1	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	248.000.000		255.000.000,00
1	1	1	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	628.494.072	100	0,00
1	1	1	2.05	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor	%	100	74.684.922	100	
1	1	1	2.05	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	24.050.000	100	
1	1	1	2.05	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	529.759.150	100	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	4.933.500	100	7.140.000
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	%	100	4.933.500	100	7.140.000,00
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	75.245.400	100	85.368.357,00
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.492.000	100	3.570.000,00
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	36.000.000	100	39.661.680,00
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	27.770.000	100	28.370.688,00
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	7.983.400	100	13.765.989,00
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	49.920.000	100	51.000.000,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	49.920.000	100	51.000.000,00
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	%	100	80.209.011.526	100	97.262.938.424,58
						JUMLAH SD dan SMP Negeri terakreditasi	Sekolah	20		20	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100	28.002.822.897	100	44.091.420.856,00
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100		100	
						Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100		100	
						Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	100		100	
						Angka melanjutkan ke jenjang SD/MI	%	100		100	
						Angka Kelulusan SD/MI	%	100		100	
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	unit	24	5.018.500.352	24	5.140.800.000,00
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah yang memiliki ruang guru/kepala sekolah/TU	%	7	1.529.321.000	100	1.570.800.000,00
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan	unit	2	464.642.000	100	479.400.000
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Presentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (jamban)	%	5	727.821.015	100	744.600.000
						Presentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (timbunan)	%	75		100	
1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	%	5	743.400.000	100	765.000.000
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah sekolah yang rusak Sedang/Berat Ruang Kelas yang direhabilitasi	unit	55	5.597.109.000	1	5.711.080.328,00
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang rusak Sedang/Berat yang direhabilitasi	%	7	814.554.000	50	856.800.000
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	%tasi rehabilitasi rusak Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	%	-	1.986.840.000	-	2.040.000.000
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Rasio jumlah siswa dan jumlah guru	unit	1000	599.822.520	0,042361111	612.000.000
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan Perlengkapan Sekolah	unit	67	498.410.000	-	510.000.000
						Rasio software pembelajaran	Rasio	0,04375		0,042361111	
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	%tasi siswa miskin yang menerima bantuan seragam sekolah	%	100	399.903.000	100	408.000.000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%tasi Peserta Didik yang mengikuti ujian	%	100	254.076.470	100	259.158.928
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	%tase siswa berprestasi	%	-	288.766.360	-	214.200.000
						%tase prestasi kompetisi yang diikuti	%	-		-	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio tenaga Pustakawan	Rasio	0,04375		0,04375	
						Rasio tenaga pendidik	Rasio	358	8.326.079.090	0,061111111	8.492.601.600,00
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan	Rasio	80	223.286.980	-	408.000.000
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	%tasi sekolah terakreditasi	%	80	359.990.670	100	367.200.000
						Jumlah peserta Pelatihan Operator DAPODIK Pendidikan Dasar	Org.	184		184	
						Jumlah Dok. Profil Pendidikan	Dok.	1		1	
1	1	1	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS	Sekolah	143		143	15.333.280.000
1	1	1	2.01	30	Peningkatan Kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah pengelola dana BOS yang mengikuti kegiatan	Orang	143	170.300.440	143	178.500.000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	%	100	41.741.431.485	100	42.827.632.429,70
						APM SMP/MTs	%	100		100	
						Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	100		100	
						Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	100		100	
						Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	%	100		100	
						Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		100	
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	unit	2	3.996.150.000	0,1	4.079.923.000,00
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	unit	10	2.445.187.500	0,1	2.558.903.750,00
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	unit	7	3.426.606.000	100,0	3.516.032.120,00
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibangun	unit	3	1.246.080.000	100	1.294.921.600
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah sekolah yang memiliki Laboratorium Computer	unit	3	2.693.763.000	100	1.403.875.260,00
						Jumlah sekolah yang memiliki Laboratorium IPA	unit	3		100	1.350.000.000,00
1	1	2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	%	5	742.167.000	100	764.843.340
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (tugu batas)	unit	1	-	100	
						Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (jamban)	unit	3	309.842.500	100	322.446.850
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang rusak Sedang/Berat yang direhabilitasi	unit	25	2.837.650.725	100	2.949.735.464,50
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang rusak Sedang/Berat yang dirahabilitasi	unit	3	389.258.460	100	397.785.169,20
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang rusak Sedang/Berat	unit	3	286.740.000	100	320.734.800
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mobiler sekolahh	Pasang	500	299.971.980	0,042361111	305.999.440
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	%tasi siswa miskin yang menerima perlengkapan sekolah	%	60	12.199.999.680	100	443.999.994

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah siswa pendidikan S1/D4	Org.	30000			12.000.000.000
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah perlengkapan belajar peserta didik (Buku Elektronik)	unit	0		0	
						Jumlah perlengkapan belajar peserta didik (infocus)	unit	67	498.410.000	100	509.968.200
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%tasi Peserta Didik yang mengikuti ujian	%	100	250.990.850	100	335.611.167,00
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	%tasi siswa berprestasi	%	100	400.931.630	100	358.018.633
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio tenaga perpustakaan	Rasio	1:3		0,04375	
						Jumlah tenaga Pendidik	Org.	372	9.600.480.000	360	9.792.489.600
						Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	372		372	
						Jumlah Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	172		172	
						Jumlah Kepala sekolah Pada Jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sertifikat pendidik dan sureat tanda tamat bpendidikan dan pelatihann calon kenala sekolah	Org	30		40	
						Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah Menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Org				
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola dana BOS yang mengikuti kegiatan	Orang	36	117.202.160		122.344.043
						Jumlah Psererta didik pada jenjang sekolah Menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	5931		5990	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	100	9.374.257.394	100	9.236.305.144,88
						Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	100		100	
						Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	100		100	
						Angka Putus Sekolah PAUD	%	100		100	
						Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	%	100		100	
						Angka Kelulusan PAUD	%	100		100	
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Presentase sekolah PAUD yang memiliki pagar sekolah	%	50	2.272.730.408	100	619.454.608,16
						Presentase sekolah PAUD yang memiliki jamban sekolah	ruang	15			1.500.000.000,00
						Jumlah sekolah PAUD yang memiliki halaman rabat beton	sekolah	2			200.000.000,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ruang	7	815.616.000		870.112.317,00
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Meubeler PAUD	pasang	250	87.474.750		89.249.495,00
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Presentasi pengadaan Perlengkapan PAUD (sarana bermain)	Sekolah	100	599.885.116	100	611.997.702,32
						Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	orang	5.006		5.106	
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Keg. Hari Anak Nasional	Keg.	1	2.154.000.000	1	218.080.000
						Jumlah lembaga PAUD penerima biaya operasional (BPP)	Lembaga	243		75	2.010.000.000,00
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Keg. pemetaan mutu PAUD	Keg.	1	124.999.800	1	52.499.996,00
						Jumlah k/lembaga PAUD yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi	Lembaga	243		1	75.000.000
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD	Org.	141	2.393.040.000	0,0625	2.044.420.800,00
						Jumlah tenaga Pendidik	Org				
						Jumlah Pendidik pada PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini ,kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan Anak usia dini	orang	15		15	
						Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD	orang	371		371	
						Jumlah Kepala sekolahpada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah diploma empat (D-IV)lembaga pemerintah yang berwenang	orang	10		10	
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Keg. peningkatan Mutu PTK pada Satuan Pendidikan PAUD	%	75	76.699.330	100	78.233.987
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	%tase mutu dan Kualitas Program pendidikan anak usia dini	%	75	774.999.990	100	90.499.999,80
						Jumlah Keg. penyusunan kebijakan peraturan lembaga PAUD	Keg.	1		1	50.000.000
						Jumlah Keg. koordinasi dan kerjasama PAUD	Keg.	1		1	
						%tase kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD	%	50		100	
						Jumlah Keg. gebyar PAUD	Keg.	1		1	175.000.000
						%tasi pengetahuan dan keterampilan pengelola PAUD	%	75		100	125.000.000,00
						%tasi sekolah terakreditasi	%	95		100	
						Jumlah Keg. apresiasi bunda PAUD	Keg.	1		1	175.000.000
						Jumlah kegiatan PAUD Holistik	Keg.	1			175.000.000
						Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini terakreditasi					

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
				19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentasi Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	243	74.812.000		76.756.240
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%tasi lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	100	1.090.499.750	100	1.107.579.994,00
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peresentasi proses belajar mengajar Nonformal/Kesetaraan	%	75	61.500.150	100	
						Jumlah Keg. pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket C	Keg.	1		1	25.000.000,00
						Jumlah Keg. pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket B	Keg.	1		1	21.000.000,00
						Jumlah Keg. pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket A	Keg.	1		1	15.600.000,00
						Jumlah Peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar pseserta didik dari pemerintah daerah	orang	86		90	
						Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	orang	216		216	
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%tasi Nonformal/Kesetaraan yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi	%	75	124.999.700	100	127.499.994,00
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	1:28	90.000.000	100	91.800.000,00
						Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	orang	44		44	
						Jumlah Pendidik pada satuan pendidik kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	orang	5		5	
						Jumlah Kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sertifikat pendidik dan sureat tanda tamat bpendidikan dan pelatihann calon kepala sekolah untuk PAUD Formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihann kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	orang	5		5	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem Sekolah Nonformal/Kesetaraan	%tasi Kelembagaan terakreditasi Nonformal/Kesetaraan	%	-	204.999.900	-	
						Jumlah Keg. Kursus dan kelembagaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Keg.	1		1	125.000.000,00
						Jumlah lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengembangkan pendidikan kecakapan hidun	Sekolah	5		5	
						Jumlah Keg. publikasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Keg.	1		1	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah Keg. Hari Aksara Internasional	Keg.	1		1	35.000.000,00
						%tasi pengembangan data dan informasi pendidikan Non formal/Kesetaraan	%	75		100	20.000.000,00
						Jumlah Keg. pengembangan kebijakan pendidikan Non formal/Kesetaraan	Keg.	1		1	25.000.000,00
						Jumlah Keg. pengembangan kebijakan pendidikan Non formal/Kesetaraan	Keg.	1		1	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKM/Nonformal/Kesetaraan yang menerima BOP	PKBM	10	609.000.000	10	621.680.000,00
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	%tase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	%	100	591.432.180	100	771.828.644
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%tasi sekolah yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	-	591.432.180	-	636.828.644
1	1	3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buku	174	500.000.000	-	510.000.000
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru mulok yang mengikuti pelatihan	Org.	174	91.432.180	-	126.828.644
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	%	100	4.610.304.905	100	4.618.179.460,60
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru/Murid Sekolah TK/RA	%	100	4.610.304.905	100	4.618.179.460,60
						Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI	%	100		100	
						Rasio Guru/Murid Sekolah SMP/MTs	%	100		100	
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100		100	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%tasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompetensi	%	75	4.610.304.905	100	
						%tasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sertifikasi	%	75		100	150.000.000,00
						%tasi pembinaan Kelompok Kerja Guru SD/MI	Kelompok	28		100	225.000.000,00
						%tasi pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTs	Kelompok	13		100	125.000.000,00
						Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Org.	15		15	3.388.179.460,00
						Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S2	Org.	15		15	
						%tasi PTK SD/MI, SMP/MTs yang memiliki kemampuan IT	%	75		100	225.000.000,00
						%tasi kepala sekolah dan calon kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs yang memiliki sertifikat kepala sekolah	%	60		100	200.000.000,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Presentase Kepala Sekolah yang telah melewati masa jabatan kedua dan dapat melanjutkan ke masa jabatan ketiga	%	75			50.000.000,00
						%tasi ketersediaan penerima TPG, TKG dan Tamsil	Keg.	2		100	30.000.000,60
						Jumlah tenaga pendidik PAUD yang berkualitas	Org.	75		75	
						%tasi lembaga PAUD yang berkualitas	%	75		100	
						%tasi Pemberdayaan tendik pendidikan non formal	%	75		100	
						%tase perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	-		-	
						%tase kompetensi pustakawan SD/MI dan SMP/MTs	%	75		100	
						Jumlah Keg. pendataan berbasis web	Keg.	1		1	
						Jumlah Keg. pengembangan Dapodik PAUD	lembaga	243		1	225.000.000,00
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	%tase kebudayaan daerah yang dikembangkan	%	100	1.857.007.290	100	1.896.180.145,80
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%tase budaya yang dilestarikan	Keg.	35	942.631.590	35	962.892.631,80
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah OPK yang diidentifikasi	Kec	9	716.999.550	9	89.339.991
						Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival kebudayaan (indonesiana, Gebyar Budaya, Karnafal Budaya)	Keg.	3		3	540.000.000,00
						Jumlah pakaian adat	lembar	12		14	30.000.000,00
						Penjemputan tamu secara adat	Keg.	12		-	72.000.000
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pelaku budaya yang dilatih	Org.	9	225.632.040	9	108.552.640,80
						Jumlah SDM cagar budaya yang ditingkatkan kualitasnya	Org.	3		-	51.000.000
						Jumlah tenaga ahli cagar budaya yang bersertifikat	Org.	3			72.000.000
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%tase kesenian tradisional yang dilestarikan	%	25	384.383.430	100	392.687.668,60
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah sanggar seni yang dikembangkan	sanggar	15	249.383.700	20	254.987.674,00
										12	
										3	
										2	
										-	
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM dan Pratata kesenian (pelatih seni, juru seni, seniman, dewan kesenian daerah)	Keg.	2	134.999.730	-	137.699.995

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat	Lembaga	10	529.992.270	10	540.599.845,40
2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	Lembaga	10	79.999.740	10	81.599.994,80
				2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Desa Budaya yang dibentuk	Desa	9	449.992.530		458.999.850,60
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									74.118.033.030,00		71.699.437.549
Urusan Kesehatan					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap RS terhadap jumlah Penduduk	%	100		100	
						Persentase RS rujukan Tingkat Kabupaten /kota yang terakreditasi	%	100		100	
					Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hami.	%	100		100	
						Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Balita	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100		100	
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100		100	
					Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	%	100		100	
						Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	%	100		100	
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	100		100	
						Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	%	100		100	
						Insidensi TB per 100.000 penduduk	%	100		100	
						Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	%	100		100	
						Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	%	100		100	
						Treatment coverage pada pasien TB	%	100		100	
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	100		100	
						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100		100	
						Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	100		100	
						Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	100		100	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	100		100	
					Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	100		100	
						Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	100		100	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	100		100	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	47.796.621.632	100	45.083.928.573
1	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	80.000.000	100	11.600.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	100	80.000.000	100	6.600.000
1	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	47.042.393.422	100	44.414.801.291
1	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	35.213.033.422	12	32.344.294.091
1	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	11.829.360.000	12	12.070.507.200
1	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	43.000.000	100	50.000.000
1	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	43.000.000	100	-
1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			391.367.550		449.427.351
1	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	70.000.000	100	71.400.000
1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	15.097.310	100	15.401.946
1	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	49.999.390	100	50.999.988
1	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	29.999.850	100	30.599.997
1	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	226.271.000	100	281.025.420
1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	84.864.130	100	-
6	2	1	2,07	6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				84.864.130		
1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	154.996.530	100	158.099.931
1	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	4.996.860	100	5.099.937
1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	149.999.670	100	152.999.993
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	25.099.102.133	0	25.367.562.780
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	7.395.032.573	100	7.287.900.651
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	jumlah puskesmas sesuai standar	Unit	1	1.400.000.000	1	1.428.000.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Unit	1	500.000.000	0	-
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pesentase Ketersediaan Obat, Vaksin	%	100	2.024.376.967	100	2.119.831.806
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pesentase Ketersediaan BHP	%	100	3.420.655.606	100	3.489.068.845
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	prasarana pelayanan kesehatan yang terpelihara dan bermutu	%	100	50.000.000	100	51.000.000
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	17.609.109.560	100	17.979.662.129
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%tase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	349.999.970	100	356.999.999
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM untuk pelayanan antenatal	%	100			
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%tase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	249.999.710	100	254.999.994
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%tase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	74.999.870	100	76.499.997
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%tase Org. usia Produktif (15–59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	74.999.750	100	76.499.995
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%tase Org. usia Produktif (15–59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	59.999.660	100	61.199.993
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%tase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	49.940.000	100	50.998.800
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%tase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	34.820.000	100	50.696.400
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org. Dengan Gangguan Jiwa Berat	%tase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	24.985.000	100	25.499.700
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org. Terduga Tuberkulosis	%tase Org. terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	74.998.000	100	76.499.960
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org. Dengan Risiko Terinfeksi HIV	%tase Org. dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	34.976.400	100	35.699.528
						Jumlah Dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	%	100			
						Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100			
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	49.991.255		50.999.825
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	%	100	49.993.835	100	50.999.877
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	299.999.700	100	305.999.994
						Prevalensi stunting	%	15		12	
						Prevalensi wasting	%	7		5	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%tase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah Raga	%	75	49.961.000	100	50.999.220
						%tase Puskesmas yang melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	%	0		0	
						Jumlah Jamaah Haji yang diukur kebugarannya	%	100		100	
						Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	94	29.992.670	95	30.599.852
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	%tase Penduduk dengan akses air minum yang layak	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	%tase KK dengan akses sanitasi layak	%	100		100	50.999.000
						%tase Desa Yang mendukung penyelenggaraan STBM	%	100		100	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Presentase Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	%	65	99.999.750	70	101.999.995
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	%	55.56			
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	%	100	49.995.625	100	50.999.913
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	%	100	49.996.820	100	50.999.936
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Presentase Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	%	100	49.994.920	100	50.999.898
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	%tase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Pada Balita	%	70	127.996.570	80	130.559.931
						%tase Cakupan Penanganan Kasus Diare	%	100		100	
						%tase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	%	100		100	
						%tase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini Hepatitis B sesuai standar	%	78		80	
						(Annual ParaCite Indeks - API) Malaria Per 1000 Penduduk	%	<1		<1	
						Cakupan Pelayanan Org. dengan Gigitan Hewan Penyebab Rabies (GHPR) sesuai Standar	%	100		100	
						Prevalensi Penderita Kusta	%	<1		<1	
						Prevalensi Kecacangan pada Anak Usia 1 - 12 Tahun	%	<10%		<10%	
						%tase Wanita Usia 30-50 Thn yang dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	%	50		60	
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%tase penduduk miskin yang memiliki jaminan Kesehatan	%	90	14.991.480.000	95	15.291.309.600
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	%	100	99.997.925	100	104.999.896
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Kec./kawasan yang menyelenggarakan Kec./kawasan Sehat	%	100	149.995.750	100	152.999.915
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Operasional Faskes Lainnya	%	100	299.999.850	100	305.999.997
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	%tase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	100	149.998.050	100	152.999.961
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/Pemberian Obat	%	100	29.997.480	100	30.599.950

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%tase Ketersediaan Data dan terintegrasi	%	100	94.960.000	100	100.000.000
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Data	%	100	94.960.000	100	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	Angka	0	49.980.000	0	50.999.600
1	2	3	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	%	100	49.980.000	100	50.999.600
1	2	3	2.02	.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	20.000.000		20.400.000
1	2	3	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	29.980.000		30.599.600
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, U MOT, I RTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	%	90	94.905.700	95	96.898.114
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pesentase TPM yang di periksa dan memenuhi Syarat	%	90	44.918.400	100	45.898.368
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah	Jumlah TPM yang memiliki Sertifikat Laik Higiene	%	90	44.918.400	100	45.898.368
						%tase TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat	%	90		100	
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				49.987.300		50.999.746
1	2	4	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentase Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	%	100	49.987.300	100	50.999.746
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga sehat	%	10	299.999.550	1	305.999.991
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah kebijakan berwawasan kesehatan	%	11	200.000.000	13	204.000.000
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan tema pesan komunikasi informasi edukasi dalam gerakan masyrakat hidup sehat	%	9	200.000.000	10	204.000.000
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	49.999.850	100	50.999.997
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	%	100	49.999.850	100	50.999.997

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	49.999.700	100	50.999.994
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%	100	49.999.700	100	50.999.994
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	%	100	257.589.630	100	265.151.793
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penurunan angka kelahiran total (TFR)	%	100	132.843.300	100	137.656.866
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Presentase pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	1	73.211.320	100	76.464.226
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	%tase Jumlah Sekolah yang telah melaksanakan Pendidikan Kependudukan	%	9	9.977.500	9	10.199.550
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	%tase Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	%	100	49.654.480	100	50.993.090
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk	%	22.5	124.746.330	22.5	127.494.927
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	%tase Jumlah Rumah Data yang terdapat di Kampung KB	%	26	49.850.250	26	50.997.005
2	14	2	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	%tase Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	%	9	24.990.000	9	25.499.800
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	%tase hasil Data informasi keluarga	%	9	24.958.950	9	25.499.179
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	%tase Hasil Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	%	9	24.947.130	9	25.498.943
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	%	100	274.853.345	100	278.997.077
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelayanan KB	%	100	274.853.345	100	278.997.077
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Presenase Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	%	100	24.855.000	100	100.497.100

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	14	03	2,03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			49.999.550		50.999.991
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			74.999.295		76.499.986
2	14	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	%	100	74.999.500		
2	14	03	2,03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Presentase Pembinaan KB/KR di Faskes dan Jaringannya	%	100	50.000.000	100	51.000.000
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	%	67	244.981.040	70	249.899.621
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Keluarga Yang mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	%	100	244.981.040	100	249.899.621
2	14	04	2,01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	3	74.992.040	5	76.499.841
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			99.998.000		101.999.960
2	14	04	2,01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pelaksana/Kader yang sudah mengikuti pelatihan teknis BKB, BKR, BKL, PIKR, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)			69.991.000		71.399.820
Rumah Sakit Umum Daerah Morowali									77.057.815.183,00		78.601.485.661
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%tase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		100	75.057.815.183	100	76.561.485.661
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	34.307.829.357	100	34.993.985.944
1	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	17.191.656.957,00	100	17.535.490.096

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	17.116.172.400	100	17.458.495.848
1	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	250.000.000	100	255.000.000
1	2	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	250.000.000		255.000.000
1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	499.986.000		509.999.720
1	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	499.986.000		509.999.720
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Pelayanan BLUD	%	100%	39.999.999.826	100%	40.799.999.997
1	2	1	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	%	100%	39.999.999.826	100%	40.799.999.997
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia harapan Hidup	%	68%	2.000.000.000	69%	2.040.000.000
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	%	2.000.000.000	%	2.040.000.000
						Jumlah RS rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana,prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	1		1	
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	%	100%	2.000.000.000	100%	2.040.000.000
Rumah Sakit Pratama									11.332.673.095,00		9.916.119.973
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	9.308.896.180	100	7.125.162.392
1	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	30.000.000		34.600.000
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000	1	15.300.000
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000	1	15.300.000
1	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	7.338.474.470	100	5.366.243.958
1	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.026.674.470	12	
1	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	5.311.800.000	12	5.366.243.958
1	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	54.700.000	100	101.094.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	%	100	54.700.000	100	101.094.000
1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	1.067.110.280	100	817.852.206
1	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	15.812.300	100	100.316.246
1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	101	53.276.060	100	26.065.521
1	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	102	121.308.920	100	52.426.178
1	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	103	699.173.640	100	514.983.473
1	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	104	56.693.500	100	31.133.870
1	2	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material	%	105	14.751.860	100	15.295.037
1	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	106	106.094.000	100	77.631.880
1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	470.748.830		609.414.977
1	2	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	379.100.000	100	407.582.000
1	2	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	91.648.830	100	201.832.977
1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	219.000.000	100	43.380.000
1	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.000.000	100	3.060.000
1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	216.000.000	100	40.320.000
1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%		128.862.600		152.577.252
1	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	84.400.000	100	101.688.000
1	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	24.470.000	100	30.489.400
1	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	19.992.600	100	20.399.852
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	%	-	1.916.695.915	-	2.538.815.960
						Angka Kematian Ibu (AKI)	%	-		-	
						Angka Kesakitan	%	39		30	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	Kategori	Kategori D	1.916.695.915	Kategori D	2.538.815.960
						Jumlah RS rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana,prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar					
1	2	2	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	3	572.714.753	2	1.261.695.316
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%tase Kebutuhan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	85	264.000.000	90	255.280.000
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%tase Kebutuhan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	85	47.231.100	90	50.944.622
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%tase Kebutuhan Alat Kesehatan Dan alat Penunjang Medik	%	65	29.909.600	70	25.598.192
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	%tase kebutuhan obat rumah sakit	%	75	609.050.960	80	621.232.040
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pesentase Ketersediaan BHP	%	85	333.589.502	85	292.861.790
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	%	80	60.200.000	85	31.204.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	%	85	107.081.000	90	252.141.620
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktek	%	90	107.081.000	95	252.141.620
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun	%	83	107.081.000	87	252.141.620
Puskesmas Ulunambo									428.760.000,00		4.008.575.200
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	428.760.000	0	4.008.575.200
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	428.760.000	100	4.008.575.200
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	428.760.000	100	4.008.575.200
Puskesmas Kaleroang									299.588.000,00		4.005.991.760
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	299.588.000	0	4.005.991.760
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	299.588.000	100	4.005.991.760
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	299.588.000	100	4.005.991.760

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
Puskesmas Lafeu									390.718.500,00		4.007.814.370
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	390.718.500	0	4.007.814.370
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	390.718.500	100	4.007.814.370
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	390.718.500	100	4.007.814.370
Puskesmas Bahodopi									285.788.200,00		4.005.715.764
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	285.788.200	0	4.005.715.764
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	285.788.200	100	4.005.715.764
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	285.788.200	100	4.005.715.764
Puskesmas Bahomotefe									385.074.440,00		4.007.701.489
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	385.074.440	0	4.007.701.489
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	385.074.440	100	4.007.701.489
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	385.074.440	100	4.007.701.489
Puskesmas Bungku									339.278.300,00		4.006.785.566
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	339.278.300	0	4.006.785.566
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	339.278.300	100	4.006.785.566
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	339.278.300	100	4.006.785.566
Puskesmas Wosu									384.789.536,00		4.007.695.791
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	384.789.536	0	4.007.695.791
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	384.789.536	100	4.007.695.791

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	384.789.536	100	4.007.695.791
Puskesmas Bahonsuai									385.028.600,00		4.007.700.572
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	385.028.600	0	4.007.700.572
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	385.028.600	100	4.007.700.572
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	385.028.600	100	4.007.700.572
Puskesmas Lantula Jaya									386.505.000,00		4.007.730.100
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	386.505.000	0	4.007.730.100
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	386.505.000	100	4.007.730.100
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	386.505.000	100	4.007.730.100
Puskesmas Tanjung Harapan									397.277.100,00		4.007.945.542
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	397.277.100	0	4.007.945.542
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	397.277.100	100	4.007.945.542
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	397.277.100	100	4.007.945.542
Puskesmas Fonuansingko									317.042.350,00		4.006.340.847
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORG.AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	0	317.042.350	0	4.006.340.847
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0		0	
						Angka Kesakitan	%	39		30	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	90	317.042.350	100	4.006.340.847
1	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas	%tase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	100	317.042.350	100	4.006.340.847
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									69.456.698.866,00		4.993.159.246.850
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	%	18,75		20,13	

KODE	Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	m2	4,188		2,500	
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	m2	140		2,500	
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	m	3.779		1,000	
	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	73,2	-	74	
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	30,9	-	32	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	73,2	-	74	
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	12,4	-	14,5	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	71	-	73	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	73	-	74	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan	%	73	-	74	
	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	11,93		13,2	
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KM	36,86		39,02	
	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Dok	2		2	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Dok	1		1	
						Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Dok	1		2	
						Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Dok	1		2	
					Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	-	-	-	-	-
						Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	-	-	-	-	-
						Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	-	-	-	-	-
					Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	-	-	-	-	-
						Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah	-	-	-	-	-
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	8.803.361.649	100	2.560.781.645.727
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	7.629.355.915	100	7.762.103.033
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	5.394.075.915	12	5.501.957.433
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	2.235.280.000	12	2.260.145.600
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	40.750.000		939.747.701
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	%	100	40.750.000	100	25.815.000
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	645.621.740	100	733.525.724
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	14.995.330	100	15.299.907
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	99.302.500	100	101.986.050

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	100	8.842.700	100	5.176.854
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	56.807.560	100	57.944.166
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	54.403.250	100	45.296.515
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	371.675.900	100	318.412.382
1	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	39.594.500	100	40.791.890
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	106.174.000	100	101.373.480
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	9.024.000	100	3.180.480
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	43.200.000	100	44.064.000
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	24.730.000	100	25.224.600
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	29.220.000	100	28.904.400
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	381.459.994	100	2.551.688.138.538
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	71.110.000	100	76.422.200
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	12.000.000	100	15.240.000
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	%	100	199.999.997	100	204.000.000
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	98.349.997	100	101.967.000
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	%tase Sumber Daya Air Dalam Konidisi Baik	%	15.60	8.633.459.325	17.07	1.276.030.326.807
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%taseKeg. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dok.)	%	12,45	4.804.821.650	14,02	1.275.107.182.531
						%tase Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	%	12,66	-	12,66	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir yang dilaksanakan (Dok.)	Dok.	3	-	3	
						Jumlah Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir yang harus dilaksanakan (Dok.)	Dok.	36	-	36	
						Jumlah Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Lahar Drainase Utama Perkotaan yang dilaksanakan (Dok.)	Dok.	1	150.000.000	2	153.000.000
						Jumlah Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Lahar Drainase Utama Perkotaan yang harus dilaksanakan (Dok.)	Dok.	18	-	18	
						Jumlah Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengaman Pantai yang dilaksanakan (Dok.)	Dok.	5	-	5	
						Jumlah Dok. Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengaman Pantai yang harus dilaksanakan (Dok.)	Dok.	25	-	25	
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	%tase Tanggul sungai yang dibangun	%			5	
						Panjang tanggul sungai yang dibangun ditahun-n (M)	M3	857,7	1.476.900.000	1400	1.284.538.000
						Panjang tanggul sungai yang harus dibangun (M)	M			120000	
1	3	2	2.01	17	Pembangunan Breakwater	%tase Breakwater yang dibangun	%			4	
						Panjang Breakwater yang dibangun ditahun-n (M)	M3	1023,2	691.254.050	2000	700.825.081
						Panjang Breakwater yang harus dibangun (M)	M			125000	
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	%tase Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya yang dibangun	%			5	
						Panjang Seawall yang dibangun (M)	M			5719,5	
						Panjang Seawall yang harus dibangun (M)	M3	425,3	1.414.405.200	114390	828.288.104
						Panjang Bangunan Pengaman Pantai lainnya yang dibangun (M)	M			350	
						Panjang Bangunan Pengaman Pantai lainnya yang harus dibangun (M)	M			3000	
						Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (Ha)	Ha	26,40		29,04	
						Panjang Pantai di Kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab (M)	M	2.639.66		2.903.63	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Data prasarana dan sarana pengaman pantai milik pemerintah kab	Dok	13		15	
1	3	2	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	%tase Tanggul Sungai yang direhabilitasi	%			15,18	
						Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi (M)	M3	315,6	415.173.000	2791	461.303.460
						Panjang tanggul sungai yang harus direhabilitasi (M)	M			3294	
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	%tase Normalisasi/ Restorasi Sungai	%			7	
						Panjang Sungai yang dinormalisasi (M)	M3	11915,80	657.089.400	10500	468.141.788
						Panjang Sungai yang harus dinormalisasi (M)	M			150000	
						Panjang Sungai yang direstorasi (M)	M			15000	
						Panjang Sungai yang harus direstorasi (M)	M			150000	
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)	%tase Luas Sawah yang terairi	%	18.75		20.13	
						Luas Sawah Yang terairi	Ha	1982	3.828.637.675	2132	1.269.537.534.586
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	% Panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	65		100	
						% Panjang jaringan irigasi sekunder kondisi baik	%	89,55		89,55	
						%tasi Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	%			10.22%	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun (M)	M	1057,8	2.142.748.100	2500	1.673.551.512
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus dibangun (M)	M			24470	
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	%tase Jaringan Irigasi Pemukaan yang ditingkatkan	%			0,0646	
						Panjang Jaringan Irigasi Pemukaan yang ditingkatkan (M)	M	631,3	907.213.800	4000	923.144.276
						Panjang Jaringan Irigasi Pemukaan yang harus ditingkatkan (M)	M			61907	
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	%tasi Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	%			0,1667	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (M)	M3	70	100.000.000	2500	102.000.000
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus direhabilitasi (M)	M			15000	
1	3	2	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	%tase Bendung Irigasi yang direhabilitasi (DI)	%			0,087	
						Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi (DI)	DI	2	100.000.000	2	102.000.000
						Jumlah Bendung Irigasi yang harus direhabilitasi (DI)	DI			23	
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	%tasi Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan terpelihara (DI)	%			1	
						Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan terpelihara (DI)	DI	10	578.675.775	23	586.573.516

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang harus dioperasikan dan terpelihara (DI)	DI			23	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indeks Kualitas Air Minum	%	6,4	1.634.500.000	12,2	632.871.132.641
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%tase rumah tangga Berakses air minum	%	7,78	1.634.500.000	14,82	632.871.132.641
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	%tase Jumlah Dok. Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis SPAM	%			20	
						Jumlah Dok. Teknis Perencanaan akses Air Minum akan di bangun di tahun-n (Dok)	Dok.	1	350.000.000	1	357.000.000
						Jumlah Dok. Teknis Perencanaan akses Air Minum yang seharusnya	Dok.			5	
						Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten	Unit	1		-	
						Tersusunnya dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	Unit	1		-	
1	3	3	2.01	2	SupervisiPembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	%tase supervisi Pembangunan /Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	%			25	
						Jumlah Supervisi Pembangunan /Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Keg	1	50.000.000	1	51.000.000
						Jumlah Supervisi Pembangunan /Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang seharusnya	Keg			4	
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	%tase Unit Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	%			14,82	
						Jumlah Unit Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan	Unit	6	1.184.500.000		1.023.690.000
						Jumlah Unit Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan yang seharusnya	Unit			19285	
1	3	3	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Bulan	12	50.000.000	12	51.000.000
						Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab Penyelenggara SPAM	tdk ada				
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indeks Kualitas Sanitasi	%	8,32	1.350.400.000	8,63	305.677.163.120
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%tase Rumah Tangga BeraksesSanitasi yang Baik	%	10,49	1.350.400.000	11,05	305.677.163.120
						jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat Dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Unit	1		1	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang telah disusun	Dok.	3	650.000.000	1	663.000.000,00
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit	40	400.400.000	40	608.008.000
						jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	Unit	-		-	
						kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak Ada	-		-	
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit	1	300.000.000	1	306.000.000
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	%tase panjang drainase dalam kondisi baik	%	14,92	3.636.989.281	17,62	18.457.108.401
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%tase pengelolaan sistem drainase	%	14,92	3.636.989.281	17,62	18.457.108.401
						%tase Dok. Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	%			22,22	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dok. Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang akan dibangun	Dok.	3	534.781.000	2	545.695.620
						Jumlah Dok. Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Seharusnya dibangun	Dok.			9	
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tahun	1	251.000.000	1	256.020.000
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Sistem Drainase Lingkungan yang di bangun	M	2600	2.851.208.281	2600	2.297.024.166
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	%tasi Jumlah bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	%	4,92	5.972.810.250	4,92	5.119.456.205
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%tase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	%	4,92	5.972.810.250	4,92	5.119.456.205
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perencanaan Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang direncanakan	%	100		100	
						Jumlah Dok. perencanaan Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang direncanakan	Dok.	1		12	
						Jumlah Dok. perencanaan Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya direncanakan	Dok.	1		1	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						%tase Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum	%	100		100	
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang dibangun	unit	1	5.972.810.250	3	5.119.456.205
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya dibangun	unit	1		61	
						%tase Dok. Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang diawasi	%	13,73		13,73	
						Jumlah Dok. Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang diawasi	Dok.	3		3	
						Jumlah Dok. Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya diawasi	Dok.	51		51	
						%tase Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang direhabilitasi	%	100		100	
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang direhabilitasi	unit	1		1	
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang direhabilitasi	unit	12		12	
						%tase Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang dipelihara dan dirawat	%	5,88		5,88	
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang dipelihara dan dirawat	unit	1		1	
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya dipelihara dan dirawat	unit	17		17	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	100	483.999.680	100	124.235.384.959
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten	%	100	483.999.680	100	124.235.384.959
1	3	9	2.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan danLingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan danLingkungan	Keg	1	53.000.000	1	54.060.000
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan Yang di Pelihara	Unit	4	200.000.000	3	204.000.000
						Rasio Bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Tidak Ada	-		-	
						Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	1		2	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah Bangunan Gedung negara Milik pemerintah Kabupaten yang dipelihara/dirawat	unit	4		4	
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Keg	4	230.999.680	4	235.619.994
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	%tase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	11.14	37.151.639.772	12.57	60.400.466.694
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	%tase jalan dalam kondisi baik (Aspal)	%	6.43	37.151.639.772	7.72	60.400.466.694
						%tase jembatan dalam kondisi baik	%	15.85		17.41	
1	3	10	2.01	4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Kondisi Jalan/Jembatan	Dok.	2	250.000.000		255.000.000
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	%tase Jalan Yang di Bangun	%			13.33	
						Panjang Jalan yang dibangun (KM)	Km		2.633.109.390	20	2.685.771.578
						Panjang Jalan yang seharusnya dibangun (KM)	Km			150	
						Peresentase pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%			7.00	
						Jumlah pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	unit			7	
						Jumlah pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya	unit			100	
						%tase Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%			8.89	
						Jumlah Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	unit			4	
						Jumlah Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya (unit)	unit			45	
						%tase pengadaan alat Berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%			33.33	
						Jumlah pengadaan alat Berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	unit			7	
						Jumlah pengadaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya	unit			21	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						%tase Pemeliharaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%			100	
						Jumlah Pemeliharaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n (unit)	unit			8	
						Jumlah alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya dipelihara (unit)	unit			8	
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	%tase panjang Jalan Yang di rekonstruksi	%			4.10	
						Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km)	Km		17.592.048.500	37.00	17.943.889.470
						Panjang Jalan yang Keseluruhan (Km)	Km			902,25	
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	%tase Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (rusak berat)	%			8.33	
						Panjang jalan yang dipelihara (rusak berat) (KM)	Km		1.000.000.000	2.5	1.020.000.000
						Panjang jalan yang seharusnya dipelihara (rusak berat) (KM)	Km	30		30	
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	%tase panjang Jembatan Yang dibangun	%	12.22		11.11	
						Panjang jembatan yang dibangun (KM)	Km		9.336.520.232	0.1	9.523.250.637
						Panjang jembatan yang seharusnya dibangun (KM)	Km	0,9		0,9	
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	%tase panjang Jembatan Yang diganti	%	16.67		16.67	
						Panjang jembatan yang ganti (KM)	Km		3.190.000.000	0.01	3.253.800.000
						Panjang jembatan yang seharusnya diganti (KM)	Km	0,06		0,06	
1	3	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	%tase panjang batan yang dipelihara secara berkala (rusak berat)	%			30.00	
						Panjang jembatan yang dipelihara secara berkala (rusak berat) (KM)	Km		2.000.000.000	0.03	2.040.000.000
						Panjang jembatan yang seharusnya dipelihara secara berkala (rusak berat)	Km			0.1	
1	3	10	2.01	22	Pemantauan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Jumlah Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan			149.961.650		152.999.233
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Jumlah Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan			1.000.000.000		1.020.000.000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks kualitas jasa konstruksi	%	18,44	193.180.000	18,44	8.389.358.712
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	%tase Jumlah Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	%	16,89	193.180.000	16,89	8.389.358.712
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	%tase Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia	%	16,67		16,67	
						Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia di tahun n (Org.)	Org./ Tahun		193.180.000	20	203.863.600

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang seharusnya(Org.)	Org./ Tahun	120		120	
						Jumlah Pelatihan tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Kabupaten	org			40	
						Jumlah Tenaga kerja konsturksi yang terlatih di wilayah kabupaten	org	10		10	
						Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Tidak Ada	-		-	
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	%tase Jumlah Dok. SOPJasa Konstruksi	%	20	-	20	3.780.557.173
1	3	12	2.04	2	Bimbingan Teknis Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Keg	1			50.000.000
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	18,89	1.596.358.909	13,33	1.197.203.583
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	%tase Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab. Kota. Yang ditetapkan (Dok.)	%	21,11	352.749.915	15,56	359.804.998
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	%tase Jumlah Dok. RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan (Dok.)	%			11,11	
						Jumlah Dok. RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan yang dibuat (Dok.)	Dok.	2	132.949.915	1	135.608.998
						Jumlah Dok. RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan yang harus dibuat (Dok.)	Dok.			9	
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	%tase Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan (Dok.)	%			20	
						Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan (Dok.)	Dok.	1	219.800.000	2	224.196.000
						Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang harus disosialisasikan (Dok.)	Dok.			10	
1	3	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%tase Dok. Materi Teknis RRTR Kabupaten / Kota (%)	%	22,22	799.999.844	11,11	815.999.997
						%tase Jumlah Dok. Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota (%)	%	22,22		11,11	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dok. Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota yang disusun (Dok.)	Dok.	1	799.999.844	4	815.999.997
						Jumlah Dok. Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota yang harus disusun (Dok.)	Dok.	9		9	
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten terhadap RTRW/RDTR(%)	%	14,39	177.679.950	12,58	181.743.599
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	%tase Jumlah rekomendasi Kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah terhadap RTRW/RDTR (%)	%			12,58	
						Jumlah rekomendasi Kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah terhadap RTRW/RDTR yang dibuat ditahun-n (Dok.)	Dok.		24.489.950	40	25.489.799
						Jumlah Kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah terhadap RTRW/RDTR yang telah dibuat (Dok.)	Dok.			318	
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	%tase Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia (%)	%			18,87	
						Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia (Unit)	unit	1	153.190.000	2	156.253.800
						Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang harus tersedia (Unit)	unit			53	
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%tase Luas pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (%)	%	13,33	265.929.200	13,33	221.318.584
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Presentase Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang penataan Ruang Yang Terlaksana	%	100	69.929.400		21.398.588
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	%tase Jumlah Dok. pelaporan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Kesesuaian Ruang (%)	%			13,33	
						Luas Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang dibuat (Dok.)	Dok.	1	195.999.800	40	199.919.996
						Luas Rekomendasi Kesesuaian Ruang (Dok.)	Dok.			300	
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan									50.279.184.994,00		35.465.828.848,56
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	50		50	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	50		50	
					Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	2		2	
					Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak laya huni)	Unit	588		400	
					Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasa Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	90		90	
Urusan Pertanahan					Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	KK	300		300	
						Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang	300		300	
					Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	100		100	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	5.222.350.127,00	100	934.954.276,22
1	4	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100		100	
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	4.538.207.026	100	4.552.651.167
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.731.807.026	12	3.806.443.167
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	806.400.000	12	746.208.000
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	610.143.101,00	100	579.202.862,02
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	16.980.140	100	17.339.603
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	187.313.811	100	148.746.276
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	39.999.400	100	40.799.988

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	14.999.750	100	15.299.995
1	4	1	2.06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	350.850.000	100	357.017.000
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.000.000		
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	24.000.000		
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.000.000		
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	35.000.000		
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	15.000.000		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Perumahan yang Ditetapkan	unit	100	993.351.500	100	990.684.905
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tertangani	%	100	884.092.500	100	878.499.725
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	unit	55	174.986.250	55	178.499.725
						Jumlah unit Rumah korban bencana yang akan dibangun kembali sesuai dengan rencana Aksi	unit	40		60	
						Jumlah unit Rumah korban bencana yang akan dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana Aksi	unit	40		60	
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Perumahan yang Ditetapkan	%	100	709.106.250		
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah khusus dan PSU yang terbangun	unit	40		40	700.000.000
						Jumlah perumahan yang yang terfasilitasi PSU	Kawasan	1		1	
1	04	02	2,04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				9.900.000		10.198.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	4	2	2.03	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban Bencana yang terfasilitasi	Dok	20	9.900.000	20	10.198.000
1	4	2	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%tase Koordinasi dan Sinkronisasi yang terlaksana	%	100	59.862.000	100	61.197.240
1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang harus terlaksana	Keg.	5	59.862.000	5	61.197.240
1	4	2	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				39.497.000		40.789.940
1	4	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terkoordinasinya penerbitan sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung	Keg.	5	39.497.000	5	40.789.940
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	%tase Kawasan Kumuh yang ditetapkan	%	100	29.839.395.350	100	27.836.787.907
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%tase Kawasan Permukiman kumuh yang ditata	Ha	9	39.396.000	9	40.787.920
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	%tase Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	10	39.396.000	10	40.787.920
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	presentase kawasan kumuh yang tertangani	%		29.799.999.350		27.795.999.987
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	588	29.799.999.350	540	27.795.999.987
						Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	588		400	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	%tase lingkungan yang didukung oleh PSU	%	0	12.194.124.017,00	0	3.612.802.480,34
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%tase lingkungan yang didukung oleh PSU	%	0	12.194.124.017,00	0	3.612.802.480,34
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang tersedia	%		12.094.188.767		3.410.803.775
						Jumlah unit rumah yang terfasilitasi	Unit	60		80,00	
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah bantuan PSU yang terealisasi	%		99.935.250		201.998.705
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Masyarakat	Rupiah	7.433.174.375	2.029.964.000,00	8.183.366.813	2.090.599.280,00
						Presentase penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	80		80	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ganti Rugi Lahan Yang terselesaikan	Ha	0	2.029.964.000,00	0	2.090.599.280,00
						Presentase penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	20		25	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	10	5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang ditetapkan untuk diganti rugi	Org.		1.980.000.000	6	2.039.600.000,00
						SK bupati tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absente	Laporan	-		-	
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	Keg.	4	49.964.000	6	50.999.280
Satuan Polisi Pamongpraja									14.595.331.489,00		13.977.326.869
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Traantibun yang dapat diselesaikan	Presentase	0%		0%	
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Presentase	100%		100%	
					Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Prsentase	100%		100%	
						Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Prsentase	100%		100%	
						Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	100%	100%		100%	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	13.966.281.239	100	13.714.745.864
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	13.230.926.179	100	13.503.798.303
1	5	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.469.326.179,00	12	2.518.712.703
1	5	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	10.761.600.000	12	10.985.085.600
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	150.979.160	100	154.019.583
1	5	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	14.995.260	100	15.299.905
1	5	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	20.000.000	100	20.400.000
1	5	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.999.900	100	16.319.998
1	5	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	99.984.000	100	101.999.680
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	529.157.000	100	-

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	5	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang menjadi kebutuhan	%	100	529.157.000	1	
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	35.818.900	100	36.539.978
1	5	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	34.918.900	100	35.621.978
1	5	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	100	918.000
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	19.400.000	100	20.388.000
1	5	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	19.400.000	100	20.388.000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	0	529.059.250	0	160.581.185
						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100		100	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	Kasus	0%	529.059.250	0%	160.581.185
						Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibun dalam Kab/kota yang ditangani	Presentase	100%		100%	
1	5	2	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah operasi kamtibmas yg dilaksanakan dalam 1 Tahun	Keg.	1080	529.059.250	1080	160.581.185
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0%	99.991.000	0%	101.999.820
						Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100%		100%	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu tanggap (Respon time)Penanganan Kebakaran	%	0%	99.991.000	0%	101.999.820
1	5	4	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani dalam 1 Tahun	%	12	99.991.000	12	101.999.820
						Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Pos	4		4	
Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Morowali									7.292.897.688,00		7.224.830.048

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					MENINGKATNYA MANAJEMEN BENCANA YANG TERINTEGRASI PADA FASE PRA BENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	Presentase penanganan pra bencana	%	100		100	
						Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100	
						Presentase penanganan pasca bencana	%	100		100	
						Presentase penanganan pasca bencana	%	80		100	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	4.564.494.508	100	5.057.780.102
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.204.680.399	100	4.572.575.087
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.293.041.479	100	2.338.902.309
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	911.638.920	100	2.233.672.778
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	190.930.000	100	196.368.600
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	190.930.000	100	196.368.600
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	280.420.650	100	286.479.113
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	6.126.950	100	6.304.489
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	54.734.120	100	55.886.392
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	17.025.580	100	17.367.552
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	9.100.000	100	9.282.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	193.434.000	100	197.638.680
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	52.363.459	100	53.446.101
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.000.000	100	3.060.000
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	26.397.599	100	26.926.784
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	19.965.860	100	20.399.317
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	3.000.000	100	3.060.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	836.100.000	100	145.279.800
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	135.990.000	100	145.279.800
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				700.110.000		
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	%tase Desa tangguh Bencana	%	20	2.728.403.180,00	20	2.167.049.946,20
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase penduduk di daerah rawan bencana yang mendapatkan KIE bencana	%	0	973.673.200	0	569.473.464
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang di susun	Dok.	1	391.773.200	1	257.835.464
						Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100		100	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	%	300	581.900.000	400	311.638.000
						Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ancaman bencana	%	30		40	
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penduduk yang mendapat pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	6	1.288.649.270	10	1.122.074.400
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapat layanan Pusdalops	Org. /Keg.	500	999.990.000	500	1.019.999.800
						Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	30		40	
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang mendapat peralatan perlindungan bencana	Org. /paket	1000	103.730.000	500	102.074.600
						Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	30		40	
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				184.929.270		
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%tase penanganan Korban bencana	%	0	466.080.710	0	475.502.082

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%tase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100.000.000	100	102.000.000
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	80		20	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100		100	
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%tase pemenuhan kebutuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	366.080.710	100	373.502.082
DINAS SOSIAL									11.676.403.798,00		21.983.278.558.926
Urusan Sosial					Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan Kemiskinan	%	100		0	
						Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	0		14	
						Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	0		10	
						Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	N/a	N/a		N/a	
					Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	N/a	N/a		N/a	
						Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Kube	18		17	
						Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	KK	7.675		8.675	
						Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	35		35	
						Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang Kesos	Jml Lembaga	1		1	
						Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	N/a	N/a		N/a	
					Terpenuhinyan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100		100	
						Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	%	100		100	
						Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	N/a	N/a		N/a	
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	N/a	N/a		N/a	
						Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Orang	3		5	
						Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	50		50	
						Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	50		50	
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Orang	200		200	
						Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	N/a	N/a		N/a	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.240.209.998	100	21.947.209.828.926
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	2.601.114.328	100	21.925.891.726.926
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.149.554.328,00	18	21.925.454.146.926
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	451.560.000	19	437.580.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	466.025.740	100	247.758.000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		%	100	172.565.560	100	0
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	100	499.570	12	510.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	55.498.160	12	40.800.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	25.000.000	12	25.500.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	212.462.450	12	204.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	16.399.930	100	16.728.000
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.500.000	12	1.530.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	12.000.000	12	12.240.000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	1.999.930	12	2.040.000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	12	918.000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daeran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156.670.000		
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		%	100	156.670.000		0
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	31,5	24.999.180	30,5	21.044.844.000
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Presentase Komunitas Adat Terpencil Yang di Berdayakan	KAT	30	24.999.180	40	25.500.000
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sosial	KAT	15	24.999.180	20	25.500.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	%	25,5	3.327.187.470	9	10.397.982.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti indikator (SPM)	%	18	3.287.187.610	18	10.377.582.000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Org.	700	3.006.000.000	700	1.536.120.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng yang menerima paket Sandang	Org.	200	166.999.410	200	170.340.000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Org.	100	114.188.200	100	153.000.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial yang direhabilitasi Sosial	Org.	33	39.999.860	-	8.518.122.000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bantuan Permakanan	Org.	25	19.999.860	-	20.400.000
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah jiwaPMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bantuan Sandang	Org.	25	20.000.000	-	20.400.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang ditangani	%	98,3	4.954.979.350	98,3	4.530.942.000
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase Anak Terlantar yang dipelihara	%	25	4.455.000.000	25	3.925.980.000
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	Org.	629	4.430.000.000	1000	3.900.480.000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah kecamatan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar	Kecamatan	3	25.000.000	3	25.500.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah yang dikelola	%	100	499.979.350	100	604.962.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir miskin cakupan daerah yang dikelola data.	KK	17.518	499.979.350	17.518	510.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa tanggap darurat	%	100%	93.066.000	100%	94.962.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang dilindungi	%	100	59.966.000	100	61.200.000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana yang mendapat makanan	Orang		29.998.000	100	30.600.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban bencana yang menerima paket sandang	Orang		29.968.000	100	30.600.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	33.100.000	100	33.762.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi Taruna Siaga Bencana	%	100	33.100.000	100	33.762.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				35.961.800		-
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				35.961.800		-
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		%	100	35.961.800		-
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Morowali									6.319.271.333,00		5.171.400.000
Urusan Tenaga Kerja					Meningkatnya harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	97		98,5	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
					Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	org	610		675	
					Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	org	299		315	
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	%	299		315	
Urusan Transmigrasi					Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	%	87		92	
						Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	%	87		92	
3	32	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.679.282.673	100	2.320.500.000
3	32	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.292.711.973	12	28.767.258.625.212
3	32	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.820.271.973,00	12	28.766.774.125.212
3	32	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	472.440.000	12	484.500.000
3	32	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	291.385.950	12	367.200.000
3	32	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	25.000.000		25.500.000
3	32	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	27.130.000	12	25.500.000
3	32	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	39.999.950	12	40.800.000
3	32	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	199.256.000	12	204.000.000
3	32	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	19.989.780	12	71.400.000
3	32	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Pengadaan Mebel	%	100	19.989.780		20.400.000
3	32	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	60.194.970	na	51.000.000
3	32	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	25.200.000	na	24.480.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	32	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	25.000.000	NA	25.500.000
3	32	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	9.994.970	1	10.200.000
3	32	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	15.000.000	4	15.300.000
3	32	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	15.000.000		15.300.000
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan Kompetensi	%	1	1.829.481.200	1	2.121.600.000
						Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi					
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan yang berbasis Kompetensi (JENIS Kompetensi)	Lik	60	1.654.491.600	70	2.142.000.000
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi (Org.)	Org.	500	1.654.491.600	532	1.785.000.000,00
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Swasta YANG Bekerjasama dengan LLK (lembaga)	Angka	2	174.989.600	1	178.500.000
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah peserta pelatihan yang ikut serta dalam pelatihan lembaga swasta (Org.)	Org.	0	174.989.600	1	178.500.000
						Jumlah Pengangguran yang dilatih	Org	320		394	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengannguran terbuka	Angka	1	425.508.490	1	336.600.000
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rasio Penduduk yang bekerja	%	97	175.508.490	97	81.600.000
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Org.	6	45.000.000	7	45.900.000,00
						Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	Org	41277		42500	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Bursa Kerja yang Tersedia	Lokasi	30	130.508.490	40	35.700.000,00
						Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Perusahaan	29		33	
						Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	org	1205		1332	
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TKA dalam Perpanjangan IMTA	%	76	250.000.000	76	255.000.000
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA Dalam Perpanjangan IMTA	Org.	4000	250.000.000	4000	255.000.000
						Jumlah Penempatan Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online SISNAKER	org	1010		1227	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase hubungan industrial yang terselesaikan	%	63	224.999.950	75	229.500.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	100	149.999.950	100	153.000.000
						Presentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	0,3		0,3	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	Dok.	500	75.000.000	5	76.500.000,00
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Penetapan UMK dan UMSK	Dok.	1	74.999.950	1	76.500.000,00
						Persentase Perusahaan yang sudah menyusun Struktur skala upah	%	100		100	
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Perburuhan	Kasus	133	75.000.000	160	76.500.000
						Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	0		0	
						Jumlah Mogok Kerja	org	0		0	
						Jumlah Penutupan Perusahaan	org	0		0	
						Jumlah perselisihan antara Serikat Pekerja /Serikat Buruh dalam 1 (satu) perusahaan	org	0		0	
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Perselisihan yang di selesaikan melalui perundingan Tripartit	Kasus	100	75.000.000	120	76.500.000
						Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Lembaga	1		1	
3	32	2			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	%	20	54.999.570	30	56.100.000
3	32	2	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	NA	54.999.570	NA	56.100.000
3	32	2	2.01	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawsan yang berpotensi areal Transmigrasi	Kawasan	1	54.999.570	1	56.100.000
3	32	2	2.01	3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas lahan untuk transmigrasi baru	Ha	NA		NA	
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tanah yang disertifikasi	%	26,5	49.999.800	26,5	51.000.000
						Persentase penempatan transmigran pertahun	%	80		100	
						Jumlah lahan Transmigran yang tersertifikasi	Ha	1023		2946	
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tanah yang disertifikasi	%	80	49.999.800	100	51.000.000
3	32	3	2.01		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah lahan Transmigran yang tersertifikasi	%	88	49.999.800	100	51.000.000,00
				2		Jumlah transmigran baru yang diberikan jadup	Org.	1023		1023	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan	1		1	
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penduduk transmigrasi	%	37,9	54.999.650	46,36	56.100.000
						Persentase ketersediaan sarana dan parasarana transmigrasi	%	15		15	
						Ketersediaan jalan	%	20		20	
						Ketersediaan Jembatan	%	15		20	
						Ketresediaan Bangunan	%	10		5	
3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	luas kawasan tarsnmigrasi yang mandiri	Ha	104595,21	54.999.650	104595,21	56.100.000
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah KK Transmigran yang terbina	Org.	400	54.999.650	500	56.100.000,00
						Jumlah satuan pemukiman yang di bina					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									9.270.490.790,00		4.704.990.639.141
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	19,2 %		20%	
						Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	25%		45%	
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	30%		50%	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks				
						Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		%	35%		75%
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	302		302	
						Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	108		108	
						Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	13		13	
					Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1		1	
						Jumlah Desa Berkembang	Desa	62		70	
						Jumlah Desa Tertinggal	Desa	50		47	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
					Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	73		86	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	5.547.953.050	100	4.700.682.121.686
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	4.986.491.813	100	4.700.210.769.486
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	4.607.291.813	100	4.699.845.650.286
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	379.200.000	100	365.119.200
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	428.559.240	100	354.052.200
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	150.433.700	100	15.810.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	49.337.090	100	45.900.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	19.470.000	100	21.226.200
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	209.318.450	100	204.000.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	27.929.997	100	22.848.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	27.029.997	100	20.400.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	100	918.000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	104.972.000	100	276.515.145
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	45.500.000	100	47.015.145
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	59.472.000	100	-
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan	%	100	75.000.000	100	76.500.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah, swasta dan DPRD	Org.	100	75.000.000	100	76.500.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di Desa dan Kelurahan	Org.	100	75.000.000	100	76.500.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100	149.999.650	100	153.000.000
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani					
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan kekerasan	Org.	2	149.999.650	2	153.000.000
						Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	2			
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang dikerjasamakan	Kasus	5	99.999.850	5	102.000.000
						Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	2			
						Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	2			
						Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	Peraturan/ Program	2			
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	5	49.999.800	5	51.000.000
						jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi					
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	%	50	49.999.720	50	51.000.000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga pra sejahtera	Keluarga	50	49.999.720	50	51.000.000
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga pra sejahtera yang dibina	Keluarga	50	49.999.720	50	51.000.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota layak Anak	Lembaga	46	241.236.650	50	246.061.455
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas umum yang menyediakan hak anak	Fasilitas	50	241.236.650	50	246.061.455
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan tentang hak anak	Lembaga	50	241.236.650	50	246.061.455

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	49.990.000	100	51.000.000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	Kasus	40	49.990.000	40	51.000.000
						Jumlah Media massa (Cetak, Elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	3			
						Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	1			
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah kasus anak yang tertangani	Kasus	100	49.990.000	100	51.000.000
						Jumlah anak Korban Kekerasan	Org.	8		7	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	persentase peningkatan status desa mandiri	%	8	77.578.100	8	489.600.000
						Persentase pengentasan desa tertinggal	%				
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	10	77.578.100	10	489.600.000
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang berubah statusnya	Desa	32	22.979.000	49	102.000.000
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang tertata	Desa	32	54.599.100	126	40.800.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa	%	22,22	144.986.000	29,37	147.900.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama	Desa	37	144.986.000	43	147.900.000
2	13	3	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	Kerja Sama	20	84.987.000	23	86.700.000
2	13	3	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	Desa	20	59.999.000	23	61.200.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina	%	29,37	1.550.894.270	33,33	1.920.456.000
						Persentase Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina	%	29,37		33,33	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina dan diawasi	Desa	37	1.550.894.270	42	1.920.456.000
						Persentase desa yang dibina & diawasi	Desa	126		126	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi dalam penataan adm desa yang baik	Desa	32	104.918.200	49	51.000.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk hukum desa yang ditetapkan	produk	10	107.709.000	10	25.500.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dok. perencanaan desa	Dok.	126	19.980.000	126	20.400.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)	Desa	126	132.091.480	126	51.000.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa & BPD yang mengikuti bimtek	Org.	252	49.929.260	252	51.000.000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Pendampingan musyawarah Desa	Org.	126	29.857.000	126	107.100.000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan Peraturanaan Desa	Desa	126	112.728.990	126	71.400.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Aktif	Lembaga	42	931.605.000	126	1.186.056.000
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Org.	10	37.679.040	47	25.500.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Cepat Berkembang	Desa	126	24.396.300	126	25.500.000
						Jumlah Desa yang menginput Profil Desa	Desa	126		126	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	%	100	1.382.853.350	100	1.173.000.000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	Lembaga	7	1.382.853.350	7	1.173.000.000
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang memiliki Lembaga Adat	Desa	12	34.997.950,00	17	35.700.000,00
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPMD yang aktif	Lembaga	133	34.993.250,00	133	35.700.000,00
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah BUMDes Yang Sehat	Lembaga	90	49.991.250,00	126	51.000.000,00
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	%	75	29.985.000,00	90	30.600.000,00
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif	Desa	133	1.232.885.900,00	133	1.020.000.000,00
						Jumlah Pokjanal, Posyandu Aktif	Lembaga	133		133	
Dinas Lingkungan Hidup Daerah									12.759.541.545,00		12.390.617.110,10
Urusan Lingkungan Hidup					Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	na		na	
					Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
					Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten, meliputi : a. jumlah Pengurangan timbulan sampah b. Jumlah Penanganan Timbulan Sampah	%	100		100	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.776.027.975,00	100	10.586.802.665,70
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.364.711.330	100	10.030.565.557
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.817.151.330	29	2.873.494.357
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	547.560.000		7.157.071.200
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	194.136.645		198.019.538
2	11	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	39.247.620	12	40.032.632
2	11	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	29.845.425	12	30.442.334
2	11	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	25.043.600	12	25.544.572
2	11	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	100.000.000	146	102.000.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	50.000.000	100	51.000.000
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	50.000.000	100	51.000.000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	67.180.000	12	68.523.600
2	11	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.500.000	12	1.530.000
2	11	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	30.000.000	12	30.600.000
2	11	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	34.780.000	12	35.475.600
2	11	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	5	918.000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	100.000.000	100	102.000.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	100.000.000	47	102.000.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%tase ketersediaan Dok. wajib perencanaan lingkungan hidup	%	0	300.000.000	100	306.000.000
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	%tase Dok. Yang mempersyaratkan KLHS	Dok.	1	300.000.000	0	306.000.000
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dok. Rencana Tata Ruang Yang memiliki KLHS	Dok.	0	300.000.000	0	306.000.000
2	11	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah KRP yang memiliki Dok. KLHS	Dok.	1		0	
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	%	100	222.641.060	100	178.754.999
						Indeks Kualitas Udara	%	100		100	
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	100		100	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%tase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	%	100	155.249.960	100	158.354.999
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan (Tanah, air, udara dan laut)	Sampel	45	155.249.960	50	158.354.999
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%tase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang di Rehabilitasi dan Restorasi	%	30	67.391.100		
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	%tase Peringatan Pencemaran yang diinformasikan	%	30	39.891.100		
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kawasan Yang Tercemar yang direhabilitasi	Kawasan	30	27.500.000		
						Jumlah Kawasan Yang Tercemar yang direstorasi	Kawasan	0			
						Jumlah Daerah Tangkapan Air Yang Terlindungi	meter	1.430			
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	%	100	20.000.000	100	20.400.000
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	%tase Perusahaan yang mengelola Limbah B3	%	100	20.000.000	100	20.400.000
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perusahaan yang mengelola limbah B3	Pelaku Usaha	136	20.000.000	136	20.400.000
						Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan	Dok.	0		0	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	%tase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	%	100	75.000.000	100	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Keg. yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%tase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	%	100	75.000.000	100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	%tase Pejabat Pengawas yang bersertifikasi	%	100		100	
						Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	org	3		3	
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Keg. yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%tase pengawasan terhadap usaha dan/atau Keg. pemilik izin lingkungan dan izin PPLH	%	100	75.000.000	100	
						Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Laporan	4		4	
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%tase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	%	100	50.000.000	100	
						%tase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat	%	100		100	
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan	Penghargaan	3	50.000.000	3	
						Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Keg.	1		1	
2	11	9	2.01	1	Pemberian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan	Penghargaan	3		3	
						Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Keg.	1	50.000.000	1	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%tase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	%	100	50.000.000	100	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%tase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan	%	100	50.000.000	100	
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Yang diselesaikan	Kasus	8	50.000.000	8	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Yang Tertangani	%	100	8.265.872.510	100	1.298.659.445
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	%tase Sampah Yang Terkelola berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) pada Wilayah Layanan	%	100	8.265.872.510	100	1.298.659.445
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat dan atau Organisasi peduli sampah	Orang		6.698.560.000		
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	unit	15	1.567.312.510	15	1.298.659.445
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kab. Morowali									5.315.211.603,00		2.741.405.039.694
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Data				

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	19,79		21,66	
						Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	14,65		12,56	
						Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	14,56		11,81	
						Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%				
						Pemanfaatan data Kependudukan	Data				
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.957.298.169	100	2.740.607.705.694
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.360.211.699	100	2.739.525.791.694
2	12	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.685.211.699	25	2.738.915.933.694
2	12	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	675.000.000	28	609.858.000
2	12	1	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Operator yang mengikuti bimtek terkait pencatatan Sipil			69.076.000		71.400.000
2	12	1	2.04	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Operator SIAK ikut Bimtek	Org.	28	69.076.000	28	71.400.000
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	295.582.970	100	364.803.000
2	12	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	88.687.980	100	153.000.000
2	12	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	29.435.290	50	30.753.000
2	12	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	2.499.700	2000	2.550.000
2	12	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	174.960.000	50	178.500.000
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	114.615.500	100	235.518.000
2	12	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Mebel	%	100	114.615.500	100	153.000.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	97.812.000	100	31.518.000
2	12	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	996.000	150	1.020.000
2	12	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	24.000.000	5000	24.480.000
2	12	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	4.380.000	15	5.100.000
2	12	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	68.436.000	100	918.000
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	20.000.000	100	45.900.000
2	12	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	20.000.000	100	20.400.000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el Persentase kecamatan yang memiliki pelayanan pendaftaran penduduk (%)	%	66,67	277.021.350	66,67	153.000.000
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk memiliki KTP-el	Org.	100	277.021.350	100	153.000.000
						Persentase Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	33,33		33,33	
2	12	2	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok. atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk ber-NIK baru	Org.	2.292	277.021.350	2.292	153.000.000
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran, dan Persentase kecamatan memiliki pelayanan pencatatan sipil (%)	%	8,41	356.606.760	8,41	268.260.000
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pencatatan Sipil	Kecamatan	33,33	57.999.950	33,33	59.160.000
						Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%				
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok. atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan Kelahiran	Org.	7.607	57.999.950	7.607	59.160.000
						Persentase akta perkawinan	%				
						Jumlah Pencatatan Perkawinan	Org. / KK	53		53	
						Persentase akta perceraian	%				
						Persentase akta Kematian	%				
						Penyajian data kependudukan					
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			298.606.810		209.100.000
2	12	3	2.02	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Terkait Pencatatan Sipil			194.525.000		81.600.000

KODE						Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
									Target	Rp	Target	Rp
2	12	3	2.02	7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pendataan terkait Pencatatan Sipil				49.999.850		51.000.000
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				54.081.960		76.500.000
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama + Persentase kecamatan memiliki UPT + Persentase Kecamatan terkoneksi dan teroperasikan SIAK +Persentase urusan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan(%)	Kecamatan	2		627.335.615	2	834.972.000
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama	Lembaga	66,66		430.293.860	66,66	558.348.000
						Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama						
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah kecamatan terolah & tersaji data kependudukannya	Kecamatan	2		430.293.860	2	558.348.000
2	12	4	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kecamatan Memiliki UPT	Kecamatan	2			2	
						Persentase kebutuhan blanko Dok. kependudukan	%			81.189.800		82.824.000
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Hasil Pelaporan terkait pendaftaran penduduk				81.189.800		82.824.000
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi				115.851.955		193.800.000
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kecamatan	2		45.852.240	2	122.400.000
2	12	4	2.03	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Rekapitulasi data kependudukan terkait pendaftaran penduduk				69.999.715		71.400.000
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	%			96.949.709		98.889.000
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil dan Buku data Kependudukan			2.890	96.949.709	2.890	98.889.000
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah rata -rata pertumbuhan penduduk	Org. / KK	9.824		70.649.709	9.824	72.063.000
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Profil Kependudukan	Keg.	1		26.300.000	1	26.826.000
Dinas Perhubungan Daerah										6.471.172.226,00		6.322.966.670
URUSAN PERHUBUNGAN						MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	na		na	
							On Time Performance Layanan Transportasi	na	na		na	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
					TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL	Rasio Konektivitas Nasional					
						Rasio Konektivitas Provinsi					
						Rasio Konektivitas Kabupaten	%	72		75	
					MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Rasio	na		na	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	5.199.823.398,00	22	5.306.439.693
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	4.660.208.883,00	100	4.753.413.063
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	3.193.592.883,00	59	3.257.464.743
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	1.466.616.000,00	94	1.495.948.320
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	148.871.600,00	100	152.202.432
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	104.871.600,00	59	107.072.432
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	44.000.000,00	4	45.130.000
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	175.731.120,00	100	179.519.392
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	4.537.240,00	100	4.630.345
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	114.004.180,00	100	116.486.274
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	100	5.704.930,00	100	5.821.079
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	24.961.270,00	100	25.499.225
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	13.275.500,00	100	13.541.510
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	13.248.000,00	100	13.540.960
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	38.780.460,00	100	39.788.179
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	%	100	27.399.900,00	100	28.049.068
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	11.380.560,00	100	11.739.111

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	36.470.000,00	100	37.225.400
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	24.000.000,00	100	24.480.000
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	12.470.000,00	100	12.745.400
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	139.761.335,00	100	142.795.227
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	24.850.000,00	100	25.497.000
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	99.972.835,00	12	101.999.457
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	14.938.500,00	100	15.298.770
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	%tase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	25	719.002.950,00	25	634.380.059
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%tase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	unit	3	149.844.700,00	3	152.996.894
						%tase ketersediaan Perlengkapan pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	unit	5		5	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan	paket	5	149.844.700,00	5	152.996.894
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang di terbitkan	%	20	4.925.250,00	25	5.098.505
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang diawasi	Tahun	1	4.925.250,00	1	5.098.505
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%tase Jumlah Kendaraan Wajib Uji Keur	%	65	34.877.500,00	75	35.697.550
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Org.	3	14.959.500,00	3	15.299.190
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dikoordinasikan	Keg.	4	19.918.000,00	4	20.398.360
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%tase Rekomendasi/ Persetujuan Andalalin	%	100	4.998.500,00	100	5.099.970
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Penilaian Hasil	Keg.	3	4.998.500,00	3	5.099.970
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Angkutan Org. dan/atau Barang	%	100	514.357.000,00	100	425.287.140

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org./Barang	unit	6	499.479.000,00	12	409.989.580
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org. dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org. dan/atau Barang dikendalikan dan diawasi	Keg.	2	14.878.000,00	2	15.297.560
2	15	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keg. Penertiban	%	100	10.000.000,00	100	10.200.000
2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keg. Penertiban	Keg.	14	10.000.000,00	14	10.200.000
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	%tase Pengelolaan Pelayaran	%	100	552.345.878,00	100	382.146.918
2	15	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Memiliki Izin	Lembaga	10	299.950,00	10	305.999
2	15	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	1500	299.950,00	1500	305.999
2	15	3	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%tase Usaha Angkutan Laut (Org. PerOrg.an atau Badan Usaha) Yang Memiliki Izin	%	100	19.739.950,00	100	20.694.799
2	15	3	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	1500	299.950,00	1500	305.999
2	15	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Keg.	5	19.440.000,00	9	20.388.800
					Penetapan Lintas Penyeberangan dan PersetujuanPengoperasian Kapal dalam	Jumlah Dok. Lintas Penyeberangan yang Ditetapkan	Dok.	1		0	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	15	3	2.06		Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Angkutan Laut (Org. PerOrg.an atau Badan Usaha) yang memiliki Dok. Persetujuan Pengoperasian Kapal	lembar	1200	350.000,00	1200	357.000
2	15	3	2.06	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok. Data dan Informasi Lintas Penyeberangan	Dok.	1	350.000,00	0	357.000
						Jumlah Dok. Persetujuan Pengoperasian Kapal	lembar	1200		1200	
2	15	3	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	%tase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	%	100	15.085.950,00	100	15.601.719
2	15	3	2.08	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	1200	299.950,00	1200	305.999
2	15	3	2.08	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Keg.	3	14.786.000,00	6	15.295.720
2	15	3	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%tase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	%	100	34.383.000,00	100	35.187.660
2	15	3	2.11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Keg. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Keg.	4	34.383.000,00	9	35.187.660
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%tase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	unit/tahun	9	482.137.028,00	9	309.642.741
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	unit/tahun	2	482.137.028,00	7	309.642.740,56
2	15	3	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%tase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	%	100	350.000,00	100	357.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	15	3	2.19	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	1200	350.000,00	1200	357.000
Dinas Komunikasi dan Informatika									7.444.860.018,00		5.616.027.516
Urusan Komunikasi dan Informatika					TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR DIGITAL	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	48 Opd		48 Opd	
					TERLAKSANANYA LAYANAN PEMERINTAH SECARA DIGITAL	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	%	25 OPD		25 OPD	
						Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	%	48 Opd		48 Opd	
					MENINGKATNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar dan	10 Aplikasi	4 Aplikasi		6 Aplikasi	
						Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i> sesuai dengan masterplan	%	10 OPD		15 OPD	
					TERWUJUDNYA PENINGKATAN KOMPETENSI MASYARAKAT DI BIDANG DIGITAL	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan	Orang	20 orang		20 orang	
						Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	50 orang		50 orang	
					MENINGKATNYA PENGUATAN TATA KELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP) DI DAERAH	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Konten	6 Konten		8 Konten	
						Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	60%		60%	
						Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/Kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Sistem Informasi Publik	Aplikasi	5 Konten		5 Konten	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	%	16 Media		16 Media	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.287.947.798	100	2.900.988.012
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	2.649.689.773	100	2.643.683.568
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	1.849.889.773	19	1.886.887.568
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	799.800.000	0	756.796.000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	552.198.025	100	178.963.043
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	156.480.715	12	11.221.854
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	250.734.950	0	57.731.149
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	124.802.000	100	110.010.040
2	16	1	2.06	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	20.180.360	100	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	76.310.000	100	68.396.400
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.596.000	19	1.631.920
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	62.024.000	0	66.764.480
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	12.690.000	1	
2	16	1	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	9.750.000	100	9.945.000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	9.750.000	100	9.945.000
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Program Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	1.824.429.000	100	381.488.580
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			1.824.429.000		381.488.580

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	141.289.000	100	42.825.780,00
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Media Lokal yang mempublikasikan Keg. Pemerintah Daerah	Dok.	4	1.483.140.000	4	134.662.800
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Aplikasi	5 Konten		5 Konten	
						Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	16 Media		16 Media	
						Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten	6 Konten		8 Konten	
						Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan					
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Pelaporan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	%	100	200.000.000	100	204.000.000
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi Informatika	%	100	2.332.483.220	100	2.333.550.924
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi Perangkat Daerah	48	1.836.859.220	48	1.944.710.884
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah OPD Yang Mengelola Website milik Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	48	40.000.000	48	20.800.000
						Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015					
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan internet	Organisasi Perangkat Daerah	48	1.796.859.220	48	1.923.910.884,40

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	48 OPD		48 OPD	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	25 OPD		25 OPD	
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	495.624.000	100	388.840.040
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	%tase Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100	18.600.000	0	15.372.000
						Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	%	48 OPD		48 OPD	
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelola Pusat Data Pemerintahan Daerah			19.875.000		45.397.500
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	48 OPD		48 OPD	
						Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah					
						Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra Kominfo)					
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar					
						Persentase data yang dapat berbagi pakai					
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	unit		90.447.000		121.808.940
						Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Aplikasi	5 Konten		5 Konten	
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kecamatan	9	53.622.000	9	
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Profil Statistik yang dipublikasikan					
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi		313.080.000		206.261.600

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik					
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	%	10 OPD		15 OPD	
						Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Orang	50 OPD		50 OPD	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									13.921.709.453,00		5.813.592.591
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0,74%		0,75%	
					Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	12,74%		16,34%	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.449.218.538	100	3.755.622.113
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.029.299.188	100	3.089.885.173
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.492.779.188	100	2.542.634.773
2	17	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	536.520.000	100	547.250.400
2	17	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100		100	363.565.477
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	359.048.850	100	363.565.477
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	56.375.970	100	57.512.019
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	29.996.360	100	30.599.927
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	19.999.720	100	20.399.994
2	17	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	252.676.800	100	255.053.536
2	17	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	19.970.500	100	20.399.410
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Mebel yang di butuhkan	%	100	19.970.500	100	20.399.410
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	25.900.000	100	26.718.000
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	25.000.000	100	25.500.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	100	1.218.000
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	15.000.000	100	15.300.000
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	15.000.000	100	15.300.000
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		12	0
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	%tase koperasi yang aktif	%	36,36	44.714.000	36,36	50.994.280
						Persentase Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	50%		54,35%	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang aktif	unit	Na	44.714.000	Na	50.994.280
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang bersertifikat (NIK)	unit	20	19.985.000	20	20.399.700
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	unit	22	24.729.000	22	25.494.580
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	%tase koperasi yang sehat	%	45,45	24.985.000	45,45	25.499.700
						Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Propinsi	%	45,45%		50%	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%tase koperasi yang memiliki pertumbuhan omset yang baik	unit	19	24.985.000	19	25.499.700
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat	unit	20	24.985.000	20	25.499.700
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	unit		0		0
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	234.433.720	100	239.122.674
						Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	234.433.720	100	239.122.674
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	100		100	
						Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0		0	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Org.	30	234.433.720	30	239.122.674
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	%tase koperasi yang difasilitasi bantuan modal	%	4,13	5.199.981.000	4,13	1.103.999.620
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	100		100	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal	unit		5.199.981.000		1.103.999.620
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen.	Jumlah Koperasi yang dibina	unit	17	5.199.981.000	17	1.103.999.620
						Jumlah koperasi yang difasilitasi	unit	...			
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	%tase usaha mikro yang naik kelas	%	83,33	1.131.107.890	83,33	1.012.552.158
						Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Rasio	1,039		1,037	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%tase usaha mikro yang diberdayakan	%	2.99	1.131.107.890	2.99	1.012.552.158
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dibina	unit	150	194.910.950	150	53.898.219
						persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	%	100		100	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	unit	15	29.534.000	15	30.590.680
						Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	%	84		84	
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki izin	unit	275	22.608.000	275	25.452.160
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan	Org.	100	854.821.940	100	872.026.439

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah temu koordinasi yang dilaksanakan	Keg.	5	29.233.000	5	30.584.660
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	%tase pelaku usaha mikro yang naik kelas	%	4,98	3.837.269.305	4,98	1.328.276.886
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	unit	100	3.837.269.305	100	1.328.276.886
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	unit		3.837.269.305		1.328.276.886
						Persentase jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	100		100	
						Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		1		1	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									9.604.725.298,00		16.684.493.853
Urusan Penanaman Modal					Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	%	90		95	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	8.016.828.374	100	4.541.032.524
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	2.325.000	100	2.546.500
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100	2.325.000	100	2.546.500
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.414.385.298	100	3.482.743.004
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.604.725.298	100	2.656.819.804
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	809.660.000	100	825.923.200
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	304.710.000	100	508.874.960
2	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	304.710.000	100	55.094.200
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	392.232.990	100	402.844.660
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	46.805.000	100	50.936.100
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	74.997.990	100	76.499.960
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	19.917.000	100	20.398.340

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	18	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	250.513.000	100	255.010.260
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	3.787.005.086	100	25.500.000
2	18	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prersentase Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di butuhkan	%	100	3.787.005.086	100	4.445.740.102
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	101.170.000	100	103.223.400
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	25.000.000	100	25.500.000
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	74.970.000	100	76.499.400
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	1.200.000	100	1.224.000
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	15.000.000	100	15.300.000
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	15.000.000	100	15.300.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%tase PMA yang mendapat kemudahan investasi	%		468.563.474		141.302.125
						%tase PMDN yang mendapat kemudahan investasi	%				
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sub Keg. penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif	%		65.106.250		66.302.125
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PMA yang Bermohon Insentif	PMA		65.106.250		21.302.125
						Jumlah PMDN yang Bermohon Insentif	PMDN				
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi peluang Investasi	Peta		403.457.224		75.000.000
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi secara digital (Peta Digital)	Peta		403.457.224		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	%tase PMA baru yang berinvestasi	%		347.543.000		723.198.683
						%tase PMDN baru Berinvestasi	%				
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Capaian Keg. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%		347.543.000		723.198.683
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Keg. Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor baru yang berminat menanamkan modalnya (PMDN + PMDA)	Investor baru	20	347.543.000	20	354.520.860
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	%tase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	%	95%	433.891.140	95%	368.677.823

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%tase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki SOP	%	95%	433.891.140	95%	368.677.823
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dengan OSS	Jenis Izin	28	273.592.890	28	280.471.858
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	Izin Usaha		49.319.200		50.986.384
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		110.979.050		37.219.581
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi			337.899.310		341.757.986
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	%		337.899.310		341.757.986
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMA	Rupiah		234.616.500		239.692.330
						Jumlah Realisasi Investasi PMDN	Rupiah				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Permasalahan PMA	Kasus		103.282.810		102.065.656
						Jumlah Permasalahan PMDN	Kasus				
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata									8.979.931.361,00		9.056.122.281,80
Urusan Kepemudaan dan Olahraga					Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%				
					Meningkatnya Pemuda yang Berwirausaha	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	%	0		0	
					Meningkatnya Prestasi Olahraga Nasional dan Internasional	Peningkatan Prestasi Olahraga					
Urusan Pariwisata					Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif					
						Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara					
						Kontribusi PDB Pariwisata					
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	5.065.824.032,00	100	5.052.838.235,22
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	4.578.077.812,00	100	4.600.176.708,82
2	19	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	3.797.237.812,00	100	3.873.182.568,82
2	19	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	780.840.000,00	100	726.994.140,00
2	19	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Adminstrasi Pendapatan			14.980.000,00		15.339.600,00
2	19	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	8.440.000,00	1	8.668.800,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	19	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	6.540.000,00	1	6.670.800,00
2	19	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	37.880.000,00	100	40.087.600,00
2	19	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti	Keg.	1	37.880.000,00	1	40.087.600,00
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	249.017.760,00	100	254.455.077,20
2	19	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	1.138.400,00	100	1.210.268,00
2	19	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	32.021.160,00	100	32.731.423,20
2	19	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor	%	100	41.052.750,00	100	41.880.527,00
2	19	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100	15.125.450,00	100	15.439.259,00
2	19	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	9.994.000,00	12	10.199.880,00
2	19	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	Bulan	12	149.686.000,00	12	152.993.720,00
2	19	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi kebutuhan	%	100	76.367.590,00	100	30.597.231,80
2	19	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.506.000,00		
2	19	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Mebel	%	100	29.861.590,00	100	30.597.231,80
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	44.900.870,00	100	45.890.017,40
2	19	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.180.000,00	100	3.253.600,00
2	19	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	29.998.540,00	100	30.599.970,80
2	19	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	5.200.000,00	100	5.354.000,00
2	19	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	6.522.330,00	100	6.682.446,60
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	64.600.000,00	100	66.292.000,00
2	19	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	15.000.000,00	100	15.300.000,00
2	19	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	49.600.000,00	12	50.992.000,00
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Persentase Capaian Kapasitas Daya Saind Kepemudaan	%	2	749.993.660,00	6%	764.999.873,20

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%				
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	5	749.993.660,00	11%	764.999.873,20
2	19	2	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang Mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Pemuda	organisasi	1	749.993.660,00	4	764.999.873,20
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	19	1.464.285.359,00	26%	1.504.285.707,18
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cabang olahraga pada jenjang pendidikan yang dibina	%	100	774.679.469,00	100	790.493.589,38
2	19	3	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah.	Event	1	74.956.000,00	1	76.499.120,00
2	19	3	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana cabang olahraga yang dikembangkan	unit	13	699.723.469,00	148	713.994.469,38
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	%		541.435.890,00	84	560.828.717,80
2	19	3	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	Cabor		401.857.320,00	15	408.037.146,40
2	19	3	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam kejuaraan	Cabor	9	139.578.570,00	15	152.791.571,40
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	cabang olahraga yang dibina	Cabor	9	148.170.000,00	94,74	152.963.400,00
2	19	3	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlit yang berprestasi	orang	0	0,00	35	-
						Jumlah Pelatih Olahraga yang Memiliki Kompetensi di Satuan-satuan Pendidikan.	orang				
2	19	3	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlit berprestasi yang diberikan penghargaan	orang	?	148.170.000,00	44	152.963.400,00
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kegiatan	4	249.999.955,00	3	255.000.000,00
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kegiatan	4	249.999.955,00	3	255.000.000,00
2	19	4	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah event kepramukaan	Event	4	249.999.955,00	2	255.000.000,00
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang memiliki daya tarik	%	0	649.848.595,00	35,5	662.998.516,00
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola	%	0	649.848.595,00	45	662.998.516,00
3	26	2	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata	Desa	1	99.925.800,00	1	101.998.516,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	26	2	2,02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				449.971.195,00		459.000.000,00
3	26	2	2,02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	Kelompok	1	99.951.600,00	1	102.000.000,00
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan Jumlah wisatawan Mancanegara per Kabupaten	%	0	299.982.250,00	2,00	306.000.000,00
						Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	%				
3	26	3	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang	5.300	299.982.250,00	5600	306.000.000,00
						Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	orang				
3	26	3	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri.	Event	1	299.982.250,00	1	306.000.000,00
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata	%	1,0	499.997.510,00	60	509.999.950,20
3	26	4	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku usaha yang dibina	%	7,50	499.997.510,00	96,15	509.999.950,20
3	26	4	2,01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif sektor pariwisata yang dipasarkan	produk	10	199.997.600,00	20	203.999.952,00
3	26	4	2,01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat.	Lokasi	2	299.999.910,00	25	305.999.998,20
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH									4.523.433.252,00		5.210.607.790
Urusan Perpustakaan					Literasi masyarakat meningkat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	orang	2535		2700	
					Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	orang	2535		2700	
Urusan Arsip					Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	%	100		100	
						Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif	Dokumen	25		25	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.737.368.372	100	4.679.913.414
2	24	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.446.313.417	100	3.515.923.688
2	24	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.023.433.417	12	3.083.902.088

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	422.880.000	12	432.021.600
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	175.987.955	100	329.555.759
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	%	100	49.957.900	100	50.999.158
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor	%	100	116.030.355	100	118.356.607
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	9.999.700	100	10.199.994
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	25.097.000	100	25.901.940
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	19.200.000	100	19.584.000
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	4.997.000	100	5.099.940
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	100	1.218.000
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	89.970.000	100	91.799.400
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	12	89.970.000	12	91.799.400
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan binaan dan perpustakaan yang dinilai	%	100	551.064.720	100	390.994.373
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	%	100	346.333.330	100	390.994.373
						Data pustakawan, tenaga teknis perpustakaan	Dok.	50		50	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pengunjung layanan perpustakaan Elektronik	Org./ Tahun	150	49.999.210	200	50.999.984
						Jumlah Katalog judul Buku digital	Buku	25		35	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan binaan dan perpustakaan yang dinilai	%	100	201.338.550		
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	judul	1500	94.995.570	1500	
						Jumlah pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa/Pojok Baca	judul				96.899.911
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten	%	100	204.731.390	100	207.394.480
						Persentase ketermanfaatan perustakaan oleh masyarakat					
						Jumlah Pengunjung Perpustakaan daerah	Org.	5000		5500	
						Jumlah Kunjungan Layanan Perpustakaan Mobil Keliling(sekolah)	Sekolah	...		45	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat Jumlah kunjungan Perpustakaan kapal terapung Jumlah Pegiat Literasi Jumlah Kerjasama (MOU) Perpustakaan Jumlah Keg. sosialisasi dan Budaya Baca kesekolah-sekolah(lomba cerita) & Masyarakat	Desa Kelompok Kerja Sama Tahun	.. 8 15 1	34.999.870	25 13 25 1	35.699.997
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pojok baca/taman baca yang dibangun Jumlah motor perpustakaan keliling Sarana dan prasarana perpustakaan yang dibangun jumlah perpustakaan yang mendapat bantuan	unit unit unit perpustakaan	3 0 0 0	34.724.250	7 5	35.694.485
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Keg. gerakan budaya gemar membaca	Tahun		49.999.870	1	50.999.997
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Perpustakaan		85.007.400		
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (%)	%	100	69.999.960	100	71.399.999
2	23	3	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan di daerah	Dok.	9	69.999.960	9	36.399.999
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara	Dok.	9	69.999.960	9	36.399.999
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Dok. daerah yang diarsipkan	%	100%	34.999.980	100%	50.700.000
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan Jumlah tenaga pengelola arsip dinamis yang di bina Perlindungan dan penyelamatan	% Org./ Tahun	100% 1	34.999.980	100% 1	35.700.000
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara jumlah penelusuran arsip dinamis Sosialisasi/pembinaan arsip dinamis Sarana dan prasana arsip dinamis Jumlah pengawasan internal arsip Bimtek pengelolaan arsip dinamis	Tahun arsip Tahun paket Tahun Tahun	1 1 1 1 1 1	34.999.980	1 1 1 1 1 1	35.700.000
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	%tase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	per tahun	1	130.000.220	1	17.600.004

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	100	100.000.270	100	12.000.005
2	24	3	2.01	1	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan di tetapkan	per tahun	1	100.000.270	1	7.000.005
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip statis yang di musnahkan di kabupaten /kota	per tahun	1	29.999.950	1	5.599.999
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah penilaian & penetapan Autentis Arsip statis yang dinyatakan hilang	per tahun	1	29.999.950	1	5.599.999
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Dinas Perikanan Daerah									19.573.222.743,00		11.313.025.521
Urusan Kelautan dan Perikanan					Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36.430,00		36.730,00	
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	154.123,00		154.734,00	
3	25	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	5.022.959.350	100	4.457.754.894
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	4.389.767.935	100	4.266.912.894
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.307.967.935,00	12	3.374.127.293,6
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	1.081.800.000	12	892.785.600,0
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	576.391.415	100	128.724.000
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	61.200.000	100	62.424.000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	8	49.991.040	8	51.000.000
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor	%	100	68.203.375	100	695.716.806
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	47.100.000	100	15.300.000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	349.897.000	100	357.000.000
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	900.000	100	918.000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	100	918.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	55.900.000	100	61.200.000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	12	55.900.000	12	61.200.000
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	%		10.580.595.050	%	949.358.315
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota				8.805.404.000		181.036.494
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	38.000,00	44.598.000	38.000,00	45.495.000
						Persentase Nelayan Yang mendapat KUSUKA (%)					
						Jumlah KUSUKA yang tercetak	Lembar	1.000,00		1.000,00	
						Jumlah Apartemen Ikan Yang Terbangun	Unit	100,00		100,00	
						Data Rumpun	Buah	200,00		200,00	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB Penerima Sarana Usaha Perikanan Tangkap	KUB	320,00	8.760.806.000	320,00	135.541.494
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.297.439.940		277.950.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mendapatkan Pelatihan Pengetahuan dan Teknologi(Org)	Orang	25,00	149.940.000	25,00	153.000.000,00
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Persentase KUB yang Terbentuk	KUB	30,00	122.499.940	30,00	99.950.000,00
						Jumlah KUB Nelayan yang Terbentuk					
						Jumlah Koperasi Nelayan yang Terbentuk	Kopnel	7,00		7,00	
						Jumlah Kelembagaan Nelayan yang Berkembang	Lembaga	20,00		20,00	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang memperoleh Kartu Asuransi Nelayan (kartu Asuransi)	Kartu	1.500,00	1.025.000.000	1.500,00	25.000.000
						Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah(Sehat) Nelayan yang tercetak (Sertifikat)	Sertifikat	150,00		150,00	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	persentase tempat pelelangan ikan yang operasional			200.525.200		206.415.360
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Perikanan TPI (Ton)	Ton	100	Rp 121.251.000	100	Rp 124.815.360

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana TPI (unit)	Unit	4	Rp 79.274.200	4	Rp 81.600.000
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				277.225.910		283.956.461
3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Standar Pelayanan Operasional (SOP) Pelayanan Penertiban Tanda Daftar Kapal (dokumen)	Kasus	12	49.190.000	12	51.172.227
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal yang memiliki Tanda Daftar Kapal	Unit	1.500	228.035.910	1.500	232.784.234
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				2.368.386.232		4.710.716.052
3	25	04	2.01		Penertiban Izin Usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Persentase Pembudidaya yang Memiliki Izin Usaha Budidaya	%		85.309.890		87.427.352
3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (Ton)	Dok.	4.685	49.769.890	4.685	51.172.227
					Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				35.540.000		36.255.125
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang Terberdayakan (%)	%	27	166.612.100	27	2.460.720.920
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	- Persentase Pokdakan Penerima Modal Usaha (%)	%	20	59.550.100	20	61.200.000

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	25	04	2.02	04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	- Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/keitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)					
						- Jumlah Aparatur Bidang Budidaya Penerima Pelatihan Teknis (orang)	Orang	4	107.062.000	4	109.468.440
						- aplikasi perikanan					
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya yang dikelola (%)	%	56	2.116.464.242	56	2.162.567.780
3	25	04	2.04	01	Penyediaan data informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	Ton	221.931	117.692.000	221.931	127.484.700
						- Persentase Pembudidaya yang Memiliki Kartu Pelaku Usaha Perikanan (%)	%	16		16	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Pokdakan penerima sarana dan prasarana budidaya (%)	%	67	1.818.189.242	67	1.850.000.000
						- Jumlah Sarana Balai Benih Udang yang Tersedia (Unit)	Unitt	1			
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Persentase Pokdakan terpantau	Pokdakan	21	68.541.000	21	69.925.080
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	- Persentase Pembudidaya ikan yang Tersertifikasi (%)	%	200	112.042.000	200	115.158.000
						- Persentase Pembudidaya penerima Asuransi (%)	%	71		71	
3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				59.080.000,00		60.469.000,00
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				59.080.000,00		60.469.000,00
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang memiliki Tanda Daftar Usaha	Dok.	45	59.080.000,00	45	60.469.000,00
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				1.542.202.111,00		1.134.727.260,00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklahasar yang mendapatkan bantuan			61.363.000,00		63.727.260,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	Poklahsar	20	61.363.000,00	20	63.727.260,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Poklahasar yang mendapatkan bantuan			1.480.839.111,00		1.071.000.000,00
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan (ton)	Ton	35	49.588.000,00	35	51.000.000,00
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikana Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bantuan	Poklahsar	20	1.431.251.111,00	20	1.020.000.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									Rp 30.347.015.116,00		Rp 16.249.866.735,45
Urusan Pangan					Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	ton	80		80	
						Persentase daerah rentan rawan pangan	desa	6		7	
						Skor Pola Pangan Harapan	%	87,80		88,00	
					Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	kecamatan	3		3	
Urusan Pertanian					Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung	ha	2000		2000	
						Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Ha	225		225	
						Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Ton/ha	500		500	
						persentase peningkatan produktivitas peternakan	ekor	10.000.000		10.000.000	
					Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Ha	2225		2225	
						Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	kecamatan	9		9	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	13.935.731.435,00	25	13.464.255.619,45
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	13.041.786.495,00	100	13.302.622.224,45
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	9.586.986.495,00	32	9.778.726.224,45

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	3.454.800.000,00	25	3.523.896.000,00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	130.480.000,00	Na	90.781.200,00
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	130.480.000,00	8	90.781.200,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	523.060.440,00	Na	342.496.819,00
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	233.594.710,00	1	45900000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	100	42.873.280	1	43.730.965,00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	18.194.450,00	1	18.558.594,00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	228.398.000,00	1	234.307.260,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	148.102.500,00	%	-
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	12	148.102.500,00	%	-
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	47.302.000,00	100	51.113.424,00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	46.402.000,00	100	50.195.424,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000,00	100	918.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	45.000.000,00	%	45.900.000,00
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	12	45.000.000,00	%	45.900.000,00
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							Rp 231.596.650		Rp 256.354.478
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	29	Rp 152.956.450	31	Rp 174.132.024
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Keanekaragaman Pangan	%	2133.4	Rp 63.928.500	2152	Rp 65.207.539
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Inflasi Bahan Makanan	Dok.	9	Rp 63.928.500	9	Rp 65.207.539
						Ketersediaan protein per kapita	gram	52		52	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
						Ketersediaan energi per kapita	kilogram	2087,4		2100	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	25	Rp 89.027.950	25	Rp 108.924.485
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	konsumsi pangan per kapita	Dok.	88,3	Rp 65.184.630	88,5	Rp 81.803.255
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pengankaragaman Pangan konsumsi Berbasis sumber daya Lokal	Keg.	2	Rp 23.843.320	2	Rp 27.121.230
						Jumlah Keg. Hari Pangan Sedunia	Keg.	1		1	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	%tase daerah rawan pangan tertangani	%	33	Rp 53.594.200	33	Rp 54.666.134
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah data Desa Rawan Pangan	Dok.	2	Rp 53.594.200	2	Rp 54.666.134
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah desa rawan pangan dilihat dalam peta	Dok.	2	Rp 53.594.200	2	Rp 54.666.134
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	%tase pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan diuji	%	32	Rp 25.046.000	32	Rp 27.556.320
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	%tase pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang tersertifikasi	%	4	Rp 25.046.000	4	Rp 27.556.320
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang di awasi dan di uji	Dok.	2	Rp 25.046.000	2	Rp 27.556.320
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							Rp 16.179.687.031		Rp 2.529.256.638
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian (Ton)	%	100	Rp 11.228.470.680	100	Rp 616.080.000
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%tase ketersediaan sarana Pertanian	%	100	Rp 3.519.897.460	100	Rp 616.080.000
						%tase ketersediaan sarana Peternakan	%	100		100	
						%tase sarana pertanian yang diawasi sesuai dengan peruntukanya	%	100		100	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rasio Handtraktor (Unit/Ha)	unit	0	Rp 2.513.567.960	0	Rp 616.080.000
						Rasio RMU (Ton/Unit)	unit	0		0	
						Rasio Combine Harvester (unit/Ha)	unit	0		0	
						Rasio Power Thresher Multi Guna (unit/Ha)	unit	0		0	
						Jumlah Sarana Pertanian yang dibutuhkan	unit	1		1	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Keg. Untuk mendukung sarana Pertanian	Keg.	20	Rp 1.006.329.500	23	Rp -
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu)	presentase ketersediaan bibit dan Pakan unggul dari daerah lain	%	100	Rp 7.708.573.220	100	Rp -

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	27	02	2.06		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Presentase Ketersediaan Benih Unggul	%	100	Rp 7.708.573.220	100	Rp -
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit ternak dari sumber provinsi daerah lain	ekor	14420	Rp 7.708.573.220	14420	Rp -
						Jumlah Bibit Sapi (ekor)	ekor	400		400	
						Jumlah Bibit Ayam Kampung Unggul	ekor	10		10000	
						Jumlah Bibit Babi	ekor	100		100	
						Jumlah Pengadaan Bibit Kambing	ekor	120		120	
						Jumlah Pengadaan Bibit Itik	ekor	3800		3800	
						Jumlah Bibit Ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	ekor	100		100	
						Jumlah Kebutuhan Benih Pertanian Unggul	Kg	400.000		40.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian	ton	-	Rp 4.638.256.090	-	Rp 1.605.545.199
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Sawah yang teraliri	Ha	0	Rp 4.638.256.090	0	Rp 1.605.545.199
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Jaringan Irigasi terseier yang dibangun	Km	180	Rp 793.690.500	200	Rp 847.284.078
						Panjang Jaringan Irigasi tersier yang direhabilitasi	Km	110		150	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Pertanian ke kantong produksi yang dibangun	Km	27	Rp 3.701.491.750	20	Rp 612.000.000
						Panjang Jalan Pertanian ke kantong produksi yang direhabilitasi	Km				
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah dam parit yang dibangun	unit	7	Rp -	5	
						jumlah dam parit yang direhab	unit	0	Rp 143.073.840	12	Rp 146.261.121
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Jumlah Kasus penyakit hewan	%	100	Rp 176.617.411	100	Rp 180.202.839
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wabah Penyakit Hewan Menular (PHM)	%	100	Rp 140.552.940	100	Rp 143.403.738
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi	unit	1		1	
						Jumlah hewan yang di obati	dus	20	Rp 43.454.100	20	Rp 44.361.738
						Jumlah Hewan Menular	ekor	1		1	
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Biosecurity	%	100	Rp 97.098.840	100	Rp 99.042.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik	%	100	Rp 36.064.471	100	Rp 36.799.101
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	%tase pelayanan jasa laboratorium	%	100	Rp 36.064.471	100	Rp 36.799.101
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan	%	60	Rp 136.342.850	65	Rp 127.428.600
					Jumlah Keg. Penyuluh Tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten	Kelompok	0	0			

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%tase Keg. Penyuluhan Pertanian	%	100	Rp 136.342.850	100	Rp 127.428.600
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Presentase Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	%	0	Rp 124.929.900	0	Rp 127.428.600
					Pembinaan kelembagaan Penyuluh Pertanian		%	0		0	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	%tase BPP yang memiliki lahan percontohan	unit	9	Rp 11.412.950	9	Rp -
						%tase BPP yang memiliki sarana dan prasarana	unit	2		2	
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian									6.752.664.668,00		6.737.728.248,95
Urusan Perdagangan					Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas					
					Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha					
					Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	80		80	
					Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	33		33	
					Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	10		10	
					Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	70		70	
					Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	90		90	
					Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	%	5		5	
Urusan Perindustrian					Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	18,5		19,5	
					Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	%	1,17		1,0	
					Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	USD	na		na	
					Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	org	3.042		3.955	
					Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	57 Milyar		70,7 Milyar	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.945.010.415,00	25	3.891.575.163,89
3	30	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.443.954.955,00		3.512.834.054,69
3	30	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.832.674.955,00	32	2.889.328.454,69
3	30	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	611.280.000,00	25	623.505.600,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	30	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	32.484.000,00	Na	20.149.680,00
3	30	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	32.484.000,00	0	20.149.680,00
3	30	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	356.478.750,00	Na	300.449.575,00
3	30	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	30.157.850,00	1	20.603.157,00
3	30	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	56.238.050,00	1	60.826.321,00
3	30	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	20.184.950,00	1	13.903.699,00
3	30	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	40.971.250,00	0	22.069.425,00
3	30	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	208.926.650,00	1	183.046.973,00
3	30	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	50.062.710,00		1.001.254,20
3	30	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Mebeleur Kantor	Paket	1	50.062.710,00	1	1.001.254,20
3	30	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	43.030.000,00	100	41.760.600,00
3	30	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	36.000.000,00	12	34.720.000,00
3	30	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	6.130.000,00	22	6.122.600,00
3	30	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000,00	1	918.000,00
3	30	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	19.000.000,00	100	15.380.000,00
3	30	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	19.000.000,00	100	15.380.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin SIUP, TDP, TDG	%	26	24.998.600,00	26	25.499.972,00
3	30	2	2,01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Izin Toko/Swalayan yang diterbitkan	%	25	24.998.600,00	25	25.499.972,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	30	2	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	terlaksananya pengawasan Pelaku Usaha yang sesuai dengan Izin Usaha.	Toko Swalayan Waralaba	9	24.998.600,00	12	25.499.972,00
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	29	449.992.383,00	32	458.999.847,66
3	30	3	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan yang layak	%	28	449.992.383,00	32	458.999.847,66
						Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerianya					
3	30	3	2,01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi perdagangan yang layak	Pasar	2	449.992.383,00	8	458.999.847,66
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Inflasi Daerah	%	37	299.992.930,00	27	305.999.858,60
3	30	4	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga Eceran Terendah dan Tertinggi	%	38	299.992.930,00	31	305.999.858,60
3	30	4	2,02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah Barang kebutuhan pokok langka yang terpantau.	Jenis Barang	20	149.995.000,00	20	152.999.900,00
3	30	4	2,02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah	Keg	2	149.997.930,00	3	152.999.958,60
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaksanaan Metrologi legal	%	23	179.992.030,00	16	183.599.840,60
3	30	6	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Presentase Pelaku Usaha yang memiliki alat UTTP yang terkalibrasi	%	23	179.992.030,00	16	183.599.840,60
3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Alat UTTP		79.997.950,00	35	81.599.959,00
3	30	6	2,01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Aparatur Kemetrologian yang dilatih	Orang	2	99.994.080,00	0	101.999.881,60
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentasan Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	%	33	99.992.600,00		101.999.852,00
3	30	7	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentasan Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	%	33	99.992.600,00		101.999.852,00
3	30	7	2,01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Dalam Daerah yang di promosikan diluar	Produk	8	99.992.600,00	10	101.999.852,00
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	33	1.654.671.710,00	43	1.668.093.434,20
3	31	2	2,01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Pertumbuhan IKM	%	33	1.654.671.710,00	43	1.668.093.434,20

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM Pangan yang memiliki PIRT dan Sertifikat Halal	IKM	15	149.981.550,00	17	152.999.631,00
						persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan					
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang Terbangun	Unit	2	914.525.860,00		968.290.517,20
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang mendapatkan Pembinaan			515.180.300,00		470.303.606,00
3	31	2	2,01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dok.		74.984.000,00		76.499.680,00
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase Izin Usaha IKM yang dikendalikan	%		49.953.000,00		50.999.060,00
3	31	3	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%		49.953.000,00		50.999.060,00
3	31	3	2,01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang telah memiliki Izin Usaha yang akan diawasi	IKM	40	49.953.000,00	40	50.999.060,00
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Pengelolaan Informasi Data Industri	%	37	48.061.000,00	23	50.961.220,00
3	31	4	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Sarana Sistem Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang tersedia	%	37	48.061.000,00	23	50.961.220,00
3	31	4	2,01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya informasi data yang dapat di publikasikan secara online	IKM	10	48.061.000,00	5	50.961.220,00
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											
Sekretariat Daerah											
Bagian Hukum									2.499.980.915,00		2.549.999.618
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	673.526.915	100	657.386.538
4	1	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	293.280.000		299.145.600

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	293.280.000		299.145.600
4	1	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	108.790.000		92.775.800
4	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	108.790.000		92.775.800
4	1	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	253.406.915		244.204.138
4	1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	79.382.420		81.276.648
4	1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	19.082.645		19.465.653
4	1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.599.850		15.911.997
4	1	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	139.342.000		127.549.840
4	1	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	18.050.000		21.261.000
4	1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Onerasional atau Lapangan	%	100	18.050.000		21.261.000
4	1	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100	persen	1.826.454.000		1.892.613.080
4	1	01	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase inisiatif eksekutif dan legislatif yang menjadi prolegda	100	persen	1.826.454.000		1.892.613.080
4	1	01	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dievaluasi dan difasilitasi	10	Ranperda	1.186.912.000		1.212.764.240
4	1	01	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara yang diselesaikan	3	perkara	521.828.000		557.074.560
4	1	01	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	400	produk hukum	117.714.000		122.774.280
Bagian Organisasi dan Tata Laksana									1.300.111.440,00		1.453.501.930,60
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	1.300.111.440,00		1.453.501.930,60
4	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	208.080.000,00		212.241.600,00
4	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	208.080.000,00		212.241.600,00
4	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	89.999.680,00		91.799.993,60

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kegiatan Sosialisasi yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	89.999.680,00		91.799.993,60
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	145.802.620,00		145.281.817,40
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	68.621.440,00		66.372.428,80
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	29.999.680,00		30.599.993,60
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	31.917.500,00		32.556.115,00
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	15.264.000,00		15.753.280,00
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	11.760.050,00		15.235.201,00
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	11.760.050,00		15.235.201,00
4	1	4	2.13		Penataan Organisasi		%	100	844.469.090,00	100	861.443.616,80
4	1	4	2.02	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang menyusun ANJAB dan ABK Jumlah SOTK dan SKJ	Organisasi Perangkat Daerah	53	449.938.000,00	53	458.998.760,00
4	1	4	2.02	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang menyusun SOP dan SPM	Organisasi Perangkat Daerah	53	124.985.090,00	53	127.499.701,80
4	1	4	2.02	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	%tase Kinerja ASN	%	80	269.546.000,00	90	
						Penyelenggaraan FORKOM	Keg.	0		0	274.945.155,00
Bagian Umum									27.308.950.740,00		25.312.116.512,65
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	27.308.950.740,00		25.312.116.512,65
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	14.468.146.706,00		15.578.999.665,97
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	11.403.986.706,00		12.447.636.465,97
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	3.064.160.000,00		3.131.363.200,00
			2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	107.525.000,00		71.500.500,00
			2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	107.525.000,00		71.500.500,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	2.092.232.370,00		2.137.920.957,40
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	370.469.870,00		377.907.637,40
			2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	100	170.775.000,00		175.524.890,00
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	418.527.500,00		426.900.650,00
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	32.890.000,00		35.657.380,00
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	1.099.570.000,00		1.121.930.400,00
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	5.191.104.930,00		5.843.811.418,60
			2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	4.271.100.000,00		5.085.422.000,00
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	281.442.030,00		125.458.840,60
			2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	638.562.900,00		632.930.578,00
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	2.620.410.082,00		923.881.353,64
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	222.000.000,00		227.340.000,00
4	1		2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	2.398.410.082,00		696.541.353,64
4	1		2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	1.629.531.652,00	100	756.002.617,04
4	1		2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	160.354.152,00	100	579.592.367,04
4	1		2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	72.737.500,00	100	76.450.250,00
4	1		2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	98.000.000,00	100	99.960.000,00
4	1		2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketersediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	1.298.440.000,00		1.300.000.000,00
4	1		2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketersediaan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	1.200.000.000,00		1.200.000.000,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1		2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	%	100	540.000.000,00		540.000.000,00
4	1		2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	%	100	480.000.000,00		480.000.000,00
4	1		2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	%	100	180.000.000,00		180.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat									33.200.000.000,00		25.664.000.000,00
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	499.685.100,00		526.087.652,00
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	345.360.000,00	100	352.267.200,00
				2	Penyediaan Aministrasi Pelakasanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	345.360.000,00	100	352.267.200,00
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	139.325.100,00	100	143.520.452,00
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	14.041.450,00	100	15.280.829,00
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	8.069.350,00	100	8.231.037,00
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	7.000.000,00	100	7.140.000,00
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	110.214.300,00	100	112.868.586,00
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pertahun		15.000.000,00		15.300.000,00
4	1	1	2.09	2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	15.000.000,00	100	15.300.000,00
4	1	2			Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	32.700.314.900,00	100	25.137.912.348,00
4	1	2	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	32.700.314.900,00	100	25.137.912.348,00
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	%	100	32.670.572.900,00	100	25.107.317.508,00
4	1	2	2.02	2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	%	100	14.890.000,00	100	15.297.800,00
4	1	2	2.02	3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	%	100	14.852.000,00	100	15.297.040,00
Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam									1.053.996.800,00		1.131.106.076,00
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	451.731.800,00	100	975.079.936,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	273.000.000,00	100	278.460.000,00
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Aministrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	273.000.000,00	12	278.460.000,00
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	%	162.231.800,00	%	165.744.636,00
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	Paket	1	45.000.000,00	1	45.900.000,00
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	7.499.800,00	100	7.649.996,00
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	99.732.000,00	100	101.994.640,00
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	16.500.000,00	100	16.830.000,00
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	1	16.500.000,00	1	16.830.000,00
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	%	100	602.265.000,00	100	514.045.300,00
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	452.292.000,00	100	361.045.840,00
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Nilai Deviden BPD, PDAM, BLUD,Perusda, PT. NUSantara (Rp)	%	100	251.307.000,00	100	156.026.140,00
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah KUR yang tidak Sehat / Jumlah KUR X 100%	KUR		49.995.000,00		50.999.900,00
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Presentase UMKM yang Taat aturan : total UMKM X 100%	%	100	150.990.000,00	100	154.019.800,00
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan yang terbit pada Tahun N	Dok		149.973.000,00		152.999.460,00
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Presentase Potensi SDA yang Terkelola	%	100	49.981.000,00	100	50.999.620,00
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Prsentase Lingkungan Hidup yang Tredampak	%	100	49.996.000,00	100	50.999.920,00
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Presentase Pelaku Usaha Bidang SDA yang Valid	%	100	49.996.000,00	100	50.999.920,00
Bagian Administrasi Pembangunan									1.450.000.000,00		1.228.752.900,00
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%		550.829.000,00		631.494.380,00
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%		373.320.000,00		380.786.400,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	1		2	Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan		373.320.000,00		380.786.400,00
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	150.219.000,00	100	188.122.180,00
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		15.559.500,00		23.599.320,00
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	%	100	16.491.500,00	100	16.821.350,00
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	12.355.000,00	100	13.933.250,00
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	105.813.000,00	100	133.768.260,00
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	7.140.000,00	100	7.282.800,00
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	7.140.000,00	100	7.282.800,00
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	20.150.000,00	100	15.403.000,00
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	12	20.150.000,00	12	15.403.000,00
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Kinerja OPD	%		899.171.000,00		597.258.520,00
4	1	3	2.02		Administrasi Pembangunan	Persentase capaian tertib administrasi pembangunan	%		899.171.000,00		597.258.520,00
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusnya Standar Biaya Umum Daerah	Dok.		314.220.500,00		156.284.410,00
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja	%		220.258.350,00		254.405.167,00
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	%		364.692.150,00		186.568.943,00
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									2.099.599.840,00		1.326.794.397
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	2.099.599.840,00	100	683.569.397
4	1	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	561.360.000	100	545.827.200
4	1	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	561.360.000	12	545.827.200
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	30.225.000	100	0
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	30.225.000	100	0

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	822.254.840	100	121.421.997
4	1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%		297.282.840		80.945.657
4	1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	%	100	209.600.000	100	19.192.000
4	1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	64.217.000	100	21.284.340
4	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	251.155.000,00	100	
4	1	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan bidang keprotokoleran dan komunikasi pimpinan	%	100	478.500.000		
4	1	01	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan kendaraan dinas operasional lapangan	%	100%	478.500.000		
4	1	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	66.010.000	100	16.320.200
4	1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	66.010.000	100	16.320.200
4	1	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang telah dilaksanakan	%	100	141.250.000	100	643.225.000
4	1	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keprotokolan	%	100	39.550.000	100	350.791.000
4	1	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketersediaan Komunikasi Pimpinan	%	100	39.550.000	100	191.191.000
4	1	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Ketersediaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	%	100	62.150.000	100	101.243.000
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa									1.778.658.000,00		2.105.347.257
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	394.566.000	100	473.501.880
4	1	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak			293.040.000		
4	1	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	orang	35	293.040.000	35	298.900.800
4	1	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%		86.526.000		102.552.000
4	1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%		17.000.000		17.340.000
4	1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%		15.000.000		15.300.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				54.526.000		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%		15.000.000		15.300.000
4	1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%		15.000.000		15.300.000
4	1	03			Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa	hari		1.384.092.000	100	1.412.071.840
4	1	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa	%		1.384.092.000	100	1.412.071.840
4	1	03	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pengelolaan barang dan jasa	%		958.098.000	2	977.265.960
4	1	03	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cakupan ketersediaan layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%		295.094.000	4	301.037.880
4	1	03	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pembinaan dan penyelesaian sengketa	%	100	130.900.000	1	133.768.000
Bagian Pemerintahan									1.599.999.840,00		1.631.845.377
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	912.657.200	100	535.338.524
4	1	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi			191.795.830		78.835.917
4	1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja yang disusun			191.795.830		78.835.917
4	1	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak			277.320.000		275.786.400
4	1	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	orang		277.320.000		275.786.400
4	1	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	7.731.000	100	0
4	1	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	7.731.000	100	0
4	1	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			418.310.370		165.366.207
4	1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan			93.517.000		51.870.340
4	1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor			16.990.220		17.339.804
4	1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.315.150		15.366.303
4	1	01	2,06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan			289.488.000		80.789.760

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	1	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara			17.500.000		15.350.000
4	1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17.500.000		15.350.000
4	1	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan			687.342.640		1.096.506.853
4	1	01	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks administrasi Kewilayahan			620.748.640		985.174.973
4	1	01	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pencapaian Kinerja Kecamatan			140.213.320		52.804.266
4	1	01	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumah Kecamatan yang di mekarkan Jumlah Tapal Batas Kabupaten Pesentase Tapal Batas Kecamatan Persentase Tapal Batas Desa			417.330.000		881.106.600
4	1	01	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan Pesentase OPD yang memiliki SPM Tingkat Netralitas ASN			63.205.320		51.264.106
4	1	01	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama			66.594.000		111.331.880
4	1	01	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang ditindak lanjuti			66.594.000		76.331.880
SEKRETRARIAT DPRD									Rp 22.475.484.346,00		Rp 4.078.593.229
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	Rp 18.526.906.146	100	Rp 4.068.333.229
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	95%	Rp 110.208.000	95%	Rp 5.745.849.725
4	2	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	Rp 110.208.000	95%	
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	95%	Rp 5.744.244.828	95%	Rp 5.745.849.725
4	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 3.341.724.828	12	Rp 3.408.559.325
4	2	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	Rp 2.402.520.000	12	Rp 2.337.290.400
4	2	1	02:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	95%	Rp 9.840.000	95%	
4	2	1	02:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		%	100	Rp 9.840.000	95%	
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	95%	Rp 540.834.200	95%	Rp 556.238.244

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	2	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	Rp 177.542.390	100	153.550.847,80
4	2	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga	%	100	Rp 43.263.000	100	50.677.460,00
4	2	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor	%	100	Rp 31.100.260	100	31.732.515,20
4	2	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100	Rp 24.109.550	100	24.844.041,00
4	2	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	Rp 264.819.000	100	270.433.380,00
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	Rp 760.815.000	100	Rp 860.582.430
4	2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	Rp 3.000.000	100	Rp 3.210.000
4	2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	Rp 298.640.000	100	Rp 304.292.800
4	2	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	Rp 35.710.000	100	Rp 100.714.200
4	2	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	Rp 423.465.000	100	Rp 452.365.430
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%tase Pemenuhan penyelesaian pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95%	Rp 534.762.520		Rp 10.639.994.274
4	2	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Rp 172.500.000		
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	Rp 362.262.520	12	Rp 493.750.986
4	2	2	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%tase Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dalam 1 Tahun	%	100%	Rp 9.931.390.478	100%	Rp 10.136.243.288
4	2	2	2.15	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dlm 1 Tahun	Org.	25	Rp 9.822.615.478	25	Rp 10.019.067.788
4	2	2	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dalam 1 Tahun	pasang	100	Rp 43.775.000	125	Rp 50.875.500
4	2	2	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up DPRD dalam 1 Tahun	Org.	25	Rp 65.000.000	25	Rp 66.300.000
4	2	2	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Indeks Capaian Layanan Administrasi DPRD	%	90%	Rp 894.811.120	95%	Rp 1.017.896.222
4	2	2	2.16	02	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD dalam 1 Tahun	Keg.	30 Kali	Rp 29.412.000	30 Kali	Rp 100.588.240
4	2	2	2.16	03	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dalam 1 Tahun	Keg.	85 Kali	Rp 64.320.000	85 Kali	Rp 101.286.400
4	2	2	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dalam 1 Tahun	Jenis	12	Rp 801.079.120	12	816.021.582,40
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Rancangan Perda yang ditetapkan	%	100%	Rp 3.948.578.200	100%	Rp 4.208.327.274

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	2	3	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang di Hasilkan dalam 1 Tahun	buah	28	Rp 1.079.334.000	30	Rp 1.111.676.400
4	2	3	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas dalam 1 Tahun	buah	28	Rp 179.334.000	30	Rp 183.416.400
	2	3	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Perundang-undangan yang dilakukan pengkajian dalam 1 Tahun			Rp -		Rp 10.260.000
4	2	3	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Perda Inisiatif yang di hasilkan dalam 1 tahun	Perda	4	Rp 900.000.000	5	Rp 918.000.000
4	2	3	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase ketepatan waktu Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan dalam 1 tahun	%	100	Rp 475.999.000	100	Rp 485.518.980
4	2	3	2.02	01	pembahasan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Keg.	1	Rp 83.310.000	1	Rp 84.976.200
4	2	3	2.02	02	pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Keg.	1	Rp 83.310.000	1	Rp 84.976.200
4	2	3	2.02	03	Pembahasan APBD	APBD yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Keg.	1	Rp 92.012.000	1	Rp 93.852.240
4	2	3	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Keg.	1	Rp 92.012.000	1	Rp 93.852.240
4	2	3	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pertanggung jawaban APBD yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Keg.	2	Rp 125.355.000	2	Rp 127.862.100
4	2	3	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	%	90	Rp 180.576.000	95	Rp 184.187.520
4	2	3	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	Keg.	30	Rp 45.144.000	31	Rp 46.046.880
4	2	3	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	Keg.	30	Rp 45.144.000	31	Rp 46.046.880
4	2	3	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonokian yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	Keg.	30	Rp 45.144.000	31	Rp 46.046.880
4	2	3	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Keg.	30	Rp 45.144.000	31	Rp 46.046.880
4	2	3	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Capaian Kinerja Keg. peningkatan kapasitas DPRD	%	85	Rp 829.172.000	85	Rp 791.269.440
4	2	3	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti bimtek dalam 1 tahun	Org.	25	Rp 340.280.000	25	Rp 347.085.600,00
4	2	3	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Pakar dan Tim Ahli dalam 1 tahun	Org.	3	Rp 270.000.000	3	Rp 185.400.000
4	2	3	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dalam 1 tahun	Org.	5	Rp 210.000.000	5	Rp 214.200.000
4	2	3	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD dalam 1 tahun	Dok.	1	Rp 8.892.000	1	Rp 4.623.840
4	2	3	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Aspirasi yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	%	95	Rp 878.640.200	95	Rp 1.066.087.554
4	2	3	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah dalam 1 Tahun	Kali	3 kali	Rp 121.508.750	3 kali	Rp 123.938.925

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
4	2	3	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dok. Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam 1 Tahun	Dok.	3	Rp 34.560.000	3	Rp 4.339.200
4	2	3	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses dalam 1 Tahun	Keg.	2	Rp 722.571.450	3	937.809.429,00
4	2	3	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Presentase fasilitasi Tugas Pimpinan	%	90	Rp 504.857.000	95	Rp 569.587.380
4	2	3	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam 1 Tahun DPRD "	Kali	85	Rp 504.857.000	85	569.587.380,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah									13.123.632.704,00		13.394.268.301
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	7.834.887.714	100	7.925.048.172
5	1	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	9.998.620	100	10.199.972
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	%	100	4.998.960	100	5.099.979
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	100	4.999.660	100	5.099.993
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	5.267.757.417	100	5.330.647.566
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	4.176.892.417	100	4.260.430.266
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	1.085.880.000	100	1.065.117.600
5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%tase Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	100	4.985.000	100	5.099.700
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	4.991.000	100	5.099.820
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100	4.991.000	100	5.099.820
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	510.998.000	100	510.055.510
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	8.222.500	100	-
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	49.427.500	100	50.988.550
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Impementasi Perundang- undangan	Orang		453.348.000		459.066.960
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	1.224.938.177	100	1.080.651.714
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	15.971.160	100	16.319.423

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	276.459.440	100	261.786.829
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	%	100	5.439.500	100	5.548.290
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	248.866.477	100	252.762.140
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%tase Ketersediaan Barang cetakan dan Penggandaan	%	100	73.509.700	100	74.980.194
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	20.000.000	100	20.400.000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	584.691.900	100	438.854.838
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	653.883.250	100	808.197.165
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang menjadi kebutuhan	%	100	371.783.000	100	671.974.660
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase ketersediaan Pengadaan Mebel	%	100	83.300.250	100	82.246.505
5	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prersentase Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di butuhkan	%	100	198.800.000	100	53.976.000
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	91.321.250	100	102.376.425
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	5.721.250	100	15.064.425
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	64.800.000	100	66.096.000
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	19.900.000	100	20.298.000
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	900.000	100	918.000
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	71.000.000	100	77.820.000
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	71.000.000	100	77.820.000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	%	Na	2.018.100.520	Na	1.514.441.626
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah			899.960.350		770.849.487
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dok	1	359.465.250		294.454.505
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	dok	1	59.420.000		205.574.300

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/LintasSKPD	persentase Program RPJMD kedalam RKPD dan renja OPD	%	100	180.383.700		153.607.674
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	persentase Usulan Musrenbang Yang Terakomodir Dalam RKPD	%		70.273.500		57.604.650
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan	dok		75.449.900		6.508.998
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah	dok		154.968.000		53.099.360
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti			188.533.200		-
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan skp	dok	1	188.533.200		
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	%		929.606.970		743.592.139
						Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	%				
						Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	%				
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian perencanaan daerah yang di susun dan dikordinasikan	Dok	1	293.121.400		305.862.428
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	% kerjasama pembangunan yang dilaksanakan	%	2	274.654.000		80.493.080
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase Hasil Monitoring Program dan Keg. Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%		361.831.570		357.236.631
						persentase Capaian Kinerja Program dan Keg. Perangkat Daerah	%				
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan			1.821.966.090		2.275.804.935
5	1	3	3.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			791.482.440		1.224.677.649
5	1	3	3.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pemerintahan	%		80.030.000		123.870.600
						Penjabaran Konsistensi Program, Keg., Sub Keg. RKPD ke dalam APBD Bidang Pemerintahan					
5	1	3	3.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		%		17.670.000		25.353.400

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	1	3	3.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Presentase Hasil Monitoring Program dan Keg. Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%		93.409.000		94.500.680
5	1	3	3.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Pemerintahan	%		81.194.000		86.623.880
5	1	3	3.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan	%		71.524.000		196.608.480
5	1	3	3.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD	%		53.700.500		54.914.010
						persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD					
5	1	3	3.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				183.625.500		188.600.010
5	1	3	3.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				210.329.440		454.206.589
5	1	3	3.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian	%	100	509.428.750	100	519.617.325
5	1	3	3.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Perekonomian	%	100	89.518.000,00	100	91.301.360,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Keg., Sub Keg. RKPD ke dalam APBD Bidang Perekonomian	%	100		100	
5	1	3	3.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Perekonomian	%	100	12.000.000,00	100	12.240.000,00
5	1	3	3.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	%tase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	%	100	86.342.750,00	100	88.070.980,00
5	1	3	3.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	%tase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD	%	100	94.462.000,00	100	96.378.240,00
						%tase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD	%	100		100	
5	1	3	3.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang SDA	%	100	92.301.000,00	100	98.897.520,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Keg., Sub Keg. RKPD ke dalam APBD Bidang SDA	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	1	3	3.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	%tase Konsistensi Program/ Kegiatan RPJMD ke dalam RKPD dan APBD Bidang Sumber Datva Alam	%	100	11.279.000,00	100	10.225.580,00
5	1	3	3.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	%tase Capaian Kinerja Bidang SDA	%	100	53.846.000,00	100	51.421.045,00
5	1	3	3.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	%tase Kesesuain Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD	%	100	69.680.000,00	100	71.082.600,00
						%tase Kesesuaian Pagu Indikatif Antara RPJMD dan RKPD	%	100		100	
5	1	3	3.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur danKewilayahan	Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan			521.054.900		531.509.961
5	1	3	3.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Infrastruktur	%		94.662.000		70.208.640
						Penjabaran Konsistensi Program, Keg., Sub Keg. RKPD ke dalam APBD Bidang Infrastruktur	%				
5	1	3	3.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Infrastruktur	%		8.506.900		34.983.938
5	1	3	3.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	persentase Capaian Kinerja Bidang infrastruktur	%		95.975.000		69.608.500
5	1	3	3.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	persentase Kesesuain Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD	%		110.760.000		109.410.600
						persentase Kesesuaian Pagu Indikatif Antara RPJMD dan RKPD	%				
5	1	3	3.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Kewilayahan	%		82.484.000		57.410.080
5	1	3	3.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Kewilayahan	%		7.917.000		35.506.740
5	1	3	3.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	persentase Capaian Kinerja Bidankewilayahan	%		67.565.000		69.026.800
5	1	3	3.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	persentase Kesesuain Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan	%		53.185.000		85.354.663
						persentase Kesesuain Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Kewilayahan	%				
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	%	100	1.448.678.380	100	1.678.973.568

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	5	2	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	1.101.823.250	100	1.172.036.465
				02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			324.339.680		156.486.794
				05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			62.696.390		151.253.928
				12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	%	100	473.689.170	100	709.473.783
5	5	2	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	%	100	241.098.010	100	154.821.960
5	5	2	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	100	346.855.130	100	306.937.103
5	5	2	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	%	100	346.855.130	100	306.937.103
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									211.522.072.613,00		33.272.327.667,17
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	9.815.425.588,00	100	33.192.544.937,17
5	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	28.370.750,00	100	28.938.515,00
5	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	%	100	17.743.500,00	100	18.098.420,00
5	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12 Bulan	10.627.250,00	12 Bulan	10.840.095,00
5	2	1	2,01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	7.999.998.553,00	100	32.796.356.719,07
5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	4.700.756.953,00	12	29.994.771.887,07
5	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	3.299.241.600,00	12	2.801.584.832,00
5	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	33.715.000,00	100	30.598.400,00
5	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerir	%	100	3.795.000,00		
5	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	-	100	-

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	2	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	29.920.000,00	100	30.598.400,00
5	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	1.149.894.527,00	100	789.951.999,54
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	140.504.410,00	100	33.316.898,20
5	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	291.870.997,00	100	75.837.419,94
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	146.157.400,00	100	129.080.898,00
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	49.412.170,00	100	49.987.263,40
5	2	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	86.476.000,00	100	51.729.520,00
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	435.473.550,00	100	450.000.000,00
5	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	75.000.000,00	100	204.541.083,16
5	2	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	%	100	75.000.000,00	100	1.500.000,00
5	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	199.054.158,00	11 Org	203.041.083,16
5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	119.994.158,00	100	122.399.883,16
5	2	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	22.420.000,00	100	22.868.400,00
5	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	56.640.000,00	100	57.772.800,00
5	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	329.392.600,00	11 Org	60.628.500,00
5	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	106.425.000,00	100	60.628.500,00
5	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerir	%	100	26.710.000,00		
5	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerir	%	100	196.257.600		
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP		WTP	200.894.235.775,00	WTP	2.700.881.195,20
5	2	2	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran		TW	1.733.369.190,00	TW	1.607.543.983,80
5	2	2	2,01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD	%	100%	64.922.000,00	100%	48.243.490,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	2	2	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Kesesuaian Perubahan KUA-PPAS dengan Perubahan RKPD	%	100%	64.922.000,00	100%	48.243.490,00
5	2	2	2,01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Antara RKA dengan KUA-PPAS	%	100%	59.034.950,00	100%	60.215.699,00
5	2	2	2,01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Antara RKA dengan KUA-PPAS	%	100%	59.034.950,00	100%	60.215.699,00
5	2	2	2,01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian Antara DPA dengan APBD	%	100%	85.814.850,00	100%	87.531.297,00
5	2	2	2,01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian Antara DPA dengan APBD	%	100%	85.217.300,00	100%	86.921.846,00
5	2	2	2,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Kesesuaian Antara Program/Kegiatan APBD/ dengan PPA	%	100%	349.824.340,00	100%	276.821.486,80
5	2	2	2,01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Kesesuaian Antara Program/Kegiatan APBD-P/ dengan Perubahan PPA	%	100%	323.858.800,00	100%	259.736.176,00
5	2	2	2,01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			12 Bulan	640.740.000,00	12 Bulan	679.614.800,00
5	2	2	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	%	95%	763.593.570,00	95%	409.735.611,40
5	2	2	2,02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Realisasi Dana Tranfer	%	100%	67.201.440,00	100%	68.545.628,80
5	2	2	2,02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan		6.712 Arsip	39.394.640,00	6.712 Arsip	40.182.832,80
5	2	2	2,02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Temuan Kesalahan SPJ terhadap Jumlah Penerbitan SP2D	org	3.079 ASN	279.927.240,00	3.079 ASN	155.539.744,80
5	2	2	2,02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan BUD/KBUD	Laporan	12 Laporan	123.996.000,00	12 Laporan	126.490.920,00
5	2	2	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	Jumlah Perbub Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan	Dok	12 Dokumen	45.224.250,00	12 Dokumen	14.819.485,00
5	2	2	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				207.850.000,00		4.157.000,00
5	2	2	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu OPD dalam Penyampaian LKPD		TW	1.149.598.750,00	TW	683.601.600,00
5	2	2	2,03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Perbub tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok	1 Dokumen	278.317.000,00	1 Dokumen	335.883.340,00
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dok	2 Dokumen		2 Dokumen	
5	2	2	2,03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok	1 Dokumen	175.517.000,00	1 Dokumen	179.027.340,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	2	2	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Keuangan Pemda (Dokumen)	Dok	54 Dokumen	406.010.000,00	54 Dokumen	133.380.200,00
5	2	2	2,03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penurunan Kesalahan Pencatatan atas Laporan Keuangan	Dok	1 Dokumen	89.036.000,00	1 Dokumen	35.310.720,00
5	2	2	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Tahun	1 Tahun	200.718.750,00	1 Tahun	-
5	2	2	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				197.247.674.265,00		
5	2	2	2,04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1.600.000.000,00		
5	2	2	2,04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				166.995.507.400,00		
5	2	2	2,04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5.000.000.179,00		
5	2	2	2,04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				23.652.166.686,00		
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Aset	%	103,5%	812.411.250,00	103,5%	584.387.705,00
5	2	3	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset	%	103,5%	812.411.250,00	103,5%	584.387.705,00
5	2	3	2,01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	Dok	1 Dok	114.911.800,00	1 Dok	107.210.361,00
5	2	3	2,01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD & RKPMD	Dok	2 Dok	28.344.000,00	2 Dok	28.910.930,00
5	2	3	2,01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset/Barang Milik Daerah (KIB A, B, C, D, E dan F)	Dok	6 Dok	126.288.000,00	6 Dok	119.619.560,00
5	2	3	2,01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Nilai Rill Ekonomis BMD (Rp)		2.862 mly	98.721.550,00	2.862 mly	70.696.026,00
5	2	3	2,01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen lelang BMD		1 Dok	27.497.000,00	1 Dok	28.154.940,00
5	2	3	2,01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD Yang Dimusnakan/ Dihapus	unit	10 Unit	205.745.200,00	10 Unit	194.656.654,00
5	2	3	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen bukti atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Dok	2 Dok	30.904.000,00	2 Dok	31.539.240,00
5	2	3	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Pengelolaan BMD	org	4 Orang	179.999.700,00	4 Orang	3.599.994,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah									17.809.091.681,00		7.857.026.383
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	16.318.878.881	100	7.811.148.473
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	15.365.532.001	100	4.590.362.642
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	13.759.092.001	100	3.150.273.842
5	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	1.606.440.000	100	1.440.088.800
5	02	01	02,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	878.346.880	100	1.126.066.938

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	02	01	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	170.000.000	100	173.400.000
5	02	01	02:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	459.356.880	100	479.187.138
5	02	01	02:06	09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	248.990.000	100	254.979.800
5	02	01	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	75.000.000	100	218.500.000
5	02	01	02:08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	75.000.000	100	76.500.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD			1.490.212.800		1.564.844.256
5	02	04	02:01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi PAD	%	100%	1.490.212.800	100	1.564.844.256
5	02	04	02:01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		objek	10	34.375.000		50.687.500
5	02	04	02:01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		120.000	98.690.950		101.973.819
5	02	04	02:01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Telaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		9 Kec	205.468.100		219.109.362
5	02	04	02:01	04	Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasana Pengelolaan Pajak Daerah		9 Kec	43.895.500		45.877.910
5	02	04	02:01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	9	169.592.550		173.391.851
5	02	04	02:01	06	Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaopran Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaopran Basis Data Pajak Daerah		9 Kec	160.680.000		178.213.600
5	02	04	02:01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak	Objek	852.000	179.995.000		183.599.900
5	02	04	02:01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Adanya Penetapan Wajib Pajak Daerah		9 Kec	20.724.000		21.138.480
5	02	04	02:01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		9 Kec	84.828.000		86.696.560
5	02	04	02:01	10	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah		9 Kec	20.724.000		21.138.480
5	02	04	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah		9 Kec	162.886.000		168.257.720
5	02	04	02:01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak daerah		9 Kec	74.950.000		76.499.000
5	02	04	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		9 Kec	181.288.600		184.955.772
5	02	04	02:01	14	Pembinaan dan Pegawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksanya Pembinaan dan Pegawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		9 Kec	52.115.100		53.304.302
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									8.959.593.645,00		10.460.189.809,97

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	4.677.575.625,00	100	6.422.691.696,77
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	3.642.013.655,00	100	3.716.373.928,57
5	3	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.978.773.655,00	100	3.038.349.128,57
5	3	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	663.240.000,00	100	678.024.800,00
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	25.560.000,00	100	26.731.200,00
5	3	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	25.560.000,00	100	26.731.200,00
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	148.994.000,00	100	1.145.281.499,40
5	3	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	148.994.000,00	100,00	152.162.880,00
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	122.357.970,00	100	993.118.619,40
5	3	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	49.994.560,00	100	50.999.891,20
5	3	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	52.363.510,00	100	53.412.295,20
5	3	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	19.999.900,00	100	20.399.998,00
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	677.820.000,00	100	868.306.435,00
5	3	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di butuhkan	%	100	677.820.000,00	100	794.866.435,00
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	36.000.000,00	100	36.720.000,00
5	3	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	36.000.000,00	100	36.720.000,00
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	24.830.000,00	100	30.496.600,00
1	5	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	20.000.000,00	100	25.400.000,00
2	12	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	4.830.000,00	12	5.096.600,00
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai ANJAB	%	0,02	2.122.135.960,00	0,02	1.781.556.374,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		%	0.92	1.399.409.060,00	0.92	1.441.488.577,60
5	3	2	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang dimutakhirkan datanya (Org.)	Org.	3782	85.000.000,00	3782	86.700.000,00
5	3	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi penerimaan Calon ASN dan PPPK (Formasi)	Formasi	250	374.999.960,00	250	132.499.999,20
						Jumlah dokumen kebutuhan Jabatan Fungsional	Orang	150		150	150.000.000,00
						Prsentase Pejabat Fungsional yang terbina	%	100		100	100.000.000,00
5	3	2	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pangadaan PNS dan PPPK	Jumlah kegiatan Penerimaan CPNS dan PPPK		2	574.999.900,00	2	511.499.998,00
						Jumlah CPNS yang difasilitasi penetapan NIP	Orang	250		250	75.000.000,00
5	3	2	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang terlayani pengurusan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu	Kartu	111	214.411.700,00	111	79.288.234,00
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian (Aplikasi)	Aplikasi	1	149.997.500,00	0	152.999.950,00
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				175.019.820,00		153.500.396,40
5	3	2	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang keluar dan masuk (orang)	Orang	12	100.033.820,00	12	77.000.676,40
						Persentase jabatan struktural yang dimutasi (%)	%	0,12		0,12	-
5	3	2	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang pindah golongan (orang)	Orang	850	74.986.000,00	850	76.499.720,00
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				230.396.780,00		252.100.180,00
5	3	2	2.03	02	Pengelolaan Assesment Center	Persentase Penempatan jabatan struktural sesuai hasil uji kompetensi	%	100	105.009.000,00	100	252.100.180,00
5	3	2	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai ANJAB	%	0,2	125.387.780,00		
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				317.310.300,00		323.764.048,00
5	3	2	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase disiplin ASN	%	0,99	206.663.780,00	0,99	210.799.117,60
5	3	2	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai	Jumlah Aparatur yang menerima Penghargaan	Orang	75	49.900.000,00	75	50.998.000,00
5	3	2	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang dibina	%	100	10.747.000,00	100	10.966.940,00
5	3	2	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	Orang	45	49.999.520,00	45	50.999.990,40
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pertumbuhan SDM ASN	%	2	2.159.882.060,00	2,1	2.255.941.739,20
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat (%)	%	0,4	2.159.882.060,00	0,4	2.255.941.739,20
5	4	2	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti diklat (%)	%	100	2.159.882.060,00	0,4	43.197.641,20
						Persentase CPNS yang mengikuti pra jabatan (%)	%	100		1	1.862.744.098,00
						Persentase pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT (%)	%	100		2	350.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
INSPEKTORAT DAERAH									10.821.156.087,00		15.260.549.378,89
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	9.103.329.487,00	100	11.837.419.506,89
6	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	3.116.000,00	100	3.178.320,00
6	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	100	3.116.000	100	3.178.320,00
6	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	7.297.926.257,00	100	7.443.884.782,29
6	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	6.550.726.257	100	6.681.740.782,29
6	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	747.200.000	100	762.144.000,00
6	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	742.391.000,00	100	1.781.850.730,00
6	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	626.944.000	100	1.626.018.880,00
6	1	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Sosialisasi yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	74.419.000	100	76.031.290,00
6	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	41.028.000	100	41.850.560,00
6	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	518.396.630,00	100	597.677.832,60
6	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	63.241.130	100	64.652.222,60
6	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%	100		100	
6	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	59.955.500,00	100	61.154.610,00
6	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.200.000,00	100	15.504.000,00
6	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	30.000.000,00	100	
6	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	350.000.000,00	100	456.367.000,00
6	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	149.023.500,00	100	1.920.501.970,00
6	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	75.527.000,00	100	245.535.540,00
6	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	%	100	73.496.500,00	100	374.966.430,00

KODE				Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp
6	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	52.326.100,00	%	49.372.872,00
6	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	43.856.100	%	44.733.472,00
6	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	8.470.000,00	%	4.639.400,00
6	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	340.150.000,00	100	40.953.000,00
6	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	30.000.000,00	100	30.600.000,00
6	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	10.150.000,00	100	10.353.000,00
6	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	300.000.000,00	12	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	%	65		65	
					Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindak lanjuti	%	73	1.159.993.950,00	73	2.268.261.649,00
					Persentase Penyelesaian Tindakan lanjut hasil temuan	%	70		70	
					Persentase OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	%	70		70	
6	1	2	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dok.	124	910.000.000,00	124	1.983.569.820,00
6	1	2	2,01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok.	77	200.000.000,00	77	554.000.000,00
6	1	2	2,01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok.	41	200.000.000,00	41	554.000.000,00
6	1	2	2,01	3	Reviu Laporan Kinerja	Dok.	3	80.000.000,00	3	154.300.000,00
6	1	2	2,01	4	Reviu Laporan Keuangan	Dok.	5	80.000.000,00	5	151.600.000,00
6	1	2	2,01	5	Pengawasan Desa	Dok.	8	100.000.000,00	8	271.519.420,00
6	1	2	2,01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kegiatan	1	100.000.000,00	1	106.250.400,00
6	1	2	2,01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kegiatan	5	150.000.000,00	5	191.900.000,00
6	1	2	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dok.	14	249.993.950,00	14	284.691.829,00
6	1	2	2,02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dok.	2	100.000.000,00	2	119.448.000,00
6	1	2	2,02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dok.	5	149.993.950	5	165.243.829,00
					Persentase OPD yang melaksanakan Zona Integritas menuju WBK	%	12,82		12,82	
					Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100		100	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Dokumen Pedoman Pengawasan	%	100	557.832.650,00	100	1.154.868.223,00
						Persentase OPD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan	%	51,28		51,28	
						Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	%	100		100	
6	1	3	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dok.	8	107.836.900,00	8	109.993.638,00
6	1	3	2,01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dok.	3	42.595.800,00	3	43.447.716,00
6	1	3	2,01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dok.	3	65.241.100,00	3	66.545.922,00
6	1	3	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	%	100	449.995.750,00	100	1.044.874.585,00
6	1	3	2,02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah TLHP Kasus Pengaduan Masyarakat	Dok.	20	149.995.950	20	476.623.419,00
6	1	3	2,02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD/ Unit Kerja yang melakukan Asistensi dan Pendampingan	Organisasi Perangkat Daerah	39	100.000.000,00	39	110.450.400,00
6	1	3	2,02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pemenuhan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	99.999.800	4	192.306.096,00
6	1	3	2,02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dok.	3	100.000.000,00	3	265.494.670,00
UNSUR KEWILAYAHAN											
Kecamatan Menui Kepulauan									6.976.992.031,00		-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	6.491.218.031,00		
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	35.620.000,00		
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	5.620.000,00		
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000,00		
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	5.424.316.501,00		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	5.077.206.501,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	329.640.000,00		
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	17.470.000,00		
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan			15.035.000,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	8.500.000,00		
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	6.535.000,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	27.576.250,00		
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	2.846.250,00		
7	1	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	24.730.000		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	328.723.380,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.503.920,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	22.365.200,00		
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%		10.633.510,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	34.778.800,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.991.750,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	112.668.400,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	129.781.800,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	73.174.500,00		
7	1	1	2.07	01.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	38.772.000,00		
7	1	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	24.725.250,00		
7	1	1	2.07	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	%	100	9.677.250,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	25.152.400,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.180.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	11.974.560,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	4.998.320,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	4.999.520,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	561.620.000,00		
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	14.920.000,00		
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	546.700.000,00		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			163.008.000,00		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.756.000,00		
7	1	2	2.01	01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	12.756.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			150.252.000,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	150.252.000,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa			188.810.600,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			188.810.600,00		
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	25	45.080.600,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	143.730.000,00		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			44.696.600,00		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			44.696.600,00		
7	1	4	2.01	01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	21.904.000,00		
7	1	4	2.01	02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan antar Toko Agama	Tahun	1	22.792.600,00		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			89.258.800,00		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			89.258.800,00		
7	1	6	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	?	14.317.600,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	34.980.000,00		
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	25	19.966.200,00		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	25	19.995.000,00		
Kelurahan Ulunambo									999.999.630,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	308.353.710,00	100	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	162.840.000,00	100	-
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	162.840.000,00	12	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	145.513.710,00	100	-
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	16.735.900,00	100	
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	29.969.460,00	100	
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%				
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	17.381.100,00	100	
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	7.420.250,00	100	
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	4.920.000,00	100	
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	69.087.000,00	100	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	%	100	691.645.920,00		-
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				691.645.920,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				491.645.920,00		
Kecamatan Bungku Selatan									4.327.007.237,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.981.622.017,00		
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	30.000.000,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000,00		
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	3.312.967.237,00		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.014.407.237,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	298.560.000,00		
s	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	15.200.000,00		
7	1	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keg.	1	15.200.000,00		
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	6.531.900,00		
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	6.531.900,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	34.200.500,00		
7	1	1	2.05	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	23.280.500,00		
7	1	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	10.920.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	424.490.730,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	238.665.980,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	34.738.750,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.992.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	135.094.000,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	13.078.890,00		
7	1	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	9.867.000,00		
7	1	1	2.07	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	%	100	3.211.890,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	19.985.960,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.086.160,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	11.908.600,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	4.991.200,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	125.166.800,00		
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	89.140.000,00		
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	36.026.800,00		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			122.526.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			122.526.000,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	122.526.000,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa			166.709.700,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			166.709.700,00		
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	26	45.099.700,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	121.610.000,00		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			56.149.520,00		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			56.149.520,00		
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	34.999.520,00		
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	26	21.150.000,00		
Kelurahan Matano									1.000.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	295.976.660,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	144.360.000,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	144.360.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	140.096.660,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.908.160,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	22.264.000,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	31.564.800,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	14.995.700,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	2.904.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	65.460.000,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	11.520.000,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.000.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	8.520.000,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	%	100	704.023.340,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				704.023.340,00		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2.985.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				60.720.000,00		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				640.318.340,00		
Kelurahan Mendui									1.000.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	249.492.250,00	100	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	113.280.000,00	100	-
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	113.280.000,00	12	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	113.090.850,00	100	-

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	21.981.900,00	100	
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	38.754.600,00	100	
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.007.350,00	100	
7	1	1	2.06	08	Facilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	3.475.000,00	100	
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	33.872.000,00	100	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	21.471.400,00	100	-
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.120.000,00	100	
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	8.220.000,00	100	
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	7.175.400,00	100	
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.956.000,00	100	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	1.650.000,00	100	-
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	%	100	1.650.000,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	%	100	750.507.750,00	100	-
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				750.507.750,00		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3.540.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				219.347.600,00		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				527.620.150,00		
Kelurahan Tofoiso									999.794.860,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	335.711.680,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	130.200.000,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	130.200.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	184.383.680,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	1.496.460,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	29.989.680,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	69.999.540,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	10.000.000,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	2.998.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	69.900.000,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	21.128.000,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.000.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	10.200.000,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	4.930.000,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.998.000,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	%	100	664.083.180,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				664.083.180,00		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2.999.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				199.992.180,00		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				461.092.000,00		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan						
Kelurahan Marsaoleh									999.999.839,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	282.831.309,00	100	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	92.040.000,00	100	-
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	92.040.000,00	12	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	143.013.660,00	100	-
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	4.174.500,00	100	

KODE						Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
									Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	53.409.860,00	100	
7	1	1	02.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	25.000.000,00	100	
7	1	1	02.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	10.029.300,00	100	
7	1	1	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	4.500.000,00	100	
7	1	1	2.06	09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	45.900.000,00	100	
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	27.777.649,00	100	-
7	1	1	2.08	01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.000.000,00	100	
7	1	1	2.08	02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	18.241.399,00	100	
7	1	1	2.08	03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	3.690.000,00	100	
7	1	1	2.08	04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.846.250,00	100	
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	20.000.000,00	100	-
7	1	1	2.09	09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	20.000.000,00	12	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	%	100	717.168.530,00		-
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				717.168.530,00		
7	1	3	2.02	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1.686.450,00		
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				715.482.080,00		
Kelurahan Lamberea										999.999.753,00		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	253.020.009,00		
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	113.280.000,00		
7	1	1	2.02	02		Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	113.280.000,00		
7	1	1	2.05			Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	31.200.000,00		
7	1	1	2.05	11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	31.200.000,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	94.726.850,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	30.872.840,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	15.538.760,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	16.475.250,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	3.000.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	28.840.000,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	7.810.859,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	7.810.859,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	6.002.300,00		
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	6.002.300,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	746.979.744,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				746.979.744,00		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3.000.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				193.940.674,00		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				550.039.070,00		
Kelurahan Bungi									1.000.000.000,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	316.296.220,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	161.280.000,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	161.280.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	140.845.620,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	1.635.600,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	45.768.680,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	43.991.440,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	6.113.900,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	9.440.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	%	100	33.896.000,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	14.170.600,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	2.625.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	6.024.000,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	2.546.600,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.975.000,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	%	100	683.703.780,00		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				683.703.780,00		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2.964.000,00		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				11.732.000,00		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				669.007.780,00		
Kecamatan Bungku Tengah									8.987.380.876,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	8.413.586.126,00		
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	3.262.500,00		
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	762.500,00		
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	1.250.000,00		
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	1.250.000,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	7.899.535.386,00		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	7.587.772.886,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	308.400.000,00		
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	3.362.500,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	1.250.000,00		
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	1.250.000,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	2.846.250,00		
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	2.846.250,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	276.578.390,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	67.561.510,00		
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%		4.737.040,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	23.966.440,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	13.337.400,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	19.900.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	147.076.000,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	74.970.000,00		
7	1	1	2.07	11.	Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	%	100	74.970.000,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	49.960.000,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	4.320.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	43.200.000,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	2.440.000,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	105.183.600,00		
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	65.505.000,00		
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	39.678.600,00		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			52.180.300,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.672.500,00		
7	1	2	2.01	01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	12.672.500,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			39.507.800,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	39.507.800,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa			445.066.100,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			445.066.100,00		
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	19	14.743.350,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Kecamatan (kegiatan)	Tahun	1	430.322.750,00		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			36.440.000,00		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			36.440.000,00		
7	1	4	2.01	01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	25.040.000,00		
7	1	4	2.01	02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan antar Toko Agama	Tahun	1	11.400.000,00		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			40.108.350,00		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			40.108.350,00		
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	19.408.350,00		
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	19	20.700.000,00		
Kecamatan Bungku Barat									3.834.565.556,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.458.965.466,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	15.360.760,00		
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	3.024.760,00		
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	6.168.000,00		
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	6.168.000,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	2.791.820.236,00		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.534.565.556,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	253.320.000,00		
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	3.934.680,00		
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	2.080.000,00		
7	1	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keg.	1	2.080.000,00		
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	9.202.000,00		
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	2.992.000,00		
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	6.210.000,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	27.787.650,00		
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	2.846.250,00		
7	1	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	24.941.400,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	225.449.750,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.519.440,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	41.651.100,00		
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%		13.101.970,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	42.423.240,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.400.000,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	9.975.000,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	100.379.000,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	326.669.750,00		
7	1	1	2.07	01.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	300.272.000,00		
7	1	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	26.397.750,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	29.975.320,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.692.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	16.248.120,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	7.753.300,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	4.281.900,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	30.620.000,00		
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	30.620.000,00		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			119.577.640,00		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.964.000,00		
7	1	2	2.01	01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	9.964.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			109.613.640,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	109.613.640,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa			202.211.100,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			202.211.100,00		
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	10	3.150.000,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	199.061.100,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			4.959.000,00		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			4.959.000,00		
7	1	4	2.01	02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan antar Toko Agama	Tahun	1	4.959.000,00		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN			9.975.000,00		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan			9.975.000,00		
7	1	6	2.01	04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional	Keg.	1	9.975.000,00		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			38.877.350,00		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			38.877.350,00		
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	10	8.989.000,00		
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	19.998.350,00		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	10	9.890.000,00		
Kecamatan Bahodopi									5.774.406.173,00		4.750.326.144,91
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	5.232.500.073,00	100	4.478.860.224,91
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	11.069.800,00	100	11.741.396,00
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	1.991.800	1	2.039.836,00
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	4.725.600	1	4.854.512,00
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	4.352.400	1	4.847.048,00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	3.483.684.159,00	100	3.555.479.538,03
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.324.406.359	12	3.390.894.486,03
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	154.200.000	12	158.963.496,00
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	5.077.800	4	5.621.556,00
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	13.963.200,00	100	14.919.264,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	8.160.000	1	9.283.200,00
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	5.803.200	1	5.636.064,00
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	27.841.690	100	386.731.857,40
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	2.846.250	100	2.856.925,00
7	1	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	24.995.440	100	25.499.908,80
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	343.633.880,00	100	355.805.403,60
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.481.000	100	2.569.620,00
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	45.826.890	100	47.329.263,80
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%		19.862.450		20.397.249,00
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	44.958.390	100	45.899.167,80
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	15.002.350	100	15.300.047,00
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	19.967.000	100	20.399.340,00
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	195.535.800	100	203.910.716,00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	88.499.750,00	100	94.024.433,00
7	1	1	2.07	01.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	38.772.000	100	39.547.440,00
7	1	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	42.833.500	100	46.839.108,00
7	1	1	2.07	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	%	100	6.894.250	100	7.637.885,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	48.817.710,00	100	53.469.694,20
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.992.000	100	2.039.840,00
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	36.000.000	100	40.320.000,00
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	4.950.000	100	5.099.000,00
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	5.875.710	100	6.010.854,20

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	1.214.989.884,00	100	389.299.797,68
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	15.000.000	100	15.300.000,00
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	1.199.989.884	12	373.999.797,68
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			87.387.500,00		134.507.750,00
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			87.387.500,00		121.747.750,00
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	87.387.500,00	1	121.747.750,00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa			233.002.600,00		138.660.052,00
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			233.002.600,00		138.660.052,00
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	12	23.980.000	12	24.479.600,00
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Kecamatan (kegiatan)	Tahun	1	209.022.600	1	114.180.452,00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN			191.317.000,00		203.826.340,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan			191.317.000,00		203.826.340,00
7	1	6	2.01	04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional	Keg.	1	191.317.000,00	1	203.826.340,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			30.199.000,00		42.603.980,00
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			30.199.000,00		42.603.980,00
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	19.999.000,00	1	20.399.980,00
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	12	10.200.000,00	10	13.054.000,00
Kecamatan Bumi Raya									3.650.042.948,00		-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.318.497.798,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	11.456.200,00		
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	1.998.500,00		
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	4.760.000,00		
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	4.697.700,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	2.827.019.728,00		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.450.058.478,00		
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	371.490.000,00		
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	5.471.250,00		
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	1.313.100,00		
7	1	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keg.	1	1.313.100,00		
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	11.990.200,00		
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	6.480.000,00		
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	5.510.200,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	48.329.650,00		
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	4.986.650,00		
7	1	1	2.05	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	18.895.000,00		
7	1	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	24.448.000,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	235.497.080,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.513.000,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	49.150.600,00		
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di dibutuhkan	%		6.339.500,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	42.527.480,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	14.999.850,00		
7	1	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	10.000.000,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	109.966.650,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	38.848.120,00		
7	1	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	38.848.120,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	29.045.520,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.187.800,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	17.997.720,00		
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	5.000.000,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.860.000,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	114.998.200,00		
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	15.000.000,00		
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	99.998.200,00		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			125.099.250,00		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.400.000,00		
7	1	2	2.01	01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	11.400.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			113.699.250,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	113.699.250,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa			183.886.900,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			183.886.900,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	13	13.760.000,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	170.126.900,00		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			9.717.500,00		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			9.717.500,00		
7	1	4	2.01	01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	4.979.250,00		
7	1	4	2.01	02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan antar Toko Agama	Tahun	1	4.738.250,00		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN			12.841.500,00		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan			12.841.500,00		
7	1	6	2.01	04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional	Keg.	1	12.841.500,00		
Kecamatan Wita Ponda									3.171.521.054,00		-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	2.804.116.704,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	2.411.001.054,00		
7	1	1	2.02	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.071.521.054,00		
7	1	1	2.02	02.	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	339.480.000,00		
7	1	1	2.02	05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	5.520.000,00		
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	21.871.250,00		
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	16.400.000,00		
7	1	1	2.04	07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	5.471.250,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	26.162.100,00		
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	3.662.100,00		
7	1	1	2.05	09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	22.500.000,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	263.590.560,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.444.550,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	68.879.200,00		
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%		14.895.370,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	58.817.290,00		
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	8.747.900,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	109.806.250,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	37.569.750,00		
7	1	1	2.07	01.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	30.296.000,00		
7	1	1	2.07	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	%	100	7.273.750,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	28.921.990,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	4.200.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	20.880.000,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	3.841.990,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	15.000.000,00		
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	15.000.000,00		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			115.526.750,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			115.526.750,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	115.526.750,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa			211.872.600,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			211.872.600,00		
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	9	3.600.000,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	208.272.600,00		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			4.975.000,00		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			4.975.000,00		
7	1	4	2.01	01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	4.975.000,00		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN			5.130.000,00		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan			5.130.000,00		
7	1	6	2.01	04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandan lokal, regional, dan nasional	Keg.	1	5.130.000,00		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			29.900.000,00		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			29.900.000,00		
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	15.500.000,00		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	9	14.400.000,00		
Kecamatan Bungku Timur									2.677.305.770,00		-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	2.317.492.660,00		
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	6.979.060,00		
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	1.983.150,00		
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	2.499.150,00		
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	2.496.760,00		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	2.053.089.414,00		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	1.677.869.324,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	370.560.000,00		
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	4.660.090,00		
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	6.999.910,00		
7	1	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keg.	1	6.999.910,00		
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	14.879.800,00		
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	8.429.800,00		
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	6.450.000,00		
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	2.846.250,00		
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	2.846.250,00		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	148.890.466,00		
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.425.000,00		
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	36.912.700,00		
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	19.572.766,00		
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	89.980.000,00		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	38.320.000,00		
7	1	1	2.07	01.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	38.320.000,00		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	30.487.760,00		
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	3.600.000,00		
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	24.000.000,00		
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.887.760,00		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	15.000.000,00		
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	15.000.000,00		

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan			112.566.500,00		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.700.000,00		
7	1	2	2.01	01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	12.700.000,00		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			99.866.500,00		
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	99.866.500,00		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa			202.574.040,00		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			202.574.040,00		
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	10	10.032.000,00		
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	192.542.040,00		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			6.989.000,00		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			6.989.000,00		
7	1	4	2.01	02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan antar Toko Agama	Tahun	1	6.989.000,00		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			37.683.570,00		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			37.683.570,00		
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	10	4.315.000,00		
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	19.999.150,00		
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	10	6.417.420,00		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	10	6.952.000,00		
Kecamatan Bungku Pesisir									4.440.413.932,00		3.395.523.023,06

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	4.077.498.832,00	100	3.025.264.721,06
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	%	100	32.023.000,00	100	32.665.460,00
7	1	1	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dok	1	2.025.000,00	1	2.065.500,00
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok	1	14.998.000,00	1	15.299.960,00
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang disusun	Dok	1	15.000.000,00	1	15.300.000,00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100	100	2.494.904.244,00	100	2.544.872.829,30
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.106.714.744,00	12	2.148.849.039,30
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	Bulan	12	380.760.000,00	12	388.375.200,00
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok.	4	7.429.500,00	4	7.648.590,00
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	%	100	17.000.000,00	100	17.340.000,00
7	1	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keg.	1	17.000.000,00	1	17.340.000,00
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	%	100	14.937.080,00	100	15.338.741,60
7	1	1	2.04	05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Keg.	1	8.487.080,00	1	8.669.741,60
7	1	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Retribusi Daerah	Keg.	1	6.450.000,00	1	6.669.000,00
7	1	1	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	%	100	27.881.250,00	100	28.571.465,00
7	1	1	2.05	01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	2.981.250,00	100	3.073.465,00
7	1	1	2.05	11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	24.900.000,00	100	25.498.000,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	187.867.110,00	100	207.146.502,20
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	2.516.060,00	100	2.570.321,20
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	36.988.590,00	100	37.739.771,80
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan	%		9.974.520,00		10.199.490,40
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	14.999.940,00	100	15.299.998,80

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	7.000.000,00	100	12.140.000,00
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	%	100	116.388.000,00	100	119.196.920,00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	%	100	48.702.250,00	100	49.746.045,00
7	1	1	2.07	01.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Ketersediaan Kendaraan Dinas yang menjadi kebutuhan	%	100	38.772.000,00	100	39.547.440,00
7	1	1	2.07	05.	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan mebel yang di butuhkan	%	100	9.930.250,00	100	10.198.605,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	39.455.670,00	100	40.289.113,40
7	1	1	2.08	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.000.000,00	100	1.020.000,00
7	1	1	2.08	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	23.999.800,00	100	24.479.996,00
7	1	1	2.08	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	11.960.000,00	100	12.239.200,00
7	1	1	2.08	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.495.870,00	100	2.549.917,40
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	1.214.728.228,00	100	89.294.564,56
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	15.000.000,00	100	15.300.000,00
7	1	1	2.09	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	1.199.728.228,00	12	73.994.564,56
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				131.967.500,00		134.639.350,00
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.982.500,00		12.239.650,00
7	1	2	2.01	01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	11.982.500,00	1	12.239.650,00
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan			119.985.000,00		122.399.700,00
7	1	2	2.04	03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tahun	1	119.985.000,00	1	122.399.700,00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa			143.998.600,00		146.879.972,00
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa			143.998.600,00		146.879.972,00

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	10	24.000.000,00	10	24.480.000,00
7	1	3	2.01	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Dukungan PKK, Bupati Cup dan Hari Besar Keagamaan (kegiatan)	Tahun	1	119.998.600,00	1	122.399.972,00
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Pelanggaran K3 di Kecamatan			20.000.000,00		20.400.000,00
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif			20.000.000,00		20.400.000,00
7	1	4	2.01	01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00
7	1	4	2.01	02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan antar Toko Agama	Tahun	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN			11.950.000,00		12.239.000,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan			11.950.000,00		12.239.000,00
7	1	6	2.01	04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional	Keg.	1	11.950.000,00	1	12.239.000,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN			54.999.000,00		56.099.980,00
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa			54.999.000,00		56.099.980,00
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	10	10.000.000,00	10	10.200.000,00
7	1	6	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Musrenbang Kecamatan)	Keg.	1	20.000.000,00		20.400.000,00
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	10	14.999.000,00		15.299.980,00
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	10	10.000.000,00	10	10.200.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									5.224.736.839,00		6.533.558.971
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	3.248.755.873,00	100	5.313.809.718
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	%	100	2.950.039.941,00	100	3.009.040.741

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	2.721.079.941,00	100	2.775.501.541
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN	%	100	228.960.000,00	100	233.539.200
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	268.817.100	100	274.212.142
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan	%	100	14.000.000	100	14.280.000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	%	100	29.999.600	100	30.599.992
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	%	100	24.833.700	100	25.332.474
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	199.983.800	100	203.999.676
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	26.398.832		26.927.977
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	1.500.000	12	1.530.000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	23.998.832	12	24.479.977
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	900.000	12	918.000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	3.500.000	100	1.826.557.159
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	3.500.000	100	3.570.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	Org.	0,003	229.565.400	0,003	911.493.579
						Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Org.	1.107		1.107	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	Org.	900	229.565.400	1350	911.493.579
						Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Org.	774		774	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sekolah jenjang pendidikan SLTP & SLTA yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan ideologi pancasila	Org.	500	39.945.000	500	40.798.900
						Jumlah ASN dan kaum milenial yang mendapat program pembumih pancasila	Org.	500		500	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah OPD/ASN dan ormas/pengurus yang mendapatkan revolusi mental	Org.	773	136.905.400	773	139.704.058
						Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan bela negara	Org.	100		100	
						Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Hari Kesaktian Pancasila dan Lahir Pancasila	Keg.	3		3	
						Jumlah forum Pembauran Kebangsaan.	Keg.	1		1	
						Jumlah Keg. seminar sejarah nasional dan daerah dalam bingkai NKRI bagi pelajar, mahasiswa, tomas, toga, ASN dan ormas.	Org.	200		200	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat-rapat kordinasi pembinaan ideologi dan bela negara yang dilaksanakan	Keg.	12	52.715.000	12	53.779.760
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik.	%	5	732.029.766	5	677.210.861
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%tase parpol yang mendapatkan pendidikan politik.	%	5	732.029.766	5	677.210.861
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik.	Org.	112	39.116.600	160	39.908.332
						Jumlah Tim Verifikasi Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik	Tim	1		1	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	Org.	9	692.913.166	9	637.302.529
						Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	Org.	0		75	
						Jumlah pemantauan situasi politik di daerah	Kecamatan	9		9	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	%	7,8	253.642.000	7,8	83.749.840
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%tase pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	7,8	253.642.000	7,8	83.749.840
						%tase pengurus ormas yang diberdayakan	%	7,8		7,8	

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas aktif yang diberdayakan	organisasi	15	199.971.000	14	28.999.420
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pendataan ormas di 9 kecamatan	organisasi	45	53.671.000	50	54.750.420
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah tim pengawasan ormas 9 kecamatan	Tim	9		9	
8	01	05				%tase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	%	0,33	322.940.000	0,33	165.443.800
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	%tase perkembangan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	%	0,33	322.940.000	0,33	165.443.800
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah penyalahgunaan narkoba di 9 kecamatan	Kecamatan	3		3	
					Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Keg. fasilitas kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah di 9 kecamatan	Kecamatan	2	68.082.000	2	69.509.640
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah pengurus kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	Org.	12	24.868.000	12	25.497.360
					Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Tim ketahanan ekonomi, sosial, budaya	Keg.	3		3	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah Pelaksanaan rapat Koordinasi fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Keg.	3	229.990.000	3	70.436.800
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	%tase Daerah Rawan Konflik	%	1,75	437.803.800	1,75	447.631.076
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase konflik yang terselesaikan	%	0,50	437.803.800	0,50	447.631.076
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Org. Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Potensi konflik yang terpetakan (%)	%	2,25		2,25	
						%tase Keasasihan Dok. Org. Asing (WNA) (%)	%	0,073		0,073	
						Jumlah Org. Asing yang memiliki Dok. kasasihan (Org.)	%	650	110.938.000	750	114.103.760
						Jumlah Org. Asing (Org.)	%	6.925		6.935	
						Jumlah Intelijen Daerah. (Org.)	Org.	18		23	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Org. Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Hasil deteksi Dini	Org.	8		6	
						%tase Potensi Konflik yang terdeteksi	%	1,33		1,33	
						%tase Kecamatan yang memiliki daerah rawan konflik	%	4	326.865.800	4	94.907.316

KODE					Kinerja Urusan/Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp
					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jenis Potensi Konflik (Kasus) Sara Ekonomi, Dan Sosial	Kasus	24		20	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Morowali	Keg.	1	-	1	238.620.000
TOTAL									1.067.116.500.816,00		35.157.861.266.717,90

1.067.116.500.816,00

-



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator dan Target kinerja Utama Daerah Kabupaten Morowali yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1. Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2022

Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja
Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	B
Indeks kepuasan masyarakat	B
Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WTP
Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	0,7147
Persentase Status Desa Maju	10-11
Pertumbuhan Ekonomi	10-15
Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4 – 6
PDRB Perkapita	300-400
Gini Rasio	0,30-0,24
Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	2-3
Nilai Tukar Petani (NTP)	100-102
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	
Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	83.00-85.00
Presentase Penduduk Miskin	12,75-11,01
Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	70-75
Indeks Pendidikan	74,00-75,00
Harapan lama sekolah	14.00-14.30
Rata-rata lama Sekolah	9,70-10
Indeks Kesehatan	69,33-69,50

Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja
Usia Harapan Hidup	69,33-69,50
Angka Stunting	30-28
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	75,5
Peningkatan prestasi olahraga	35
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85-90
Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	75-80
Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	75-80
Indeks Kerukunan Beragama	65-70
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	30-32
Rasio elektrifikasi	98-98
Persentase Rumah Layak Huni	
Persentase RT berakses air bersih	90-92
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	85-90
Persentase Koneksi Internet Desa	
Indeks Rawan Bencana	95-90
Jumlah Desa Tangguh Bencana	2-4
Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	90
Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	
Angka Kriminalitas	8-5

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.1 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Morowali

Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang digunakan yaitu diantaranya Penurunan Tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran dan meningkatnya Pendapatan perkapita masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja masyarakat Kabupaten Morowali Pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1.1 Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Morowali Tahun 2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
Pertumbuhan Ekonomi	10-15
Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4-6
PDRB Perkapita	300-400
Gini Rasio	0,30-0,24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2-3
Nilai Tukar Petani (NTP)	100-102
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105
Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	83.00-85.00
Presentase Penduduk Miskin	12,75-11,01
Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	70-75
Indeks Pendidikan	50.00-55.00
Harapan lama sekolah	14.00-14.30
Rata-rata lama Sekolah	9,70-10
Indeks Kesehatan	69,33-69,50
Usia Harapan Hidup	69,33-69,50
Angka Stunting	30-28
Indeks Kerukunan Beragama	65-70
Angka Kriminalitas	8-5

2. Aspek Daya saing Daerah;

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2 Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	30-32
Rasio elektrifikasi	98-98
Presentase Rumah Layak Huni	
Persentase RT berakses air bersih	90-92
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	75,5
Peningkatan prestasi olahraga	35
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85-90
Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	75-80
Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	75-80
Indeks Kerukunan Beragama	65-70

3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3. Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2022

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
ASPEK PELAYANAN UMUM	
Indeks Rawan Bencana	95-90
Jumlah Desa Tangguh Bencana	2-4
Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	90
Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	85-90
Presentase Koneksi Internet Desa	
Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	B
Indeks kepuasan masyarakat	B
Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WTP
Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	0,7147
Persentase Status Desa Maju	10 - 11



BAB VII PENUTUP

Penyusunan RKPD Tahun 2022 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 ini merupakan bagian dari tahap awal penyusunan RKPD Tahun 2022 tersebut. Sebagai tahapan awal, rancangan awal RKPD ini tentu saja belum sempurna dan membutuhkan pengembangan dan pencermatan lebih lanjut untuk menjadi RKPD Tahun 2022 yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Morowali di tahun 2022 sebagai bagian langkah untuk memenuhi sasaran pembangunan RPJMD 2018 - 2023. Beberapa data dan analisis pada dokumen ini masih bersifat sementara dan akan dilengkapi serta disempurnakan seiring dengan berjalannya tahapan menuju tersusunnya RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2022.

BUPATI MOROWALI,

Ttd

Drs. TASLIM



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
No. Telp :
Fax :
Website :
Email :